

TREND PENELITIAN AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA

ACHMAD RYZKY

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: aryzky8@gmail.com

RINI

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: rini@uinjkt.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to explain the development of sharia accounting research. This study uses content analysis methods on the number of published papers, author institutions, and research areas within the topic of Islamic accounting. The sample used amounted to 1404 papers published in journals that were published in the national accounting symposium proceedings during 2008 – 2017. The result of the research shows that there is no consistent improvement to the contribution of sharia accounting papers. In addition, most of the authors of sharia accounting papers are from public universities, and the most popular research area is the topic of sharia banking.

Keywords: Content Analysis, Research Trend, Sharia Accounting

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah didefinisikan secara bebas sebagai praktik akuntansi yang dilandasi oleh Al Qur'an dan Hadits dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) (Choudhury, 2005; Nurhayati dan Wasilah, 2011). Produk akhir akuntansi syariah adalah informasi akuntansi yang akurat untuk menghitung zakat dan pertanggung jawaban kepada Allah dengan berlandaskan moral iman dan taqwa (Haniffa, 2001). Selain itu akuntansi syariah juga diperlukan oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah dan perbankan syariah (Napier, 2007).

Seiring dengan perkembangan bisnis syariah, penelitian akuntansi syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Penelitian berperan dalam memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah di dunia bisnis. Menurut Saputro (2010), perkembangan kajian akuntansi syariah berbanding lurus dengan pesatnya kemajuan industri perbankan syariah. Meskipun secara teoritis peruntukannya tidak sebatas bagi industri perbankan syariah, tetapi kajian akuntansi syariah berguna untuk kegiatan muamalah yang berdasar syariat secara umum.

Semakin berkembangnya penelitian di bidang akuntansi mendorong para peneliti untuk melakukan penelitian *literature review* terhadap topik akuntansi secara umum, sedangkan penelitian *literature review* di bidang akuntansi syariah masih sedikit sekali dilakukan, oleh karena itu penelitian ini berfokus untuk meneliti perkembangan riset akuntansi syariah, asal institusi penulis, dan area riset akuntansi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

Asrori (2002) mengemukakan bahwa tujuan diselenggarakannya akuntansi syariah adalah memberikan informasi secara lengkap untuk mengetahui nilai dan kegiatan ekonomi yang bertentangan dan yang diperbolehkan oleh syariah; meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha; serta menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan (terkait) dalam suatu entitas ekonomi syariah berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan etika bisnis Islami.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia seiring dengan perkembangan perbankan syariah. Di dunia praktis, akuntansi syariah mulai banyak diperbincangkan pada awal tahun 1990-an, tepatnya setelah bank syariah pertama berdiri

yakni Bank Muammalat Indonesia, Mustofa (2013). Bank yang berdiri pada tahun 1991 ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, Alhaq (2010) dalam Mustofa (2013). Penerapan prinsip-prinsip dan aturan syariat Islam dibutuhkan oleh beberapa lembaga keuangan, seperti lembaga keuangan Islam, perusahaan asuransi syariah, perusahaan investasi Islam, *multifinance* syariah, pasar modal syariah dan raturan *Bait al-Maal waal Tamwil* yang didirikan di Indonesia (Murtiyani, 2009).

Riset Akuntansi

Tycho dan Dwi (2017) menyimpulkan bahwa riset akuntansi adalah usaha untuk mencari/ menemukan sesuatu hal berhubungan dengan seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya atau sesuatu hal yang berhubungan dengan kegiatan jasa yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif dengan menggunakan metode ilmiah.

Perkembangan Riset Akuntansi

Dalam disiplin ilmu akuntansi, riset akuntansi memiliki peran yang sangat penting. Pertama, riset akuntansi berperan untuk memberikan pengaruh terhadap praktik akuntansi, sehingga praktik akuntansi tidak sekedar asal jalan tetapi didasarkan atas riset yang kemudian dilaborasikan dalam teori. Teori yang ada kemudian akan menjadi subjek untuk dilakukan pengujian empiris secara berkelanjutan. Dengan demikian riset akuntansi bukanlah tujuan akhir akan tetapi adalah proses untuk membangun teori dan praktik. Peran riset akuntansi yang kedua adalah untuk memperbaiki pemahaman terhadap lingkungan akuntansi agar praktik akuntansi tidak dipahami sebagai sesuatu yang diterima begitu saja (*taken for granted*). Secara garis besar tujuan dilakukannya riset akuntansi tersebut adalah untuk mendeskripsikan (*to describe*), menjelaskan (*to explain*), dan memperbaiki fenomena akuntansi (*to predict*) (Oler *et. al.*, 2010).

Analisis Riset Akuntansi Syariah

Analisis riset akuntansi syariah pada studi sebelumnya berupa *review* deskriptif sehingga sulit untuk menyimpulkan bagaimana perkembangan riset akuntansi syariah (Maali dan Napier, 1997; Napier, 2007; Ali, 2008; Napier dan Haniffa, 2011; dan Mustofa, 2013). Berdasarkan hasil *review* oleh Mustofa (2013), penelitian akuntansi syariah

di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011. Topik yang paling banyak diminati adalah topik perbankan syariah sebesar 64,08%, yang memiliki rata-rata peminatan adalah topik pasar modal syariah sebesar 9,22% dan topik zakat sebesar 6,15%. Sedangkan topik yang paling rendah peminatannya adalah sistem akuntansi syariah sebesar 0,16%, sayangnya penelitian akuntansi syariah di Indonesia selama periode tahun 2001-2011 masih banyak dilakukan oleh perguruan tinggi umum, yaitu sebesar 70,39%, dibandingkan dengan perguruan tinggi Islam sebesar 28,96% dan institusi lainnya hanya sebesar 0,65%.

Hasil riset Tycho dan Dwi (2017) menunjukkan bahwa artikel di kategori akuntansi syariah memiliki frekuensi yang lebih sedikit dibandingkan artikel dikategori akuntansi keuangan dan pasar modal, akuntansi manajemen dan keperilakuan, audit, perpajakan, sistem informasi akuntansi, dan pendidikan akuntansi di artikel yang dimuat di *proceeding SNA* selama tahun 2012-2014.

Riset Akuntansi Syariah

Studi yang *me-review* riset khusus topik akuntansi syariah telah dilakukan oleh Maali dan Napier (1997), Napier (2007), Ali (2008), Dima, Delia, dan Luminita (2010), Napier dan Haniffa (2011), dan Mustofa (2013).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian arsip (*archival research*), merupakan penelitian terhadap fakta tertulis (dokumen) atau berupa arsip data (Indrianto dan Supomo, 2002). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder berupa naskah utama dan artikel diskusi yang dipublikasikan di artikel yang dimuat di *proceeding* SNA selama sepuluh tahun terakhir, yaitu pada periode 2008-2017. Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja (Indrianto dan Supomo, 2002). Adapun artikel nasional yang dipilih adalah artikel akuntansi syariah yang dimuat di *proceeding* Simposium Nasional Akuntansi tahun 2008-2017.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang berupa naskah utama dan artikel diskusi yang dipublikasikan dalam artikel yang dimuat di *proceeding* Simposium Nasional Akuntansi (SNA) selama sepuluh tahun terakhir, yaitu periode 2008-2017. Data diperoleh melalui akses artikel *online* yang disediakan oleh website penyelenggara SNA setiap tahunnya. Metode analisis data adalah sebagai berikut:

1) Analisis pertama dilakukan dengan cara pengklasifikasian seluruh artikel riset yang

dimuat di *proceeding* Simposium Nasional Akuntansi (SNA) berdasarkan topik riset akuntansi yang terdiri dari: 1) akuntansi keuangan dan pasar modal (AKPM); 2) akuntansi manajemen dan berperilaku (AKMK); 3) sistem informasi, pengauditan dan etika profesi (SIPE); 4) perpajakan (PPJK); 5) akuntansi syariah (AKSR); 6) pendidikan akuntansi (PAK); 7) *corporate governance* (CG); 8) akuntansi keuangan sektor publik (ASPAM); 9) akuntansi manajemen sektor publik (ASPAM); 10) sistem informasi dan auditing sektor publik (ASPSIA); dan 11) *good governance* sektor publik (ASPGG). Klasifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi isu utama yang dibahas didalam artikel dilihat dari judul, abstrak, dan kata kunci. Isu utama yang teridentifikasi kemudian dirujuk ke masing-masing definisi kategori topik menurut artikel sebelumnya. Dari analisis tersebut, proporsi dan perkembangan antara artikel akuntansi syariah dibandingkan dengan proporsi dan perkembangan artikel di area topik lainnya.

2) Kedua dilakukan dengan mengklasifikasikan artikel yang termasuk didalam area topik akuntansi syariah berdasarkan asal institusi penulis yang terdiri dari perguruan tinggi umum yang tercantum di DIKTI dan perguruan tinggi Islam yang tercantum di DIKTIS.

3) Analisis ketiga adalah pengklasifikasian artikel yang termasuk didalam area topik akuntansi syariah kedalam kategori berdasarkan area riset akuntansi syariah menurut Mustofa (2013) dengan sedikit pengembangan oleh peneliti. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui area riset akuntansi syariah yang paling diminati oleh peneliti akuntansi di jurnal atau artikel akuntansi. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan kemiripan isu yang diungkapkan didalam contoh analisis artikel masing-masing kategori area riset akuntansi syariah, disamping mempertimbangkan penjelasan definisi masing-masing kategori. Satu artikel akuntansi syariah hanya dapat masuk ke dalam satu kategori untuk masing-masing model klasifikasi. Kemudian melakukan pengklasifikasian kategori umum apa saja yang paling diminati peneliti dari setiap area riset yang dibahas.

Untuk menjamin keakuratan data, semua data penulis tersebut diverifikasi ulang menurut *database* yang disediakan masing-masing universitas afiliasi penulis atau sumber lain dari internet. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik penulis yang berkontribusi di dalam artikel akuntansi syariah pada artikel SNA selama 10 tahun terakhir periode 2008-2017.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Analisis artikel ini dibatasi hanya pada artikel yang dimuat di *proceeding* Simposium Nasional Akuntansi dari tahun 2008-2017, digunakannya artikel yang dimuat dalam *proceeding* Simposium Nasional Akuntansi karena artikel yang dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi seharusnya merupakan topik-topik terbaru yang menarik perhatian peneliti atau dosen akuntansi di Indonesia.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang berupa 1404 artikel yang terdiri dari naskah utama dan artikel diskusi yang dipublikasikan dalam *proceeding* Simposium Nasional Akuntansi selama 10 tahun terakhir, yaitu pada periode 2008-2017. Data diperoleh melalui akses artikel online yang disediakan oleh website penyelenggara Simposium Nasional Akuntansi setiap tahunnya.

Tabel 1. Distribusi Artikel yang Dimuat di *Proceeding* SNA

Tahun	SNA
2008	78
2009	64
2010	109
2011	80
2012	118
2013	198
2014	176
2015	200
2016	181
2017	200
Jumlah	1404

Sumber: Data diolah (2018)

Analisis Topik Akuntansi

Klasifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi isu utama yang dibahas di dalam artikel dilihat dari judul, abstrak, dan kata kunci. Isu utama yang teridentifikasi kemudian dirujuk ke masing-masing definisi kategori topik riset akuntansi. Kemudian membandingkan proporsi dan perkembangan antara artikel akuntansi syariah dibandingkan dengan proporsi dan perkembangan artikel di area topik lainnya.

Setelah dianalisis secara mendalam ternyata ada kemungkinan artikel yang dimuat di proceeding Simposium Nasional Akuntansi merupakan artikel yang *overlap* atau artikel yang membahas mengenai dua topik atau lebih, yang berarti artikel tersebut juga membahas tentang

topik akuntansi syariah pada topik selain akuntansi syariah. Oleh karena itu peneliti mencoba meneliti kembali, artikel yang dimuat di proceeding Simposium Nasional Akuntansi tahun 2008-2017 yang sudah dikelompokkan dengan mengecek dan mengklasifikasikan satu persatu untuk melihat artikel yang *overlap* tersebut.

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa ternyata ada beberapa artikel yang *overlap*, contohnya artikel yang ada di topik *Corporate Governance* ternyata memiliki unsur akuntansi syariah berupa penggunaan objek akuntansi syariah yaitu bank syariah, maka dari itu dapat dikatakan artikel ini selain membahas topik *Corporate Governance*, juga membahas topik akuntansi syariah.

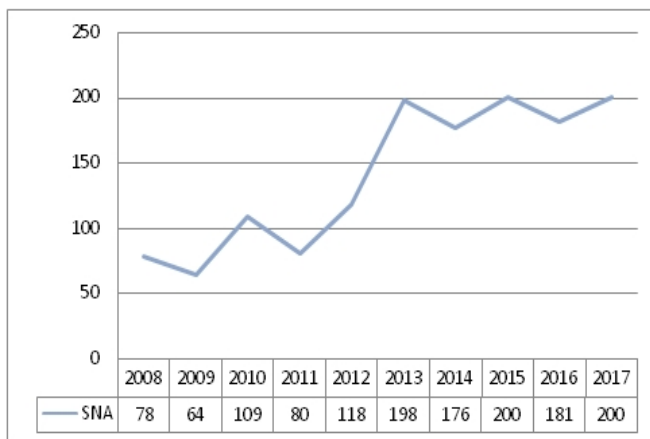
Tabel 2. Pengembangan Distribusi Artikel Berdasarkan Topik Akuntansi

Topik		AKPM	AKMK	SIPE	PPJK	AKSR	PAK	CG	ASPAK	ASPAM	ASPSIA	ASPGG	Jumlah
Tahun													
2008	Jumlah	30	10	15	0	7	9	0	0	1	2	4	78
	%	38,46%	12,82%	19,23%	0,00%	8,97%	11,54%	0,00%	0,00%	1,28%	2,56%	5,13%	
2009	Jumlah	27	10	8	4	2	1	2	3	1	5	1	64
	%	42,19%	15,63%	12,50%	6,25%	3,13%	1,56%	3,13%	4,69%	1,56%	7,81%	1,56%	
2010	Jumlah	39	9	15	6	10	11	0	1	0	4	14	109
	%	35,78%	8,26%	13,76%	5,50%	9,17%	10,09%	0,00%	0,92%	0,00%	3,67%	12,84%	
2011	Jumlah	25	21	5	3	3	8	6	2	2	3	2	80
	%	31,25%	26,25%	6,25%	3,75%	3,75%	10,00%	7,50%	2,50%	2,50%	3,75%	2,50%	
2012	Jumlah	30	12	26	12	2	4	13	10	1	4	4	118
	%	25,42%	10,17%	22,03%	10,17%	1,69%	3,39%	11,02%	8,47%	0,85%	3,39%	3,39%	
2013	Jumlah	52	22	35	20	1	4	23	10	6	8	17	198
	%	26,26%	11,11%	17,68%	10,10%	0,51%	2,02%	11,62%	5,05%	3,03%	4,04%	8,59%	
2014	Jumlah	50	9	24	26	3	5	24	14	9	6	6	176
	%	28,41%	5,11%	13,64%	14,77%	1,70%	2,84%	13,64%	7,95%	5,11%	3,41%	3,41%	

2015	Jumlah	60	20	21	15	9	8	21	13	9	11	13	200
	%	30,00%	10,00%	10,50%	7,50%	4,50%	4,00%	10,50%	6,50%	4,50%	5,50%	6,50%	
2016	Jumlah	49	24	19	18	20	2	8	8	6	14	13	181
	%	27,07%	13,26%	10,50%	9,94%	11,05%	1,10%	4,42%	4,42%	3,31%	7,73%	7,18%	
2017	Jumlah	27	29	17	30	17	13	27	12	5	10	13	200
	%	13,50%	14,50%	8,50%	15,00%	8,50%	6,50%	14,00%	6,00%	2,50%	5,00%	6,50%	
Total	Jumlah	392	166	185	136	74	65	126	73	40	67	89	1404
	%	27,92%	11,82%	13,18%	9,69%	5,27%	4,63%	8,97%	5,20%	2,85%	4,77%	6,34%	

Sumber: Data diolah (2018)

Analisis pada tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah artikel akuntansi yang dipublikasikan di artikel yang dimuat di proceeding Simposium Nasional Akuntansi selama 10 tahun terakhir tidak menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Meskipun demikian artikel akuntansi yang dipublikasikan justru cenderung mengalami peningkatan dari periode awal, seperti yang disajikan oleh grafik 1.

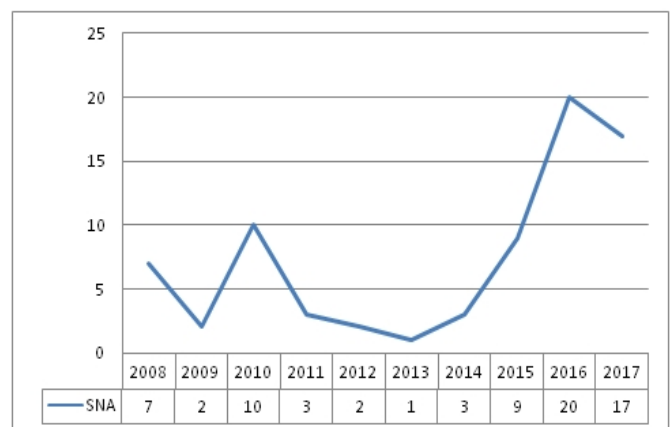


Sumber: Data diolah (2018)

Grafik 1. Distribusi Artikel Akuntansi

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa proporsi artikel akuntansi syariah selalu lebih kecil dibandingkan artikel akuntansi keuangan dan

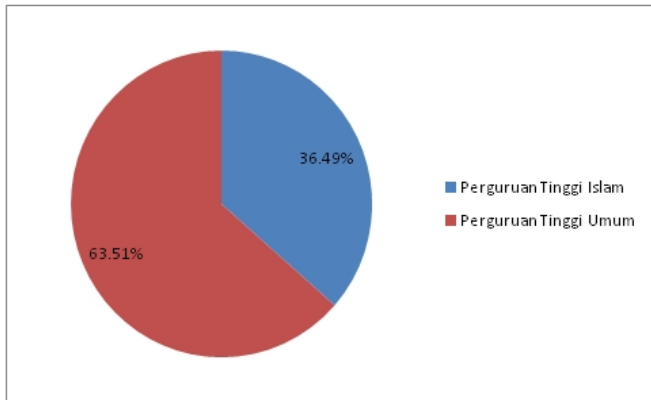
pasar modal. Jumlah artikel akuntansi syariah selama 10 tahun terakhir ini hanya 74 dari total 1404 artikel atau hanya 5,27% saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa, riset akuntansi relatif terpusat pada topik akuntansi keuangan dan pasar modal dengan kontribusi sebanyak 392 artikel atau sekitar 27,92%. Dilihat dari pertumbuhan riset akuntansi syariah, jumlah artikel akuntansi syariah mengalami kenaikan yang fluktuatif selama periode 2008-2017, seperti yang disajikan oleh grafik 2.



Sumber: Data diolah (2018)

Grafik 2. Distribusi Artikel Akuntansi Syariah

Analisis Institusi Penulis

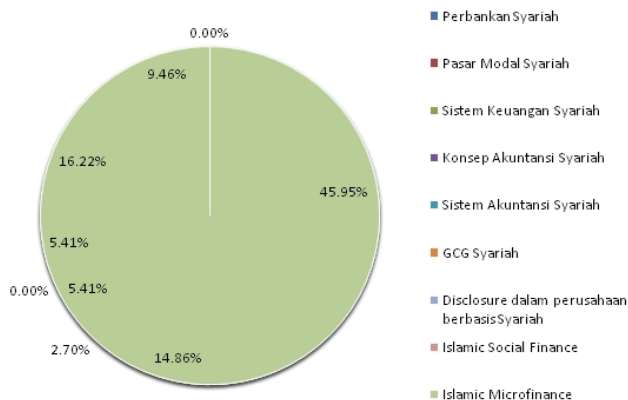


Sumber: Data diolah (2018)

Grafik 3. Institusi Penulis Artikel Akuntansi Syariah Tahun 2008-2017

Dari grafik 3 diatas dapat diketahui bahwa perguruan tinggi umum merupakan institusi yang paling banyak melakukan penelitian akuntansi syariah selama periode tahun 2008-2017, yaitu sebesar 63,51%. Sedangkan perguruan tinggi Islam masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan perguruan tinggi umum, yaitu sebesar 36,49%.

Analisis Area Riset Akuntansi Syariah



Sumber: Data diolah (2018)

Grafik 4. Klasifikasi berdasarkan Area Riset Akuntansi Syariah Tahun 2008-2017

Jika dilihat dari sudut pandang metode klasifikasi Mustofa (2001) dengan sedikit perubahan peneliti yang dipaparkan pada grafik 4, artikel akuntansi syariah sebagian besar membahas mengenai perbankan syariah dengan jumlah kontribusi sebanyak 34 artikel atau sekitar 45,95%. Artinya area riset tersebut merupakan area yang paling diminati oleh kalangan peneliti akuntansi syariah dibandingkan area riset lainnya.

KESIMPULAN

- 1) Hasil analisis menunjukkan bahwa belum adanya peningkatan jumlah proporsi artikel akuntansi syariah pada artikel yang dimuat di proceeding SNA dibandingkan dengan studi yang dilakukan oleh Mustofa (2013), dan Tycho dan Dwi (2017). Serta belum adanya indikasi meningkatnya ketertarikan para peneliti akuntansi di dalam topik akuntansi syariah. Pertumbuhan artikel akuntansi syariah juga berfluktuatif selama periode 2008-2017. Perhatian komunitas peneliti akuntansi juga masih terpusat pada topik akuntansi keuangan, dan pasar modal, dan belum ada indikasi pergeseran ke topik akuntansi syariah selama 10 tahun terakhir.
- 2) Penelitian akuntansi syariah pada artikel yang dimuat di proceeding SNA di Indonesia selama periode 2008-2017 masih banyak dilakukan oleh perguruan tinggi umum, yaitu sebesar

63,51%, dibandingkan dengan perguruan tinggi Islam sebesar 36,49%.

- 3) Area riset di dalam topik akuntansi syariah yang paling diminati kalangan peneliti akuntansi syariah berdasarkan metode klasifikasi Mustofa (2013), dengan adanya pengembangan oleh peneliti adalah perbankan syariah, dan yang paling tidak diminati ialah sistem akuntansi syariah dan *Islamic Microfinance*. Studi Mustofa (2013) juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa sebagian besar peneliti akuntansi syariah membahas mengenai perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. N. (2008). Islamic Finance and Economics as Reflected in Research and Publications. *Review of Islamic Economics*, 12(1): 151-168.
- Asrori. (2002). Akuntansi Syariah Bidang Baru Studi Akuntansi dalam Konteks Epistemologi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 11(2).
- Choudhury, M. A. (2005). Islamic Economics and Finance: Where do They Stand?. *The Islamic Quarterly*, 49(4) 247-280.
- Dima, S., David, D., & Paiusan, L. (2010). Specific Features of Islamic Accounting and Cultural Paradigm. *MPRA*, 1-20.
- Hutagalung, T. B., & Utomo, D. C. (2017). Meta-Analisis Variasi Penelitian dari Peneliti Akuntansi di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4): 352-362.
- Kamla, R. (2009). Critical Insights Into Contemporary Islamic Accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(8): 921-932.
- Maali, B., & Napier, C. (1997). Twenty Five Years of Islamic Accounting Research: A Silver Jubilee Review. *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 10(4): 481-531.
- Martani, D., & Al Irsyad, R. (2013). Analisis Publikasi Artikel pada Jurnal The Accounting Review, Journal of Accounting and Economics, dan Journal of Accounting Research Tahun 2008-2012. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*.
- Murtiyani, Siti. (2009). The Historical Fact and Development Concept Of Shariah Accounting. *Jurnal Mukaddimah*, 15(26).
- Mustofa. (2013). *Trend Penelitian Akuntansi Syariah di Indonesia pada Awal Abad 21*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Napier, C. (2007). Other Cultures, Other Accountings? Islamic Accounting From Past to Present. In *5th Accounting History International Conference, Banff, Canada*, 9-11.
- Napier, C., Roszaini, & Haniffa. (2011). An Islamic Perspective of Accounting: Introduction and Overview. *Islamic Accounting*, 13-20.
- Oler, D. K., Oler, M. J., & Skousen, C. J. (2010). Characterizing Accounting Research. *Accounting Horizons*, 24(4): 635-670.

Sri, N.W. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Supomo, B., & Indriantoro, N. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BFEE.

MANAJEMEN PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

AGUS PERMANA

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

E-mail: agustards@gmail.com

AHMAD BAEHAQI

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

E-mail: baehaqi17@gmail.com

Abstract

This study describes about the management of zakat based on good governance principles. The method of this study is using library research such as secondary data in the form of books, journal articles or other literature based on the topic being discussed. The results of this study show that good governance is required by LAZ to improve professional performance in order to meet the interests of stakeholders. The implementation of Good Governance Principles in the management of zakat is as follows: Transparency, it means that LAZ must apply the principle of information disclosure to stakeholders. Accountability, it means that LAZ must hold the principle of trust (accountable) in managing zakat funds. Responsibility, it means that LAZ is responsible for distributing zakat funds right up to mustahiq. Independency, it means that LAZ is managed independently and has no dependence on certain people or other institutions. Fairness, it means that LAZ should make every effort to be fair in distributing zakat funds for those who are entitled to it. Sharia Compliance, it means that the collection and distribution of zakat funds managed by LAZ must comply with the Islamic corridor.

Keywords: Good Governance, Management Funtions, Management of Zakah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau 85% dari total populasi (BPS, 2015). Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Penelitian BAZNAS pada tahun 2015 menyebutkan bahwa potensi zakat

nasional Indonesia mencapai Rp. 286 triliun. Angka tersebut dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya. Sekalipun demikian, realisasi penghimpunan dana ZIS masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi yang bisa diperoleh. Pada tahun 2015, ZIS yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp. 3,7 triliun atau kurang dari 1,3% potensinya (Baznas, 2016).

Kesenjangan yang terjadi antara potensi dan realisasi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah rendahnya kesadaran muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga zakat, rendahnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat, dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal (Baznas, 2016). Menurut Fadillah (2011), potensi zakat di Indonesia yang besar belum bisa dikelola dengan baik karena beberapa masalah berikut:

- a. Badan pengelola zakat dianggap tidak professional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- b. Pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas, yaitu berkompeten (*kaffah*), amanah dan memiliki etos kerja tinggi (*himmah*).
- c. Sistem birokrasi dan *good governance* dalam pengelolaan zakat di Indonesia masih lemah sehingga berakibat rendahnya akuntabilitas dan transparansi Baznas dan LAZ.

Selain itu, menurut Mintarti (2011), organisasi pengelola zakat masih banyak yang belum memiliki atau tidak memahami pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasinya. Selain itu, belum terciptanya kerja sama yang baik antara sesama organisasi pengelola zakat serta berbagai pihak dalam mendayagunakan zakat, seperti kerja sama antara pemerintah,

MUI, ormas Islam, dan para pengusaha. Bentuk kerjasama antara sesama lembaga zakat misalnya dapat diwujudkan dalam bentuk program pendistribusian dana zakat yang terintegrasi. Hal ini masih sulit terealisasi karena belum ada standarisasi manajemen pengelolaan zakat yang dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan publik baik pada *muzakki*, *mustahiq*, pihak-pihak terkait lainnya maupun masyarakat secara umum (IMZ & PEBS, 2009).

Berdasarkan penjelasan di atas, LAZ membutuhkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar potensi dana zakat yang begitu besar, dan penghimpunan dana zakat yang semakin meningkat tiap tahunnya bisa diimbangi dengan kualitas manajemen yang baik sehingga pencapaian dan tujuan LAZ lebih optimal. Menurut Mahmudi (2009), untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen LAZ. Penerapan prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) diperlukan untuk menjamin dana zakat dari masyarakat telah di dayagunakan secara optimal oleh LAZ. Dengan menerapkan *Good Governance*, maka setiap lembaga zakat dapat dinilai kualitas tata kelola organisasinya dan dapat dilihat kinerja mana LAZ yang baik dan buruk.

Dilihat dari efisiensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam penglolaannya, harus diakui bahwa tata kelola adalah hal yang penting

untuk mendorong efisiensi LAZ. *Good Governance* didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan. *Good Governance* LAZ yang baik adalah lembaga yang direktif, akuntabel, transparan dan adil. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran LAZ (Wahab, 2013).

Tujuan dan sasaran LAZ dapat dicapai melalui tata kelola zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme dan keefektifan tata kelola zakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan (Anwar, 2012).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Manajemen

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) sumber daya organisasi (Daft, 2016:4). Manajemen memastikan bahwa aktivitas kerja selesai secara efisien dan efektif oleh yang bertanggung jawab untuk melakukannya melalui koordinasi dan pengawasan (Robbin & Mary, 2012:9).

Pengelolaan Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat (Hasan, 2011). Dari pengertian pengelolaan zakat tersebut menjelaskan bahwa ada tiga unsur pengelolaan, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada *mustahiq* secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, Karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan (Hasanah, 2016). Dana yang telah dihimpun kemudian didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Pendayagunaan

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Pendayagunaan secara produktif pada zaman sekarang sangatlah diperlukan,

karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh *mustahiq* tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan zakat itu sendiri, yaitu menghilangkan kemiskinan dan mensejahterakan bagi kaum miskin dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi *mustahiq* melainkan akan menjadi *muzakki* (IMZ, 2012).

Good Governance

LAZ belum mempunyai pedoman tersendiri untuk menerapkan *Good Governance*. Berbeda dengan perbankan dan BUMN yang telah mempunyai pedoman dalam mempraktikkan *Good Corporate Governance* (Mahmudi, 2009). Jika pada perbankan, *Good Corporate Governance* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 atau POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang tata kelola yang baik pada Bank Umum atau PBI 11/33/PBI/2009 pedoman *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah. Sedangkan pada BUMN, pedoman *Good Corporate Governance* diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No Per 01/MBU/2011.

Perumusan pedoman prinsip *Good Governance* pada LAZ dapat mengadopsi dan mengadaptasi prinsip *Good Corporate Governance* pada peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya. Saat ini prinsip-prinsip *good governance* yang dapat diadopsi oleh LAZ dan dianggap paling mapan baik ditinjau dari

teori maupun praktiknya terdiri atas lima aspek yang disingkat menjadi TARIF, yaitu, 1) Keterbukaan (*Transparancy*), 2) Akuntabilitas (*Accountability*), 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*), 4) Independensi (*Independency*), 5) Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*). Selanjutnya, Mahmudi (2009), menambahkan prinsip yang berkaitan dengan *good governance* di LAZ, yaitu kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Berikut adalah penjelasan prinsip-prinsip *good governance* beserta *sharia compliance*.

Keterbukaan (Transparancy)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan/organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan/organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan (Widuri & Paramita, 2007).

Akuntabilitas (Accountability)

Organisasi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan *stakeholder*. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai

kinerja yang berkesinambungan (KNKG, 2006). Sedangkan menurut Kaihatu (2006), akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ organisasi sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif.

Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Sedangkan menurut Hastuti (2005), *Responsibility* meliputi: (a) Menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan, (b) Para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, (c) Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, (d) Jika diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.

Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Governance*, perusahaan/organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (KNKG, 2006). Independensi dapat dikatakan juga sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak

manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Kaihatu, 2006).

Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Widuri & Paramita, 2007). Sedangkan menurut (Kaihatu, 2006), *fairness* merupakan perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam yang berlaku terhadap kegiatan penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan definisi ini maka kepatuhan syariah hanya difokuskan sebagai aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam. Kepatuhan syariah juga merupakan prinsip hukum Islam dalam fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Kepatuhan syariah berbentuk fatwa yang bersumber dari lembaga berwenang, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Ilhami, 2009). Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-

prinsip syariah diperlukan pengawas syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Luthfinanda & Sinarasri, 2014:25).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan penekatan studi kepustakaan, yang akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan LAZ menurut prinsip-prinsip *good governance*. Jenis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data skunder. Sumber data yang dimaksud adalah jurnal-jurnal yang diperoleh dari hasil penelusuran diinternet serta buku-buku mengenai pengelolaan zakat dan juga peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Keputusan Menteri Agama (KMA). Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini memberikan beberapa keuntungan terutama terkait waktu dan biaya penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat

Dalam rangka menerapkan tata kelola yang baik, LAZ wajib berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu dalam pelaksanaan *good governance*, organisasi pengelola zakat juga harus memenuhi prinsip syariah (*syariah compliance*). Ketidaksesuaian tata kelola LAZ dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko

terutama reputasi bagi LAZ, selain itu *Good governance* di lembaga amil zakat (LAZ) akan memberikan banyak manfaat bagi LAZ (Rahayu, 2014:216).

LAZ tergolong ke dalam organisasi atau Lembaga Keuangan Islam Publik yang mengelola dan mendistribusikan dana publik, maka LAZ juga harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan: syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas (Budiman, 2012: 70).

Lembaga keuangan Islam publik juga harus dapat meningkatkan kinerjanya secara sungguh-sungguh dan memenuhi kepentingan *stakeholder* dengan menerapkan *Good Governance* secara efektif. Dasar pemikiran dan kepercayaan yang kuat akan keadilan sistem ekonomi Islam patut dijadikan sebagai landasan untuk mengadopsi semua ukuran yang memungkinkan berfungsinya sistem keuangan Islam dalam menjaga kepentingan seluruh *stakeholder* (Chapra & Ahmed, 2008:12).

Untuk mengoptimalkan ZIS sangatlah dipengaruhi oleh kualitas manajemen LAZ. Maka penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) diperlukan untuk menjamin dana zakat dari masyarakat telah didayagunakan secara optimal oleh LAZ (Mahmudi, 2009:236-237). Penerapan prinsip-prinsip *good governance*

dalam pengelolaan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah sebagai berikut:

Keterbukaan (*Transparency*)

LAZ merupakan salah satu contoh organisasi yang memerlukan tingkat transparansi yang tinggi karena LAZ merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dimana tugas dari organisasi ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dan berlebih (*muzakki*) dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dana (*mustahiq*) (Rahayu, 2014).

Dalam pengelolaan zakat di LAZ, transparansi atau keterbukaan bermakna bahwa LAZ harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Transparansi informasi meliputi penyajian laporan keuangan kepada publik; keterbukaan informasi tentang program kerja; transparansi dalam perencanaan, pengalokasian dan pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh; serta keterbukaan dalam penganggaran. Keterbukaan informasi ini sangat penting agar LAZ dapat diawasi oleh masyarakat dan otoritas terkait sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan dana ZIS (Mahmudi, 2009:72-73).

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan

pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu LAZ dan *stakeholders*, karena tidak hanya melibatkan pihak internal LAZ saja tetapi lebih kepada pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas. Hal inilah yang seharusnya dijadikan LAZ untuk mengurangi ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi (Rahmat & Atmaja, 2017).

Dalam rangka transparansi pengelolaan dana zakat, LAZ bisa merealisasikannya dengan berbagai bentuk seperti menyusun laporan rutin kepada muzakki, bulletin, dan publikasi di media massa (Muhammad, 2006). Transparansi LAZ bisa diwujudkan dengan memberikan laporan tertulis (tahunan dan bulanan). Laporan tersebut sebagai pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, wujud dari kewajiban pertanggungjawaban dan kedisiplinan sebagai lembaga pengelola zakat. Disamping itu sistem laporan keuangan juga harus dilakukan setiap bulan, yang sebelumnya diadakan rapat (bulanan) mengenai kegiatan yang sudah terlaksana.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip *Good Governance* yang bermakna bahwa LAZ harus memegang prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana ZIS yang diterimanya. Prinsip akuntabilitas menekankan adanya kejelasan

pola pertanggungjawaban (*pattern of accountability*), yaitu kepada siapa atau pihak mana LAZ akan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Akuntabilitas keuangan LAZ diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 29 dengan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana keagamaan lain secara berkala, sebelum itu juga dalam KMA Depag, RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan teknis atas ketersediaan audit keuangan lembaga, dan teknis penulisan laporan keuangan juga diatur dalam PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat.

Dari segi akuntabilitas prosedur, lembaga pengelola ZIS harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab organ masing-masing lembaga dan semua karyawan secara jelas, dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai lembaga (*corporate value*), dan strategi lembaga. Lembaga pengelola ZIS juga harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan, baik dalam membuat kebijakan maupun melaksanakan kebijakan. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 16 juga menyebutkan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZ dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari segi Akuntabilitas manfaat, dalam hal ini apakah pengelolaan yang dilakukan lembaga pengelola ZIS telah mencapai sasaran atau belum (Mahmudi,

2009:72-73). Akuntabilitas LAZ ini telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Standar akuntansi keuangan syari'ah murni disusun berdasarkan fatwa. Konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang kini masih dalam bentuk PSAK Nomor 109 (Kristin, 2011:22).

Dalam laporan keuangan tersebut akuntabilitas LAZ dapat ditentukan untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah (IAI, 2008).

Akuntabilitas LAZ setidaknya dapat ditunjukkan dengan menaati pilar-pilar aturan pokok terkait dengan zakat, yaitu aturan agama, aturan undang-undang, dan aturan pelaporan keuangan. Menaati aturan-aturan pokok dalam aktivitas kelembagaan secara langsung juga membentuk penerapan budaya *good governance*. Akuntabilitas LAZ dalam mematuhi aturan agama terwujud dalam menaati QS. Al Maidah (9) ayat 60 dalam hal pendistribusian dan penetapan pihak-pihak yang berhak menerima

zakat. Mewajibkan dengan menarik zakat dari wajib zakat sebagaimana QS. At Taubah (9) ayat 34-35. Mengikuti ketentuan zakat sebagaimana pendapat jumhur ulama, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas LAZ dapat diwujudkan dengan mengacu pada 3 (tiga) pilar: agama (hukum syariah), pemerintah (undang-undang negara), dan pelaporan keuangan (PSAK).

Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

LAZ harus tanggap dalam melayani masyarakat. Daya tanggap meliputi dua aspek yaitu responsif terhadap *muzakki* dan responsif terhadap kebutuhan *mustahiq*. Prinsip daya tanggap ini mendorong LAZ bersikap lebih responsif, proaktif, antisipatif, inovatif, kreatif, dan kompetitif, tidak sekedar pasif dan reaktif saja melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat (Mahmudi, 2009:72-73). *Muzakki* bagi amil adalah ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan. Memberikan layanan kepada *muzakki* pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada amil. Untuk memberikan layanan *muzakki* (DEKS BI, 2016:113). Ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

a. Data dan Kelas *Muzakki*

Data *muzakki* dan kelasnya harus ditata dan didokumentasikan. Data *muzakki* diharapkan

memberikan informasi yang akurat mengenai identitas *muzakki*, kondisi sosial ekonominya, jenis harta yang dizakati, dan sebagainya. Kelas *muzakki* dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemanfaatan data, sehingga *muzakki* dapat diklasifikasikan menurut kelasnya, seperti frekuensi pembayaran zakat, besaran zakat, jenis harta zakat, sehingga bisa diprediksikan potensi zakat dengan lebih tepat.

b. Data Keluhan *Muzakki*

Keluhan dari donatur atau *muzakki* diperlukan untuk penyempurnaan program.

c. Tindak lanjut keluhan

Pengelola zakat yang mengabaikan keluhan pertama dan kedua akan terjebak pada pengabaian keluhan ketiga, dengan datangnya keluhan lain dari beberapa pihak, menempatkan organisasi pengelola zakat dalam kondisi kritis. Gagal meraih satu donatur tidak akan menimbulkan rentetan dampak, namun gagal mempertahankan satu donatur dampaknya bisa amat serius.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 disebutkan bahwa LAZ mempunyai bertanggungjawab kepada kepada Kementerian Agama untuk bersedia melakukan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa LAZ wajib bertanggung jawab kepada BAZNAS dalam menyampaikan laporan pelaksanaan

pengelolaan zakat. Dan BAZNAS wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Kemenag secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 57 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwa LAZ bertanggung jawab kepada DPS.

Menurut Hasanah (2016) dan Nisa (2016), LAZ juga bertanggungjawab pendistribusian dana zakat. LAZ harus memastikan bahwa zakat bisa sampai kepada *mustahiq* secara tepat. Aspek yang penting yang perlu dipahami dan diperhatikan terkait dengan kebijakan distribusi zakat yaitu ketepatan dalam menentukan *mustahiq*. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban LAZ terdiri dari pertanggungjawaban kepada: (1) masyarakat, (2) *muzakki*, (3) *mustahiq*, (4) Pemerintah atau Kemenag, (5) BAZNAS, (6) DPS, serta (7) LAZ bertanggungjawab dalam pendistribusian dana zakat sampai kepada *mustahiq* secara tepat.

Independensi (*Independency*)

Independensi berarti LAZ harus mampu menghindari adanya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. LAZ tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus dapat menghindari segala macam bentuk konflik kepentingan. LAZ harus dikelola secara

independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Mahmudi, 2009:72-73).

Lembaga pengelola ZIS bersifat otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan pemerintah, partai politik, donor/lembaga penyandang dana, dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum (PABK, 2011:29). Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan mengenai pelanggaran rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis antara pengelola dengan jajaran pemerintah, perusahaan swasta, pengurus dan anggota partai politik, atau pun organisasi lain yang berafiliasi dengan partai politik.
- b. Program dan aktivitas organisasi bersifat independen dan bebas.

Dari penjabaran di atas disimpulkan bahwa LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri serta dikukuhkan oleh pemerintah, maka LAZ harus bersifat independen. Dengan dikelola secara independen LAZ tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Dengan begitu LAZ akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat atau donatur.

Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*)

LAZ harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil, yaitu adil mendistribusikan dana ZIS kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Keadilan juga menekankan perlunya organisasi pengelola zakat untuk turut menciptakan harmonisasi sosial. LAZ juga harus memberikan kesempatan, hak dan kewajiban yang sama kepada semua karyawan, *mustahiq*, *muzakki*, dan *stakeholder* lainnya sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada LAZ (Mahmudi, 2009:72-73).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 disebutkan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan keadilan, yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil. Sesuai dengan Q.S. At-Taubah (9) ayat 60: Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*” (QS At-Taubah [9]: 60).

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa dana zakat didistribusikan ke delapan kelompok penerima zakat (*ashnaf*), yaitu fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqob*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Karena fakir dan miskin biasanya berada di

lingkungan yang sama, data jumlah dana yang diberikan kepada kedua kelompok tersebut seringkali digabungkan. Sementara itu, dana zakat yang dialokasikan untuk amil relatif sama di setiap lembaga, yakni seperdelapan dari total yang penghimpunan dana zakat (Baznas, 2016:15).

Distribusi zakat harus dilakukan di daerah yang sama di mana zakat dikumpulkan sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta *Tabi'in*. Pengalihan zakat ke daerah lain dalam kondisi masih adanya beberapa *muzakki* di wilayah lokal, maka hal ini adalah dilarang dan bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikecualikan jika ada penerima yang layak di wilayah lain dan wilayah lokal telah terpenuhi (DEKS Bank Indonesia, 2016:118).

Skala prioritas dalam menentukan distribusi dana zakat menurut penelitian yang dilakukan oleh Afriadi & Sanrego (2016), yaitu dengan mempererat kerjasama, sinergi dan koordinasi dengan berbagai lembaga dengan beberapa kaidah prioritas sebagai berikut:

- a. Menentukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil.
- b. Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual.
- c. Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit.
- d. Mendahulukan kepentingan berkesinambungan atas kepentingan yang sementara dan insidental.

- e. Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian yang lemah.
- f. Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat.

Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat dalam standarisasi Amil Zakat di Indonesia (Kemenag RI, 2013:82), sebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran Islam mengenai zakat, pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:

- a. Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.
- b. Distibusikan zakat kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
- c. Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan
- d. Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.
- e. Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.
- f. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga

kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Kepatuhan LAZ dalam melakukan setiap aktivitasnya, mulai dari penghimpunan zakat hingga pendistribusiannya harus diyakinkan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang secara internal melakukan pengawasan dan pembinaan kepatuhan syariah ini. DPS memiliki peran utama mengarahkan, mengawasi dan membimbing terhadap kepatuhan syariah dari pengelolaan zakat di LAZ. Di samping itu, aspek kepatuhan syariah ini semestinya tertuang dalam visi dan misi LAZ, sehingga lembaga ini tidak salah arah, misalkan menjadi lembaga bisnis atau sekadar lembaga filantropi pada umumnya (DEKS Bank Indonesia, 2016:119).

Syariah compliance atau kepatuhan syariah Lembaga Amil Zakat (LAZ) diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.

- b. Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip *yadul amanah*.
- c. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
- d. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta tersebut sampai kepada para *mustahiq*.
- e. Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana poin d, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
- f. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan poin e.
- g. Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka amil dapat memintanya kepada *muzakki* namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah* tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada dalam pola distribusi amil, maka

amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada *muzakki*.

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Sedangkan pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat. Selanjutnya penyaluran zakat yang dimaksud adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para *mustahiq* zakat secara benar.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa tata kelola yang baik (*good governance*) diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja secara profesional dalam rangka memenuhi kepentingan *stakeholder*. Dalam pengelolaan di LAZ penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu:

1. *Transparency*, bermakna bahwa LAZ harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Transparansi dalam informasi meliputi penyajian laporan keuangan kepada publik, keterbukaan informasi tentang program kerja, transparansi dalam perencanaan, pegalokasian dan pendistribusian dana

zakat, infak, dan shodaqoh, serta keterbukaan dalam penganggaran.

2. *Accountability*, bermakna bahwa LAZ harus memegang prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana zakat yang diterimanya. Akuntabilitas LAZ juga dapat diwujudkan dengan mengacu dan mematuhi pada 3 (tiga) pilar: agama (hukum syariah), pemerintah (undang-undang negara), dan pelaporan keuangan (PSAK).
3. *Responsibility*, LAZ bertanggungjawab dalam pendistribusian dana zakat. LAZ harus memastikan bahwa zakat bisa sampai kepada mustahiq secara tepat. Pertanggungjawaban LAZ juga terdiri dari pertanggungjawaban kepada: masyarakat, *muzakki*, *mustahiq*, Pemerintah atau Kemenag, BAZNAS, dan DPS.
4. *Independency*, bermakna bahwa LAZ harus bersifat independen. Jika dikelola secara independen, maka LAZ tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Dengan begitu LAZ akan leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau donatur.
5. *Fairness*, bermakna bahwa LAZ harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil dalam mendistribusikan dana ZIS kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.
6. *Sharia Compliance*, bahwa penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola

oleh LAZ harus mematuhi koridor *syari'ah Islamiyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, F., & Sanrego, U. D. (2016). Mengurai Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznas, Dompot Dhuafa, dan Lazizmu. *Madania*, 20(1): 33-34.
- Anwar, A.H. (2012). Model Tata Kelola Badan dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Kota Malang). *Humanity*, 7(2): 1-13.
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *Zakat dan Wakaf*, 2(1): 12.
- Budiman, A.A. (2012). *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Perliabatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo.
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2008). *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwiridotjahjono, J. (2009). Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik di Indonesia. *Administrasi Bisnis*, 5(2): 101-112.
- Fadillah, S. (2011). Analisis Penerapan Good Governance Dilihat dari Implementasi

- Pengendalian Intern dan "Total Quality Management". *Sosial, Ekonomi, dan Humainora*, 7(1): 34-55.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Ilhami, H. (2009). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. *Mimbar Hukum*, 21(23): 409-628.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1): 2.
- Kristin, A. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU Cabang Semarang). *Unimus*, 7(2): 22.
- Luthfinanda, A., & Sinarasri, A. (2014). Analisis Pengaruh Pengungkapan Syariah Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah. *Maksimum*, 4(1): 25.
- Mahmudi. (2009). Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1): 72.
- Mintarti, N. (2011). *Membangun Kepercayaan Publik dan Kapasitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: IMZ.
- Mufriaini, M.A. (2008). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, R. (2006). Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Akuntansi dan Investasi*, 34-55.
- Nikmatuniayah & Marliyati. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *Mimbar*, 31(2): 485-494.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2): 185-196.
- Paristu, A. I. (2014). Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa). *Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 2(2): 150-168.
- Rahayu, N.W. (2014). Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember. *Karsa*, 22(2): 214-215.
- Robbin, S., et, al. (2012). *Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Widuri, R., & Paramita, A. (2007). Analisis Hubungan Peranan Budaya Perusahaan Terhadap Penerapan Good Coporate Governance pada PT. Aneka Tambang Tbk. *The Winner*, 8(2): 126-138.

STUDI KOMPARASI REGULASI TATA KELOLA SYARIAH BAGI PERBANKAN SYARIAH DI NEGARA-NEGARA MUSLIM MINORITAS

ALI RAMA

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: rama@uinjkt.ac.id

Abstract

The sharia governance system (SG) is needed by sharia financial institutions to increase public trust in compliance with sharia principles in the overall operation of their business. The practice of SG sharia financial institutions in various jurisdictions varies according to the legal framework that governs them. Countries with a majority Muslim population may have a legal framework regarding SG that is different from Muslim minority countries. This study aims to conduct a comparative analysis of SG regulation models for Islamic banks in minority Muslim countries, especially in Southeast Asian countries such as Singapore, the Philippines and Thailand. This research also included Indonesia as a representation of the majority Muslim country. Content analysis methods for a number of legal documents are used to achieve the research objectives. This study found that Muslim minority countries were relatively flexible in their arrangement of SG for Islamic banking. For example, in the structure of sharia supervision organizations, Singapore, the Philippines and Thailand adhere to a decentralized system of sharia supervision, ie there is no fatwa authority at the national level. Generally these countries do not regulate in detail about the aspects of SG and allow each financial institution to regulate it themselves and or refer to international institutions.

Keywords: Corporate Governance, Sharia Councils, Sharia Financial Institutions, Sharia Governance

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga yang menawarkan produk dan layanan sesuai prinsip syariah memiliki sistem tata kelola perusahaan yang unik dan khas dibandingkan dengan konsep tata kelola perusahaan pada umumnya (Grassa, 2013; Rama, 2015; Rusni, et., al. 2013). LKS punya kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemennya (Garas & Pierce, 2010; Dusuki, 2011; Alnasser, 2012; Choudhury & Hoque,

2006). Konsekuensinya, LKS membutuhkan suatu sistem tata kelola untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Istilah *shariah governance* (SG) diperkenalkan dalam sistem tata kelola LKS sebagai respon ketiadaan istilah *corporate governance* dalam literatur Islam (Duduki, 2011). Konsep SG memiliki kesamaan dengan konsep *hisbah* dalam sejarah masyarakat Islam klasik, yaitu sebagai lembaga khusus yang mengawasi berjalannya pasar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Bhatti & Bhatti 2009).

Sistem SG menurut IFSB-10 merupakan seperangkat pengaturan kelembagaan dan

organisasi yang bertujuan untuk mengawasi aspek kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS). Seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi merujuk kepada adanya dewan syariah dan unit terkait lainnya seperti departemen audit internal dan divisi syariah yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan prinsip syariah pada LKS. Umumnya dewan syariah telah terbentuk di masing-masing LKS dan juga sebagian dibentuk departemen atau unit review dan audit internal syariah untuk membantu melaksanakan fungsi dewan syariah (Hasan, 2010). Elemen penting dalam sistem SG adalah keberadaan Dewan Syariah (DPS) (Garas & Pierce, 2010; Garas, 2012; Grais & Pellegrini, 2006; Hasan, 2006; Wardhany & Arshad, 2012) sebagai bagian dari struktur organisasi perusahaan yang berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah (Dusuki, 2011). Studi telah mengklasifikasikan fungsi utama dewan syariah (Grais & Pellegrini, 2006, 2006; Hasan, 2006). Namun Wardhany & Arshad (2012) dan Garas & Pierce (2010) mengklasifikasi perannya pada level makro dan level mikro. Pada level makro terdapat dewan syariah yang berkedudukan pada bank sentral yang fungsi utamanya melakukan harmonisasi dan standarisasi fatwa atau hukum

Islam serta bertindak sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan syariah. Sementara dewan syariah pada level mikro adalah dewan pengawas syariah pada tingkat internal perusahaan yang umumnya bertanggungjawab dalam melakukan proses audit pelaksanaan syariah sebelum (*ex-ante*) dan sesudah (*ex-post*) transaksi. Dalam menjalankan fungsinya dewan syariah pada level perusahaan dibantu oleh fungsi-fungsi lain yang ada dalam LKS (Azrin et., al., 2009; Grais & Pellegrini, 2006; Yahya & Mahzan, 2012).

Masing-masing negara mengembangkan model SG berdasarkan pada kondisi dan kebutuhan industrinya masing-masing. Akibatnya, praktek SG beda (Grais & Pellegrini, 2006; Grassa, 2013; Hasan, 2010; Rama, 2015; Rusni et., al., 2013; Wardhany & Arshad, 2012) bagi LKS di masing-masing negara berbeda-beda disebabkan kerangka regulasinya yang berbeda. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi pada hari ini adalah bagaimana mengembangkan kerangka SG yang komprehensif dan lebih efisien.

Penelitian bermaksud untuk melakukan studi komparasi regulasi tata kelola syariah (*shariah governance*) bagi perbankan syariah di negara-negara Muslim minoritas khususnya di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Filipina dan Thailand. Untuk melengkapi studi komparasi, penelitian ini juga memasukkan Indonesia sebagai objek komparasi sebagai representasi

negara Muslim mayoritas.

PEMBAHASAN

Analisis Komparasi Model *Syariah Governance* di Asia Tenggara

Struktur Organisasi Pengawasan Syariah

Bagian ini melakukan analisis perbandingan atas model organisasi pengawasan syariah berdasarkan pada kerangka regulasi di masing-masing yurisdiksi. Model organisasi dimaksud adalah apakah bersifat sentralisasi yang ditandai dengan adanya dewan fatwa nasional yang bertindak sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan syariah, atau sebaliknya bersifat desentralisasi dimana hanya terdapat dewan syariah pada level industri secara independen.

Indonesia

Struktur organisasi pengawasan syariah di Indonesia mengakui adanya dua level pengawasan syariah. Level pengawasan pertama adalah dewan syariah pada level nasional yang biasa disebut sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN), dan kedua adalah dewan syariah pada level perusahaan yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua lembaga tersebut disebutkan secara jelas dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan PBI No.6/24/PBI/2004.

DSN adalah lembaga non pemerintah yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfungsi untuk mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat) dalam bentuk fatwa untuk

dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di LKS (DSN-MUI, 2014). Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN selanjutnya dijadikan rujukan bagi pihak regulator (BI/OJK) dalam menerbitkan peraturan terkait dengan produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, fatwa DSN bersifat mengikat bagi para pelaku industri.

Pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada level perusahaan. DSN sebagaimana dijelaskan oleh PBI No.11/33/PBI/2009 adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan syariah. Proses pengangkatan DPS melalui proses pengajuan oleh bank kepada Bank Indonesia atas calon DPS yang telah mendapatkan rekomendasi DSN-MUI (SEBI No.12/13/DPbs/2010). Bank Indonesia berwenang untuk menerima dan menolak atas calon anggota DPS yang diajukan.

Dengan demikian, DPS merupakan lembaga unik dalam sistem SGdi Indonesia yang merupakan perpanjangan tangan DSN berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia. DSN berperan dalam menjembatani hubungan antara Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Dalam artian, DSN memperantarai fatwa DSN ke dalam peraturan Bank Indonesia. Pengawasan DSN meliputi dua hal, yaitu (i) pengawasan terhadap

proses pengembangan produk baru bank; dan (ii) pengawasan terhadap kegiatan bank. Hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format yang telah ditentukan oleh BI.

Keputusan yang dikeluarkan oleh DPS terkait dengan pelaksanaan prinsip syariah pada bank bersifat mengikat (*binding*). Hal demikian dikarenakan DPS adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan pada PBI. Hubungan antara DPS dengan direksi dalam struktur organisasi perusahaan adalah hubungan koordinasi, yaitu DPS dapat memberikan nasehat dan saran kepada direksi terkait pelaksanaan prinsip syariah pada bank.

Singapura

Pengawasan lembaga keuangan di Singapura baik syariah maupun konvensional dilakukan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS). Meskipun demikian, MAS tidak memiliki tugas untuk memastikan produk, jasa, atau manajemen LKS sesuai dengan prinsip syariah. MAS juga tidak mengeluarkan standar aturan tentang hukum Islam tentang keuangan syariah yang menjadi pedoman bagi seluruh pelaku keuangan syariah di Singapura (*Guidelines on the Application of Banking Regulation to Islamic Banking 2010, sect. 2.7*).

MAS memberikan kebebasan kepada setiap bank yang memberikan layanan keuangan syariah untuk mengatur operasionalnya sendiri dan

memastikan sesuai dengan prinsip syariah. Guideline menyebutkan bahwa LKS menghadapi suatu bentuk risiko yang tidak dihadapi oleh lembaga keuangan konvensional yaitu *shariah compliance risk*. Untuk mengelola risiko tersebut, LKS diminta untuk membentuk dewan pengawas syariah sebagai bagian dari mitigasi risiko tersebut. Dengan demikian, keberadaan Dewan Syariah atau Shariah Board adalah merupakan bentuk khusus yang hanya berlaku bagi LKS di Singapura.

Dapat disimpulkan bahwa praktek struktur SG yang diterapkan di Singapura tidak memiliki sentralisasi pengawas syariah yang berfungsi untuk menyatukan standar SG bagi seluruh LKS. Namun demikian, setiap LKS diberikan kebebasan untuk membentuk semacam internal lembaga pengawas syariah pada tingkat perusahaan untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.

Filipina

Dalam Republic Act No. 6848 Tahun 1990 menyebutkan bahwa setiap bank syariah dapat membentuk Shariah Advisory Council (SAC) yang berfungsi untuk memberikan nasehat dan melakukan review atas pelaksanaan prinsip dan aturan syariah dalam setiap transaksi bank syariah. Anggota SAC diajukan oleh direksi dan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, SAC adalah bagian dari struktur internal perusahaan yang

dibentuk secara khusus untuk mengawasi pelaksanaan prinsip syariah pada bank syariah.

Struktur SG di Filipinan tidak memiliki lembaga otoritas tertinggi pada level nasional yang berfungsi untuk mengeluarkan fatwa atau hukum syariah dalam bidang keuangan syariah. Pengawasan syariah hanya terjadi pada level perusahaan yang dilakukan oleh SAC.

Thailand

Struktur pengawasan syariah pada LKS yang diterapkan di Thailand terpusat pada internal LKS melalui Shariah Supervisory Board (SSB). Lembaga pengawas syariah ini memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan nasehat dan rekomendasi kepada direksi terkait dengan prinsip syariah dalam operasional bank (Islamic Bank of Thailand Act 2002).

Sentralisasi pengawasan keseluruhan industri keuangan syariah melalui otoritas dewan syariah tertinggi pada level nasional tidak ditemukan dalam sistem keuangan syariah di Thailand. Pengawasan terkait dengan kegiatan perbankan secara umum termasuk di dalamnya bank syariah di Thailand diatur dan diawasi oleh Bank Sentral Thailand.

Dengan demikian, struktur *shariah governance* perbankan syariah di Thailand terpusat pada Shariah Supervisory Body (SBB) pada internal perbankan syariah.

Tabel 1. Struktur Organisasi Pengawasan Syariah

Negara	Dewan Pengawas Syariah		Struktur Pengawasan Syariah
	Level Perusahaan	Level Nasional	
Indonesia	Shariah Supervisory Board (DPS)	National Shariah Council (DSN)	Sentralisasi
Singapura	Shariah Board (SB)	Tidak ada	Independen
Filipina	Shariah Advisory Council (SAC)	Tidak ada	Independen
Thailand	Shariah Supervisory Board (SSB)	Tidak ada	Independen

Berdasarkan pada analisis struktur organisasi pengawasan syariah sebagaimana ditampilkan tabel 1 ditemukan bahwa negara-negara berpenduduk Muslim minoritas seperti Singapura, Filipina dan Thailand menganut sistem pengawasan syariah terpusat pada internal perusahaan. Struktur pengawasan syariah hanya terdapat pada level perusahaan. Masing-masing negara tersebut tidak memiliki dewan syariah pada level nasional sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan syariah. Sementara di Indonesia sebagai negara Muslim mayoritas memiliki dewan syariah pada level industri tetapi juga terdapat dewan syariah pada level nasional yang berfungsi untuk mengeluarkan fatwa tentang produk keuangan syariah. Otoritas fatwa tertinggi tersebut di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Proses *Shariah Governance*

Proses SG dalam penelitian ini mencakup (i) pengangkatan dan pemberhentian; (ii) komposisi;

(iii) persyaratan; dan (iv) batasan rangkap jabatan bagi anggota dewan syariah (Rusni et al. 2013; Hasan, 2010; Rama, 2014).

Indonesia

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian DPS pada bank syariah diatur melalui PBI No.11/3/PBI/2009 dan SEBI No. 12/13/DPbS/2010. Langkah pertama adalah bank syariah wajib mengajukan proposal pengajuan calon anggota DPS yang disertai dengan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia setelah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Bank Indonesia kemudian melakukan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diterima berdasarkan pada pemeriksaan kelengkapan dokumen dan wawancara yang dilakukan. Dengan demikian, Bank Indonesia dan DSN bertanggungjawab dalam memastikan calon anggota DSN yang ditunjuk sudah memenuhi persyaratan peraturan yang ada. Hal yang menarik dari ketentuan prosedur ini adalah bahwa DPS tidak ditunjuk semata oleh masing-masing bank tetapi berdasarkan pada hasil fit and proper tes yang dilakukan oleh BI dan DSN. Ini mengindikasikan bahwa DPS sebagai lembaga pengawas syariah pada level perusahaan bersifat independen dari proses pengangkatannya. Di sisi lain, pemberhentian anggota DPS dapat terjadi jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik seperti tidak melakukan penasehatan,

penilaian, pengawasan dan review terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada bank (Rama, 2015).

Jumlah anggota DPS berdasarkan PBI No. 11/3/PBI/2009 dalam struktur organisasi suatu bank tidak kurang dua orang atau paling banyak 50 persen dari jumlah anggota direksi. Satu orang dari anggota DPS bertindak sebagai ketua. Ketentuan bagi anggota DPS adalah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS tidak lebih dari empat (4) LKS, yaitu dua (2) bank lain dan dua (2) LKS non bank (PBI No. 6/24/PBI/2004). DPS juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan atau UUS (SEBI No. 12/13/DPbS/2010). Tambahan, sebanyak-banyaknya dua (2) anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN.

Perangkapan jabatan sebagai anggota DPS sampai empat LKS lainnya dapat memunculkan masalah keputusan yang dikeluarkan. Begitu pula dengan keanggotaan ganda sebagai anggota DPS dan di saat bersamaan sebagai anggota DSN. Keanggotaan ganda tersebut dapat berimplikasi pada masalah independensi. Mengingat bahwa DPS harus secara periodik melakukan laporan hasil pengawasan kepada DSN terkait dengan pelaksanaan prinsip syariah pada suatu bank (Rama, 2015).

Sementara segi persyaratan, anggota DPS adalah harus memiliki (i) integritas berupa

akhlak yang baik, komitmen terhadap perundang-undangan dan pengembangan bank syariah; (ii) kompetensi berupa pengetahuan dan pengalaman di bidang muamalah dan di bidang perbankan dan keuangan secara umum; dan (iii) reputasi keuangan yang baik. Namun demikian, PBI tersebut tidak mensyaratkan perlunya keanggotaan DPS berasal dari latar belakang yang berbeda terutama dari segi kualifikasi, pengalaman dan pengetahuan. Keragaman latar belakang tersebut akan membantu anggota DPS dalam melakukan pengawasan syariah.

Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga otoritas tertinggi yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait dengan transaksi keuangan syariah dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN melalui Rapat Pleno DSN-MUI.

Singapura

Monetary Authority of Singapore (MAS) tidak menerbitkan aturan yang mengatur tentang pelaksanaan SG khususnya terkait dengan pengawasan aspek syariah oleh lembaga khusus baik pada level nasional maupun internal perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa LKS memiliki independensi untuk mengatur

tata kelola mereka sendiri khususnya terkait urusan internal perusahaan. Ketiadaan hukum atau peraturan memungkinkan setiap perusahaan untuk mengikuti standar tata kelola LKS yang dikeluarkan oleh lembaga internasional seperti IFSB dan AAOIFI. Apalagi, Singapura tercatat sebagai anggota dari kedua lembaga internasional tersebut.

Tata kelola tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian, komposisi, kompetensi dan fungsi dewan pengawas syariah pada setiap LKS dapat merujuk pada standar yang telah dikeluarkan oleh salah satu dari kedua lembaga internasional tersebut. Meskipun begitu, masing-masing perusahaan memiliki keleluasaan untuk mengikuti dan menentukan kebijakan masing-masing.

Umumnya, pengangkatan dewan pengawas syariah pada internal perusahaan diajukan dan diangkat oleh masing-masing direksi melalui rapat umum pemegang saham. Standar prosedur ini berlaku secara umum pada LKS secara global termasuk di Singapura.

Filipina

Struktur praktek SG di Filipina hanya menganut sistem pengawasan syariah melalui internal LKS yang disebut sebagai Shariah Advisory Council (SAC). Menurut Republic Act No.6848 Tahun 1990, prosedur pengangkatan anggota SAC melalui proses nominasi oleh direksi yang kemudian dibawa dan disetujui

pada Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi memiliki kewenangan untuk menyeleksi dan menentukan jumlah remunerasi bagi anggota SAC.

Komposisi anggota SAC pada masing-masing lembaga keuangan khususnya bank syariah tidak lebih dari lima (5) anggota yang dipilih di antara pemuka agama dan ahli hukum Islam. Dengan demikian, kompetensi yang harus dimiliki oleh anggota SAC adalah menimimal memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang hukum Islam. Adapun masalah rangkap jabatan SAC pada berbagai LKS tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

Thailand

Sistem pengawasan syariah pada LKS di Thailand diatur melalui Islamic Bank of Thailand Act Tahun 2002. Pengawasan syariah pada internal perusahaan dilakukan oleh Shariah Supervisory Board (SSB). Prosedur pengangkatan anggota SSB melalui mekanisme nominasi oleh direksi yang selanjutnya diajukan dan disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Komposisi anggota SSB tidak lebih dari empat (4) anggota. Masa jabatan anggota SSB selama dua (2) tahun dan dapat diperpanjang atau diangkat kembali berdasarkan pada persetujuan Direksi. Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh anggota SSB adalah memiliki integritas keuangan, kompetensi dalam bidang hukum Islam, perbankan dan

keuangan, kejujuran dan tidak ada konflik kepentingan. Dalam hal pembatasan rangkap jabatan anggota SSB tidak diatur dalam undang-undang bank syariah tersebut.

Tabel 2. Prosedur Proses Shariah Governance

Negara ASEAN	Pengangkatan dan Pemberhentian	Komposisi	Fit dan Proper Test	Batasan Rangkap Jabatan	Pendekatan
Indonesia	✓	✓	✓	✓	Moderat
Singapura	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur	Fleksibel
Filipina	✓	✓	✓	✓	Fleksibel
Thailand	✓	✓	✓	✓	Fleksibel

Aspek proses dari SG yang meliputi prosedur pengangkatan dan pemberhentian, komposisi, kompetensi dan batasan rangkap jabatan bagi dewan syariah relatif diatur di masing-masing yurisdiksi kecuali Singapura. Singapura sebagai negara yang memiliki sistem keuangan terbaik di negara-negara di dunia memberikan kebebasan bagi LKS untuk menentukan proses pengawasan masing-masing. LKS dapat merujuk kepada standar internasional yang telah dikeluarkan oleh organisasi internasional di bidang keuangan syariah seperti IFSB dan AAOIFI.

Berdasarkan pada analisis pendekatan dalam proses *shariah governance* dapat disimpulkan bahwa Indonesia relatif moderat. Pendekatan yang relatif fleksibel dapat ditemui di negara Singapura, Filipina, dan Thailand. Dengan demikian, negara-negara Muslim minoritas cenderung lebih fleksibel dalam menerapkan proses *shariah governance* di lembaga keuangan syariah mereka.

Peran Dewan Syariah

Bagian ini menganalisis komparasi fungsi dewan syariah di masing-masing yurisdiksi berdasarkan pada kerangka regulasinya. Selain itu, bagian ini juga melihat adanya struktur organisasi tambahan berupa departemen atau unit internal yang membantu melaksanakan fungsi dewan syariah berupa departemen/unit internal review dan audit syariah.

Indonesia

Secara umum tugas dari Dewan pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank adalah untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (UU No.21/2008). Selanjutnya, tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain: (i) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; (ii) mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI; (iii) meminta fatwa kepada DSN-MUI; (iv) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya; dan (v) melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan (vi) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya (PBI No. 11/

33/PBI/2009). Hasil pengawasan atas kepatuhan syariah disampaikan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah secara semesteran (Rama, 2015).

Dalam melakukan review secara berkala, DPS dapat dibantu oleh fungsi audit internal. Salah satu tugas fungsi Audit internal adalah melakukan pelaporan hasil audit internal terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah yang selanjutnya disampaikan kepada DPS. Proses audit internal syariah dilakukan oleh fungsi audit internal. Fungsi ini terintegrasi dengan fungsi audit internal bank syariah.

Singapura

MAS memberikan keleluasaan pada masing-masing LKS untuk membentuk dewan pengawas syariah pada internal perusahaan. Dewan pengawas syariah merupakan struktur unik dalam sistem tata kelola LKS yang berfungsi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada LKS (Rusni et., al. 2013).

Meskipun tidak diatur melalui undang-undang atau peraturan, tugas dan tanggung jawab internal dewan pengawas syariah umumnya sama di semua LKS secara global termasuk di Singapura. IFSB misalnya menjelaskan tentang fungsi dewan pengawas syariah diantaranya (i) memberikan nasehat kepada direksi terkait urusan syariah; (ii) melakukan review dan mengesahkan kebijakan dan *guidelines*

yang terkait dengan syariah; (iii) mengesahkan dan memvalidasi dokumen-dokumen tentang produk yang baru; (iv) mengawasi proses penghitungan dan distribusi zakat; (v) membantu dan memberikan saran kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan input terkait urusan syariah; (vi) melakukan laporan opini secara tertulis terkait dengan persoalan syariah; dan (vii) merujuk fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah tertinggi dalam menyelesaikan masalah syariah yang muncul (Rama, 2014).

Filipina

Republic Act No.6848 Tahun 1990 sebagai undang-undang yang mengatur tentang perizinan bank syariah atau Al-Amanah Islamic Investent Bank of the Philippines menyebutkan fungsi Shariah Advisory Council (SAC) adalah untuk memberikan nasehat bagi direksi terkait dengan masalah syariah pada LKS. SAC juga bertugas untuk melakukan review terhadap pelaksanaan prinsip dan aturan syariah pada transaksi bank syariah. Meskipun bertugas untuk melakukan review atas pelaksanaan prinsip syariah, SAC tidak boleh terlibat secara langsung pada operasional bank (*sect. 5*).

SAC sebagai struktur penting dalam kerangka SG berperan penting dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah LKS. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci tentang peran dan tanggung jawab SAC dalam undang-undang perbankan syariah di Filipina tetapi SAC

umumnya memiliki fungsi yang sama sebagaimana pada LKS secara global.

Thailand

Struktur SG yang dipraktekkan berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku di Thailand adalah pengawasan syariah yang terpusat pada internal perusahaan oleh Shariah Supervisory Board (SSB). Tugas dan tanggung jawab SSB sebagaimana tercantum dalam Islamic Bank of Thailand Act Tahun 2002 adalah untuk memberikan nasehat dan rekomendasi kepada Direksi tentang prinsip syariah pada operasional bank syariah.

SSB tentunya akan melakukan proses review atas semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah. SSB juga akan melakukan pengawasan atas penghitungan dan distribusi zakat bank syariah.

Tabel 3. Peran Dewan Syariah dan Unit Syariah

Negara ASEAN	Fungsi Dewan Pengawas Syariah	Independen Unit Internal Syariah Review	Terintegrasi Unit Internal Syariah Review
Indonesia	✓	-	✓
Singapura	✓	-	✓
Filipina	✓	-	✓
Thailand	✓	-	✓

Secara umum peran dan fungsi dewan syariah di Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand disebutkan melalui undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang LKS di masing-masing negara tersebut. Dewan pengawas syariah pada level perusahaan

berfungsi untuk melakukan validasi sebelum transaksi dilakukan (*ex-ante*) dan setelah transaksi dilakukan (*ex-post*) terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah atau fatwa yang telah dikeluarkan oleh otoritas fatwa tertinggi (IFSB-10).

Dalam menjalankan fungsi pengawasan aspek syariah oleh dewan syariah pada level perusahaan dapat dibentuk internal syariah unit. Unit ini membantu dewan pengawas syariah dalam melakukan proses audit kepatuhan syariah setiap saat di internal LKS. Model struktur internal syariah review unit menurut Grais & Pellegrini (2006) di masing-masing lembaga keuangan setidaknya dua model, yaitu terintegrasi dengan unit internal review yang sudah ada dan terpisah dan independen dalam bentuk unit tersendiri berupa unit/departemen syariah review sendiri. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand menganut pendekatan yang pertama, yaitu terintegrasi dengan unit syariah review yang sudah ada.

KESIMPULAN

Studi dokumen hukum tentang kerangka regulasi *shariah governance* bagi perbankan syariah di negara-negara Muslim minoritas seperti Singapura, Filipina dan Thailand dan negara Muslim mayoritas dalam hal ini Indonesia ditemukan beberapa kesamaan dan perbedaan khususnya pada aspek-aspek SG yang meliputi struktur organisasi, proses dan

fungsi dewan pengawas syariah. Perbedaan praktek disebabkan oleh perbedaan hukum legal yang mengatur di masing-masing yurisdiksi.

Aspek struktur SG, terdapat dua model pengawasan syariah, yaitu sentralisasi dan non-sentralisasi. Pendekatan sentralisasi mengacu pada negara yang memiliki otoritas pengawas syariah tertinggi pada level nasional yang umumnya di bawah bank sentral. Model ini diadopsi oleh negara Muslim mayoritas seperti Indonesia. Sementara pendekatan non-sentralisasi mengacu kepada negara yang hanya mensyaratkan adanya dewan pengawas syariah pada level perusahaan. Pendekatan ini umumnya diterapkan di negara Muslim minoritas seperti Singapura, Filipina dan Thailand. Selanjutnya, pada aspek proses, Indonesia ditemukan menganut pendekatan yang moderat. Sebaliknya, Singapura, Filipina dan Thailand termasuk negara yang menganut fleksibel. Bahkan Singapura memberikan keleluasaan bagi LKS untuk mengatur sendiri perihal pengawasan aspek syariahnya.

Pada aspek fungsi pengawas syariah ditemukan hal yang menarik. Masing-masing negara mensyaratkan terbentuknya dewan pengawas syariah pada internal perusahaan. Namun tidak semua undang-undang atau peraturan tersebut memberikan penjelasan yang rinci tentang tugas dan tanggungjawabnya. Selanjutnya, keberadaan unit syariah review di Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand

relatif sama, yaitu terintegrasi dengan unit/departemen review yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Besar, M. H. A., Sukor, M. E. A., Muthalib, N. A., & Gunawa, A. Y. (2009). The Practice of Shariah Review As Undertaken by Islamic Banking Sector in Malaysia. *International Review of Business Research Papers*, 5(1): 294-306.
- Bhatti, M, & Bhatti, I. (2009). Development in Legal Issues of Corporate Governance in Islamic Finance. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 25(1): 67-91.
- Choudhury, M.A., & Hoque, M.Z. (2006). Corporate Governance in Islamic Perspective. *Corporate Governance*, 6(2): 116-28.
- Dusuki, A.W. (2011). *Islamic Financial System: Principles & Operations*. Kuala Lumpur: Isra.
- DSN-MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI Pusat*. Jakarta: Erlangga.
- Garas, S. N. (2012). The Control of the Shari'a Supervisory Board in the Islamic Financial Institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5: 8-24.
- Garas, S. N, & Pierce, C. (2010). Shariah Supervision of Islamic Financial Institutions. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 18(4): 386-407.
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services. *World Bank Policy Research Working Paper*. October.
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance in Institutions Offering Islamic Financial Services Issues and Options. *World Bank Policy Research Working Paper*, October: 1-46.
- Grassa, R. (2013). Shariah Supervisory System in Islamic Financial Institutions: New Issues and Challenges: A Comparative Analysis between Southeast Asia Models and GCC Models. *Humanomics*, 29(4): 333-48.
- Harun, S., & Ku, M.Y. (2005). Islamic Banking in Thailand: Prospect and Challenges. *International Journal of Islamic Financial Services*, 5(2).
- Hassan, R., Abdullah, N.I., Hassan, A., Triyanta, D.A., Ibrahim, U., Md, M.F., & Abd, A. (2013). *A Comparative Analysis of Shari'ah Governance in Islamic Banking Institutions Across Jurisdictions*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).
- Hasan, Z. (2006). The Role and Responsibilities of The Shariah Committee of The Islamic Financial Institution in Malaysia. *Jurnal Syariah*.
- Hasan, Z. (2010). Regulatory Framework of Shariah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3-2: 82-115.

- Mohamed, A. (1998). Islamic Banking, Asian-Pacific Econ. *Literature*, 2(2).
- Mohammad, et., al. (2013). The Historical Development of Modern Islamic Banking: A Study in South-East Asia Counties. *African Journal of Business Mangement*, 10(20).
- Muhammed, S.A.S.A, & Muhammed, J. (2012). Introduction to Corporate Governance from Islamic Perspective. *Humanomics*, 28(3): 220-231.
- Pramanik, A. H. (2007). *Stock Image Political Economy of Development - A Comparative Study of Regime Performance*. Pakistan: Cengage Learning Asia.
- Rama, A. (2014). *Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN*. Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rama, A. (2015). Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara. *Journal of Tauhidinomics*, 1(1): 1-25.
- Rama, A. (2015). Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 1(1): 1-18.
- Rama, A. (2015). Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1): 87-120.
- Rama, A. (2015). *Profiling Islamic Economy and Its Potential*. Jakarta: Jakartapost.
- Rama, A. (2015). *Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rama, A., & Kassim, S.H. (2013). Analyzing Determinants of Assets and Liabilities in Islamic Banks: Evidence from Indonesia. *Review of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1): 34-53.
- Rama, A, & Novela, Y. (2015). Syariah Governance dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah. *Signifikan*, 4(2): 111-26.
- Wardhany, N., & Arshad, S. (2012). The Role of Shariah Board in Islamic Banks: A Case Study of Malaysia, Indonesia, and Brunei Darussalam. In *2nd Isra Colloquium*.
- Yahya, Y., & Mahzan, N.M. (2012). The Role of Internal Auditing in Ensuring Governance in Islamic Financial Institution (IFI). *3rd International Conference on Business and Economic 1634 Research*, 1634-61.

PEREKONOMIAN RUMAH TANGGA MUSLIM TERHADAP AKTIVITAS NERACA KEUANGAN RUMAH TANGGA

ALMIZAN

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: almizan554@gmail.com

TONY ISWADI

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: tony_iswadi@yahoo.com

Abstract

The research themes are: financial balance. The purpose of the paper is to explain the balance sheet of Muslim households. This research is a research library research. Data analysis techniques are carried out by descriptive analysis. The balance between income and expenditure in Muslim households is the basis for the household economy, so as to avoid problems that occur in the future. Preparation of the balance sheet of the household budget is data that contains certain boundaries and estimates in terms of income, expenditure and development of funds so that it can estimate funds and be able to overcome the problem of lack of funds.

Keywords: Balance Sheet, Households, Income and Expenditures

PENDAHULUAN

Menjadi suatu keharusan bagi setiap muslim untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar perekonomian dalam Islam agar dia dapat tetap menempuh jalan lurus yang didasarkan pada hidayah Allah Swt. Ketentuan perekonomian Islam yang dibicarakan mencakup masalah persoalan pengaturan tentang pendapatan, pengeluaran, penyimpanan, penabungan dan pemilikan.

Ekonomi Islam memiliki misi yaitu demi terwujudnya persamaan martabat di antara umat manusia sehingga perlu ditegakkan keadilan terutama dalam distribusi pendapatan. Sementara secara makro, misi ini mengarah

kepada terwujudnya negeri yang baik, adil dan makmur (sejahtera), serta diridhai Allah SWT. wujud keadilan dalam ekonomi terkait dengan empat hal, yaitu keadilan tukar-menukar, distributif, soaial dan hukum (Idri & Tutik, 2008).

Pendapatan rumah tangga biasanya berbeda-beda yang didapatkan oleh seseorang, hal ini disebabkan oleh profesi atau pekerjaan yang berbeda juga, tergantung kepada pekerjaan kepala rumah tangga. Adanya keseimbangan antara pendapatan atau pemasukan dan pengeluaran dalam sebuah rumah tangga muslim merupakan dasar bagi perekonomian rumah tangga tersebut. Keseimbangan ini dapat

terlihat pada daftar neraca keuangan yang berisi jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran. supaya terhindar dari masalah yang terjadi pada masa mendatang. Realitas pada masa ini telah membuktikan bahwa di antara penyebab timbulnya pertikaian suami dengan istri salah satunya adalah pemaksaan atau kurang terkoordinir antara pemasukan dan pengeluaran keuangan yang ada dalam rumah tangga.

Daftar neraca pada hakikatnya merupakan rencana yang dijadikan patokan bagi seorang ibu rumah tangga dalam masalah pemasukan dan pengeluaran. Daftar tersebut sangat berperan ketika dalam keluarga terjadi persoalan perselisihan dalam keuangan rumah tangga, sekaligus dapat dijadikan sarana dalam merancang masa depan. Penyusunan neraca anggaran rumah tangga merupakan data yang berisi batas-batas dan perkiraan tertentu dalam hal pemasukan, pengeluaran dan pengembangan dana sehingga dapat memperkirakan kekuatan dana dan segera dapat menanggulangi masalah dana.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Rumah Tangga Muslim

Pada hakikatnya, sebuah rumah tangga muslim merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat. Jika fondasi suatu bangunan kuat maka bangunan yang berdiri di atasnya akan kuat pula. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan sebuah rumah tangga muslim dan mengharapkan hukum-hukumnya yang

berlaku agar rumah tangga itu menjadi sebuah fondasi yang kuat bagi terwujudnya suatu masyarakat.

Menurut (Ihromi, 1990), bekerja adalah kegiatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang, barang dan jasa, mengeluarkan energi dan mempunyai nilai waktu. Ekonomi adalah istilah untuk suatu sebutan yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan dalam memperbanyak jumlah kekayaan dan pengadaanya, ataupun yang berhubungan dengan mekanisme pendistribusiannya.

Rumah tangga muslim adalah sekelompok individu yang terdiri atas orang tua dan anak-anak yang hidup bersama dalam suasana Islami dan diikat oleh norma-norma keluarga muslim yang selalu mendasarkan berbagai perkara hidupnya pada syaria`at. Tujuan rumah tangga muslim adalah menciptakan kehidupan yang penuh rasa aman, tenteram, kasih sayang dan rahmat, dengan mengharapkan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Ekonomi rumah tangga muslim adalah kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan dan pendistribusian, yang dilakukan oleh sekelompok individu yang terdiri atas orang

tua dan anak-anak yang diikat oleh norma-norma dengan mengharapkan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Dasar-Dasar Neraca Keuangan Rumah Tangga

Adanya keseimbangan antara pendapatan atau pemasukan dan pengeluaran dalam sebuah rumah tangga muslim merupakan dasar bagi perekonomian rumah tangga tersebut. Keseimbangan ini dapat terlihat pada daftar neraca keuangan yang berisi jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran.

Daftar neraca pada hakikatnya merupakan rencana yang dijadikan patokan bagi seorang ibu rumah tangga dalam masalah pemasukan dan pengeluaran. Daftar tersebut sangat berperan ketika dalam keluarga terjadi persoalan perselisihan dalam keuangan rumah tangga, sekaligus dapat dijadikan sarana dalam merancang masa depan.

Penyusunan neraca anggaran rumah tangga merupakan data yang berisi batas-batas dan perkiraan tertentu dalam hal pemasukan, pengeluaran dan pengembangan dana sehingga dapat memperkirakan kekuatan dana dan segera dapat menanggulangi masalah dana. Berbicara masalah neraca keuangan rumah tangga muslim, ada beberapa dasar-dasar prinsip pokok neraca keuangan rumah tangga (Syahatah, 1998) yaitu:

Neraca Keuangan dalam Rumah Tangga Muslim

Ibu rumah tangga harus mengatur dan menyusun dua buah sistem neraca, yaitu neraca perkiraan dan neraca pelaksanaan. Dengan adanya rencana perkiraan, seorang ibu dapat memperkirakan pemasukan dan pengeluaran secara seimbang yang dibuat pada awal bulan, dan dengan neraca pelaksanaan, dia dapat menghitung dana pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan hingga akhir bulan. Melalui neraca keuangan seperti itu terlihat dampak yang dirasakan beberapa manfaat bagi sebuah rumah tangga, diantaranya adalah:

1. Membantu para ibu rumah tangga dalam memperkirakan pemasukan dan pengeluaran pada masa tertentu sehingga nantinya dapat segera mengetahui atau memperkirakan dana lebih atau dana kurang.
2. pemecahan dalam menghadapi kesulitan yang terjadi pada neraca sesegera mungkin.
3. Neraca keuangan membantu ibu rumah tangga dalam mengkaji jalan atau langkah pemecahan perputaran atau pengembangan dana lebih yang ada pada neraca tersebut.
4. Neraca keuangan membantu terjadinya musyawarah diantara anggota keluarga untuk hal yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran serta peranan mereka dalam mengarahkan pengeluaran dan menambahkan pendapatan sehingga terwujud kerjasama di antara mereka.

5. Neraca keuangan membantu sebuah rumah tangga muslim dalam penghitungan jumlah pemasukan dan pengeluaran setiap anggota rumah tangga. Dengan neraca itu pula dapat diketahui anggota rumah tangga yang boros, kikir atau yang sederhana dan wajar.
6. Aplikasi teori neraca keuangan ini akan menjadi sumbangan bagi rumah tangga muslim untuk melatih anak-anaknya mengadministrasikan urusan rumah tangganya secara moneter dan ekonomis, sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan dibawah bimbingan kedua orang tua.

Rumah tangga yang bisa menerapkan teori neraca itu akan mampu merencanakan perekonomian rumah tangganya dalam keseimbangan yang sehat antara pendapatan dan pengeluaran keuangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah deskriptif kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Metode pendekatan adalah *library research*, yaitu dengan mengkaji kejadian, teori-teori yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis literatur, yaitu menggambarkan konsep dan teori yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya yang

timbul.

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya. Teknik Analisis data dilakukan secara analisa diskriptif fenomena berupa sajian dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai seperti apa permasalahan.

PEMBAHASAN

Neraca Perkiraan Rumah Tangga Muslim

Berdasarkan konsep dan aturan-aturan yang berhubungan dengan persiapan penyusunan neraca rumah tangga muslim, sebagai aplikasinya akan dikemukakan sebuah contoh sederhana yang dapat dijadikan pegangan bagi ibu rumah tangga dalam menyusun neraca rumah tangganya. Ibu rumah tangga bisa melihat bahwa contoh neraca tidak terlalu menggunakan istilah-istilah yang sulit dan neraca ini mudah dipahami. Tujuan agar setiap ibu rumah tangga dapat mempraktekkannya tanpa harus mengetahui teori keuangan atau perekonomian.

Apabila aktivitas rumah tangga tersebut dijadikan dalam bentuk format neraca keuangan, maka terdiri atas tiga bagian, yaitu:

- a. Bagian pertama, berisi sumber-sumber pendapatan yang bersifat berkala dan kontinu, misalnya pendapatan perminggu, perbulan,

- pertiga bulan atau persemester.
- b. Bagian kedua, berisi pos-pos pengeluaran yang diurutkan berdasarkan jenis-jenis kebutuhan secara skala prioritas.
- c. Bagian ketiga berisi analisis keuangan yang menerangkan perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran secara periodik, perbedaan ini mencakup:
- Kelebihan dana, yaitu pendapatan melebihi pengeluaran pada periode tertentu.
 - Kekurangan dana, yaitu pengeluaran melebihi pendapatan pada periode tertentu.
- Dengan adanya contoh ini diharapkan dapat mengetahui beberapa keistimewaan dalam rumah tangga muslim, diantara ialah:
- Dapat mengetahui jumlah pendapatan secara real, jumlah pengeluaran, dan pos-pos pengeluaran secara rinci pada periode tertentu.
 - Dapat mengetahui kapan terjadinya kelebihan dana dan kekurangan dana serta cara-cara pengelolaan atau cara-cara penanggulangannya.
 - Dapat membantu ibu rumah tangga dalam hal pandangan umum tentang suatu neraca di tengah-tengah neraca itu berlangsung, baik mingguan, bulanan, catur wulanan atau tahunan. Hal ini dapat membantu ibu rumah tangga dalam mengatur rumah tangga serta mengelolanya dengan jalan bijaksana, dewasa dan tepat guna.

**Tabel 1. Contoh
Neraca Perkiraan Rumah Tangga Muslim**

Keterangan	Bulan					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
A. Pendapatan						
- P. Pokok	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- P. Penunjang	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- P. Sampingan	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- Jalur-jalur penanggulangan kekurangan (minus)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah Pendapatan	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
B. Pengeluaran						
- P. Primer	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- P. Sekunder	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- P. Sukarela	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- P. Pengembangan	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- P. Lain-lain	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- Jalur-jalur pengembangan kelebihan (surplus)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah Pengeluaran	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
C. Perbedaan pendapatan dan pengeluaran:						
- Kelebihan Dana	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- Kekurangan Dana	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Perbedaan Antara Perkiraan dan Pelaksanaan dalam Neraca Rumah Tangga Muslim

Pada akhir setiap mingguan, bulanan, caturwulanan atau tahunan ibu rumah tangga harus dapat membandingkan perkiraan neraca dengan pelaksanaan neraca. Selanjutnya mengkaji dan menganalisis sebab-sebab penyimpangan yang terjadi agar masalah ini dapat dijadikan contoh untuk bulan kedepannya, sehingga masalah ini dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

Sebetulnya memang sulit bagi seorang ibu rumah tangga di dalam menganalisis dan membandingkan masalah ini, sebab hal itu termasuk masalah yang abstrak. Dalam hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 34, Artinya: *“sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dia-Lah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (secara pasti) apa yang dapat diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha*

Mengetahui lagi Maha Menenal.

Walaupun demikian, hal ini diperintahkan untuk memperkirakan sebab-sebab yang akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepada manusia. Oleh karena itu, jika masih terjadi penyimpangan di dalam neraca hendaknya dianggap sebagai ketentuan Allah yang harus diyakini (sunnatullah).

Sesungguhnya secara bertahap, seorang ibu rumah tangga akan mampu memperkirakan pendapatan dan pengeluaran rumah tangganya dengan tepat. Kesulitan akan tertantangi dengan mudah. Rasulullah SAW bersabda, *“Ikatlah untamu dan bertawakkallah kepada Allah.”* Perkiraan-perkiraan yang dilakukan merupakan usaha. Kalaupun benar atau menyimpang, hal itu merupakan hasil yang harus diyakini dan selanjutnya tawakkal pada Allah. Pada akhir bulan hendaknya anggota rumah tangga berkumpul untuk mendiskusikan masalah perkiraan, pelaksanaan dan perbandingannya, sebab jalan musyawarah merupakan jalan yang sangat diridhai Allah.

Tabel 2. Contoh Perbedaan Antara Perkiraan dan Pelaksanaan dalam Neraca Rumah Tangga Muslim Untuk Bulan XXX

(Nama Bulan) Keterangan	Perkiraan	Pelaksanaan	Perbedaan	Analisis Perbedaan		Sebab Perbedaan
				kelebihan	kekurangan	
A. Pendapatan						
- P. Pokok	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	.
- P. Penunjang	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	

- P. Sampingan	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- Jalur-jalur penanggulangan kekurangan (minus)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah Pendapatan	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
B. Pengeluaran					
- P. Primer	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- P. Sekunder	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- P. Sukarela	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- P. Pengembangan	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- P. Lain-lain	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- Jalur-jalur pengembangan kelebihan (surplus)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah Pengeluaran	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
C. Perbedaan pendapatan dan pengeluaran:					
- Kelebihan Dana	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- Kekurangan Dana	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Persiapan Penyusunan Neraca Rumah Tangga

Penyusunan sistem neraca bagi rumah tangga muslim bukanlah hal yang sulit sebab tidak memerlukan pengetahuan khusus yang berhubungan dengan perekonomian atau keuangan. Untuk lebih jelasnya, ibu rumah tangga muslim yang hendak menyusun neraca bagi rumah tangganya haruslah mengikuti langkah-langkah berikut ini

- a. Ibu rumah tangga mengundang seluruh anggota rumah tangga untuk berkumpul pada permulaan/awal bulan dalam rangka mendiskusikan kebutuhan rumah tangga untuk masa satu minggu, bulan, atau semester (baik pendapatan pokok atau pendapatan lainnya).
- b. Para peserta diskusi harus memperkirakan pendapatan-pendapatan untuk waktu satu minggu atau bulan.
- c. Para peserta diskusi harus memperkirakan

pengeluaran-pengeluaran dalam satu bulan, dengan memperhatikan prinsip mengutamakan kebutuhan yang lebih penting (skala prioritas kebutuhan secara hirarkis).

- d. Para peserta diskusi keluarga membahas tentang keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran serta menerangkan tentang perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi. Dalam langkah ini harus diperhatikan jalan-jalan untuk menanggulangi kekurangan dan jalan-jalan untuk mengembangkan kelebihan.
- e. Ibu rumah tangga mendiskusikan masalah kekurangan dana dengan suami dan anak-anak yang sudah dewasa tentang cara penanggulangannya, misalnya dengan cara-cara sebagai berikut.
 - a) Menunda sebagian pengeluaran.
 - b) Berusaha menambah pendapatan.
 - c) Mengeluarkan harta simpanan jika ada.
 - d) Meminjam dengan jalan yang baik.

e) Berusaha menyejajarkan pendapatan jika mungkin.

Semua itu dilakukan sesuai dengan kondisi nyata keluarga.

f. Ibu rumah tangga mendiskusikan masalah kelebihan dana dengan suami dan anak-anak yang sudah dewasa tentang cara pengembangannya, misalnya dengan cara-cara sebagai berikut:

a) Menyimpan kelebihan untuk menghadapi kekurangan pada bulan yang akan datang.

b) Mengembangkan kelebihan dana dalam pengembangan-pengembangan yang diperbolehkan seperti melalui bank Islam, baik untuk jangka panjang, menengah, maupun pendek.

c) Membeli beberapa kebutuhan untuk bulan mendatang untuk menghindari kenaikan harga-harga.

d) Menutupi bagian-bagian sesuatu yang dibeli dengan pembayaran dimuka.

g. Ibu rumah tangga menyelesaikan keterangan dan penjelasan yang ada pada bagian akhir format perkiraan secara rinci agar menjadi pedoman pengeluaran sehingga tidak terjadi penyimpangan. Ibu rumah tangga pun dapat mengganti rencana neraca ini dengan beberapa kebutuhan tidak terduga datangnya dan dapat menghabiskan waktu serta memerlukan kajian, seperti terjadinya inflasi atau devaluasi.

h. Ibu rumah tangga harus mendahulukan yang

terpenting sebagai prioritas dan menerapkan perbandingan dalam perkiraan dan realisasi dalam pendapatan dan pengeluaran pada akhir bulan. Selain itu juga mengkaji sebab-sebab yang dapat menimbulkan penyimpangan sehingga menjadi dasar pertimbangan untuk penyusunan neraca bulan depan.

KESIMPULAN

Ekonomi rumah tangga muslim berbeda dengan rumah tangga yang di dalamnya tidak dilaksanakannya syari'at Islam. Rumah tangga muslim memiliki kepribadian dan keistimewaan tersendiri dan berbeda dengan rumah tangga orang-orang timur atau rumah tangga orang barat, sebab rumah tangga seorang muslim mengandung nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada rumah tangga muslim ialah: Adanya keimanan anggota rumah tangga bahwa hidup mereka hanyalah untuk Allah SWT, keyakinan bahwa kehidupan dunia itu sementara dan akan binasa, anggota rumah tangga muslim yang berakhlak mulia yang dapat mewujudkan ketenteraman, kasih sayang dan cinta, Rumah tangga muslim menjadi tempat yang tenang untuk berteduh, penuh kesabaran dan kerelaan dan Rumah tangga muslim merupakan perserikatan antara laki-laki dan wanita yang telah diperkuat oleh suatu ikatan pernikahan.

Pertikaian rumah tangga muslim antara

suami dengan istri salah satu penyebabnya ialah pemaksaan atau kurang terkoordinir antara pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam rumah tangga. Supaya terhindar dari masalah yang akan terjadi pada masa mendatang. Maka dirancanglah daftar neraca keuangan, pada hakikatnya merupakan rencana yang dijadikan patokan bagi seorang ibu rumah tangga dalam masalah pemasukan dan pengeluaran. Daftar tersebut sangat berperan ketika dalam keluarga terjadi persoalan perselisihan dalam keuangan rumah tangga, sekaligus dapat dijadikan sarana dalam merancang masa depan. Penyusunan neraca anggaran rumah tangga merupakan data yang berisi batas-batas dan perkiraan tertentu dalam hal pemasukan, pengeluaran dan pengembangan dana sehingga bisa untuk memperkirakan kekuatan dana dan segera dapat menanggulangi masalah dana. Dengan adanya contoh ini diharapkan dapat mengetahui beberapa keistimewaan dalam rumah tangga muslim, diantara ialah:

1. Dapat mengetahui jumlah pendapatan secara real, jumlah pengeluaran, dan pos-pos pengeluaran secara rinci pada periode tertentu.
2. Dapat mengetahui kapan terjadinya kelebihan dana dan kekurangan dana serta cara-cara

pengelolaan atau cara-cara penaggulangnya.

3. Dapat membantu ibu rumah tangga dalam hal pandangan umum tentang suatu neraca di tengah-tengah neraca itu berlangsung, baik mingguan, bulanan, catur wulanan atau tahunan. Hal ini dapat membantu ibu rumah tangga dalam mengatur rumah tangga serta mengelolanya dengan jalan bijaksana, dewasa dan tepat guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. N. R., & Hamidawati, R. N. (2011). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Al-sidiqi, M. N. (2004). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Idri, & Tutik, T.T. (2008). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Ihromi, T.O. (1990). *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda*. Jakarta: FE UI.
- Ritonga, H.D.H. (2010). Pola Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 13(3).
- Shihab, M. Q. (1996). *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Syahatah, H. (1998) *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press.

MAMPUKAH DIVERSIFIKASI ASET MENINGKATKAN NILAI PASAR BANK?

DYAH NIRMALAWATI TAURUSIANINGSIH

Institut Keuangan, Perbankan, dan Informatika Asia Perbanas

E-mail: dyah.nirmalawati@perbanas.id

Abstract

The theme of the research is "Banks and Financial Institutions". This research was conducted to analyse the impact of asset diversification on bank to its market value. By using 11 banks which are categorized as banks that have core capital more than 500 trillion Rupiah and also listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) since 2004 as a research sample, we found that conglomerate discount was exist on bank that having a small asset only. Otherwise, the more diversified bank, the higher its market value.

Keywords: Financial Conglomeration, Diversification, Market Value

PENDAHULUAN

Adanya fenomena pergeseran peran perbankan dari perbankan tradisional yang menawarkan jasa intermediari klasik (kredit, tabungan, giro, deposito berjangka, dan lain sebagainya) menjadi konglomerasi keuangan yang menawarkan jasa keuangan non-klasik (asuransi, sekuritas, dan lain sebagainya) di samping jasa intermediari keuangan klasik, mengundang diskusi mengenai dampak diversifikasi perbankan. Beberapa penelitian sebelumnya telah menemukan adanya dampak positif dari diversifikasi jasa keuangan bagi perbankan, yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan stabilitas bank (Jacoby, 1970; Berger, 2000; Malkonen, 2009; Schmid & Walter, 2009; Sanya & Wolfe, 2011; Lin, et. el., 2012). Peningkatan efisiensi bersumber dari penurunan biaya berupa *economies of scale*, *economies of scope* serta adanya penurunan *cost of fund* sebagai efek reputasi

dan *market power*. Peningkatan pendapatan merupakan dampak dari berlakunya konglomerasi keuangan sebagai *one stop shopping* jasa keuangan (Berger, 2000). Sedangkan peningkatan stabilitas diperoleh karena konglomerasi keuangan selain mendiversifikasikan produknya, juga risiko yang ditanggungnya (Berger, 2000), sehingga risiko yang ditanggung semakin kecil (Jacoby, 1970; Sanya & Wolfe, 2011) dan bank semakin tidak sensitif terhadap fluktuasi risiko (Lin, et. el., 2012), yang berarti meningkatkan stabilitas

Di sisi lain, dalam diversifikasi jasa keuangan dimungkinkan adanya dukungan manajemen dan keuangan antar anak perusahaan berupa subsidi silang. Subsidi silang ini memberikan aliran modal internal yang sudah tentu lebih mudah daripada pencarian modal eksternal. Bentuk subsidi silang juga dapat berupa pengembangan produk, pembuatan iklan skala besar, sehingga pesaing yang bukan merupakan konglomerasi keuangan tidak akan

mampu melakukannya (Jacoby, 1970). Hal tersebut berpotensi menghasilkan alokasi modal yang tidak efisien dan mengurangi insentif kerja pada bisnis yang menguntungkan (Scmid & Walter, 2009). Adanya konflik kepentingan antar anak perusahaan juga menjadi sesuatu yang sering dikhawatirkan.

Schmid dan Walter (2009) mempertanyakan apakah konglomerasi keuangan itu menciptakan nilai ekonomi atau justru menghancurkan nilai ekonominya. Salah satu yang menjadi kekhawatiran adalah adanya konglomerasi diskon, yaitu penurunan nilai pasar sebagai akibat terjadinya konglomerasi. Banyak penelitian terdahulu telah menemukan adanya diskon konglomerat (Lang & Stulz, 1994; Berger & Ofek, 1995; Leaven & Levine, 2007; Schmid & Wakter, 2009). Levyveld & Knot (2009) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya diskon konglomerat, yaitu masalah keagenan (Denis, Denis & Sarin, 1997) dan diversifikasi geografis (Scmid & Walter, 2009). Sedangkan sebagian penelitian lainnya menemukan kondisi sebaliknya, yaitu bahwa konglomerasi tidak mengurangi nilai perusahaan (Rudolph & Schwetzle, 2012).

Maraknya perkembangan diversifikasi jasa keuangan melalui konglomerasi keuangan di dunia saat ini disebabkan karena keyakinan bahwa konglomerasi keuangan merupakan strategi untuk meningkatkan daya saing bank-bank nasional atas kehadiran bank-bank raksasa

yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan besar di luar negeri. Nicolo et. al., (2003) mencatat perkembangan konglomerasi keuangan di dunia, dari 209 pada tahun 1995, meningkat 42% menjadi 298 pada tahun 2000. Di Asia, jumlah konglomerasi keuangan juga meningkat dari 10 di tahun 1995 menjadi 15 di tahun 2000. Jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat.

Di Indonesia, saat ini, terdapat 44 konglomerasi keuangan yang menguasai lebih dari 65% dari total aset jasa keuangan Indonesia. Jumlah tersebut meliputi 12 konglomerasi vertikal (mempunyai hubungan langsung dengan perusahaan induk dan perusahaan anak), 22 konglomerasi horisontal (tidak mempunyai hubungan langsung dengan kelompok itu, namun dimiliki oleh pemegang saham yang sama), dan 10 konglomerasi mixed (kombinasi vertikal dan horisontal). Diantara 44 konglomerasi keuangan tersebut, terdapat 33 dengan entitas sektor perbankan (OJK, 2015) yang merupakan konglomerasi yang berinduk di Indonesia dan negara lain.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai konglomerasi keuangan di Indonesia, misalnya Hidayat (2016) yang membahas mengenai dampak konglomerasi keuangan terhadap risiko dan kinerja perbankan Indonesia dan Taurusianingsih (2016) yang membahas mengenai dampaknya pada persaingan industri perbankan di Indonesia. Meningkatnya kinerja keuangan yang aman stabil dari risiko

meningkatnya persaingan pasar dari bank yang tergabung dalam konglomerasi keuangan adalah penting bagi stabilitas dan kelangsungan usahanya. Namun demikian, sebuah bank yang secara fundamental sehat, dapat menjadi bangkrut karena tidak mampu menambah dana di pasar, sebagai akibat harga saham yang menurun (Almarzoki, Naceur, & Scopelliti (2015); (Davidenko, 2013). Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan analisa dampak diversifikasi terhadap nilai pasar bank, yang selain bermanfaat bagi perkembangan industri perbankan, juga dapat sebagai referensi pengambilan keputusan untuk kebijakan yang terkait, serta sebagai referensi penelitian di bidang Organisasi Industri, terutama di industri perbankan.

Sampel yang digunakan sebanyak 11 bank di Indonesia yang termasuk kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 dan 4 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2004 hingga sekarang. BUKU 3 merupakan kategori bagi bank yang mempunyai modal inti bank bermodal inti Rp. 5.000.000.000.000,00 hingga Rp. 30.000.000.000.000,00. Sedangkan BUKU 4 merupakan kategori bagi bank dengan modal inti lebih dari Rp. 30.000.000.000.000,00. Terdapat 23 bank yang termasuk kategori BUKU 3 dan 4, namun total asetnya lebih dari 70% dari seluruh industri perbankan Indonesia yang berjumlah 120 bank.

TINJAUAN PUSTAKA

Konglomerasi Keuangan dan Diversifikasi

Konglomerasi keuangan adalah lembaga keuangan yang meliputi perbankan, asuransi, dan produk keuangan lainnya yang berada dalam satu payung perusahaan karena keterkaitan kepemilikan maupun pengendalian (Ulst, 2005; Freixas, Loranth, & Morrison, 2007; OJK, 2014). Terdapat tiga model konglomerasi keuangan, yaitu (Ulst, 2005): 1) *Universal Banking*, yaitu bank yang melakukan seluruh kegiatan operasi keuangan, menawarkan layanan jasa keuangan perbankan klasik dan sekaligus non klasik, tanpa mempunyai anak perusahaan (Ulst, 2005; Van der Berghe & Verweire, 1998); 2) *Parent-subsidiary*, yaitu suatu perusahaan induk yang mempunyai anak perusahaan bidang keuangan (tidak harus bank), dan kegiatan operasi jasa keuangan dilakukan oleh anak perusahaan; 3) *Holding company*, yaitu seluruh aktivitas dilakukan oleh perusahaan keuangan maupun non keuangan yang mempunyai modal dan manajemen yang terpisah, namun dipayungi oleh perusahaan induk berupa *holding company*.

Yang membedakan konglomerasi keuangan dengan lembaga keuangan spesialis adalah adanya diversifikasi. Semakin terdiversifikasi perusahaan dalam konglomerasi keuangan, maka semakin dianggap konglomerat dibandingkan perusahaan spesialis. Diversifikasi merupakan strategi perluasan bisnis ke suatu pasar, sektor,

industri, dan atau segmen yang disebabkan terutama oleh reaksi atas daya saing pada lingkungan bisnis (Wang et. al., 2013; Yang et. al., 2017; Gyan et. al., 2017). Berdasarkan cakupannya, diversifikasi dapat merupakan diversifikasi internasional, yaitu perluasan bisnis perusahaan di luar batas-batas geografis dan pasar yang beroperasi ataupun diversifikasi industri yang mencakup aktivitas perusahaan lebih dari satu jenis segmen produk atau pasar.

Diversifikasi dapat diukur dengan berbasis aset dan pendapatan (Leaven & Levine, 2007). Diversifikasi berbasis aset adalah mengukur diversifikasi bank berdasarkan jenis aset yang dimiliki. Hal ini terkait dengan beragamnya jasa keuangan yang ditawarkan bank, yaitu kredit, non kredit, dan aktivitas lainnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan Kredit Netto setelah dikurangi Aset Produktif Lainnya (efek dan investasi) dengan Total Aset Produktif (meliputi kredit, efek, dan investasi).

$$1 - \left| \frac{(\text{Net Loans} - \text{Other Earning Assets})}{\text{Total Earning Assets}} \right|$$

Nilai diversifikasi antara 0 (nol) dan 1 (satu), dimana semakin tinggi nilainya, menunjukkan semakin diversifikasi, yaitu semakin beragam layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank. Diversifikasi berbasis pendapatan mengukur diversifikasi bank berdasarkan sumber pendapatan yang diterima bank. Pengukuran dilakukan dengan cara

membandingkan Pendapatan Bunga Netto (pendapatan bunga dikurangi beban bunga) setelah dikurangi Pendapatan Operasional Lainnya (pendapatan fee netto, pendapatan komisi netto, dan pendapatan perdagangan netto) dengan Total Pendapatan Operasional (meliputi pendapatan bunga bersih, pendapatan perdagangan bersih, dan pendapatan komisi bersih).

$$1 - \left| \frac{(\text{Net Interest Income} - \text{Other Operating Income})}{\text{Total Operating Income}} \right|$$

Nilai diversifikasi antara 0 (nol) dan 1 (satu), dimana semakin tinggi nilainya, menunjukkan semakin diversifikasi, yaitu semakin beragam sumber pendapatan yang diterima bank. Pengukuran diversifikasi berbasis aset dan pendapatan saling melengkapi, mengingat diversifikasi aset berdasarkan *stock variables*, sedangkan diversifikasi berdasarkan *flow variables*. Namun dalam penelitian ini, hanya difokuskan pada analisa atas diversifikasi aset.

Dampak Diversifikasi melalui Konglomerasi Keuangan

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa diversifikasi melalui konglomerasi keuangan setidaknya memberikan 5 (lima) dampak positif bagi bank, yaitu pertama, diversifikasi akan meningkatkan efisiensi bank (Jacoby, 1970; Thakor, 1996; Berger, 2000; Vander, 2002). Peningkatan efisiensi tersebut dapat dilihat dari keberadaan *economies of scale* dan *economies of scope*, penurunan *cost of fund* karena efek reputasi atau *market power*, serta meningkatnya

pendapatan yang bersumber dari jasa keuangan lainnya (Berger, 2000). Kedua, diversifikasi meningkatkan citra manajemen (Boot, 1992). Melalui merger konglomerasi, bank akan tampak kelebihan kapasitas, sehingga wajar ketika melakukan penghilangan cabang untuk menghemat biaya (Thakor, 1996).

Dampak ketiga adalah *too big too fail*. Yaitu bank besar akan diperhatikan oleh pemerintah, karena jika dia gagal akan menyebabkan masalah yang sangat besar (Thakor, 1996). Keempat, diversifikasi meningkatkan daya saing dengan semakin kuatnya dukungan manajerial dan keuangan perusahaan. Konglomerasi keuangan bahkan dapat menjadi predator yang merugikan bank-bank perusahaan-perusahaan kecil melalui subsidi pada salah satu bisnisnya sehingga menyebabkan pesaing di bisnis yang disubsidi tersebut tidak mampu bersaing dan keluar dari industri. Terakhir, diversifikasi juga meningkatkan stabilitas bank, mengingat dilakukannya diversifikasi produk dan sekaligus diversifikasi risiko (Berger, 2000), sehingga meminimalkan risiko (terutama risiko insolvensi) (Jacoby, 1970; Sanya & Wolfe, 2011), dan return yang dihasilkan secara keseluruhan akan menjadi semakin stabil. Lin, et. al., (2012) menyatakan bahwa bank dengan tingkat diversifikasi produk tinggi, lebih tidak sensitif terhadap fluktuasi risiko bank, dibandingkan dengan bank yang spesialis, karena adanya subsidi silang antar anggota konglomerasi

keuangan (Herring & Litan, 2003).

Di samping dampak positif, konglomerasi juga berpotensi atas dampak negatif bagi bank, yaitu adanya kemungkinan terjadinya *power abuse* berupa peningkatan *monopoly power* yang justru dapat mengontrol substitusi produk dan kemudian meningkatkan harga pada nasabah. Di samping itu, kekuatan besar dari konglomerasi keuangan akan berpotensi mempengaruhi perekonomian dan politik (Lindblad, 2007). Dari sudut pandang nilai pasar, konglomerasi keuangan berpotensi menurunkan nilai pasar bank, karena adanya diskon konglomerat yang substansial dan persisten antara lembaga keuangan (Leaven & Levine, 2007; Schmid & Walter, 2009; Levyveld & Knot, 2009).

Diskon Konglomerasi

Diskon konglomerasi adalah suatu kondisi ketika pasar memberi nilai lebih rendah kepada konglomerat yang menawarkan beberapa jasa keuangan daripada perusahaan non-konglomerasi yang hanya menawarkan satu jasa keuangan (Laeven & Levine, 2007). Sedangkan Zieminski (2012) menyatakan bahwa diskon konglomerasi adalah perbedaan nilai antara perusahaan dengan tiga atau lebih perusahaan dengan atau divisi yang menawarkan jasa pada pasar yang berbeda dan perusahaan yang lebih fokus.

Faktor yang menyebabkan munculnya diskon konglomerasi adalah: 1) adanya persepsi tradisional

bahwa perusahaan kecil lebih gesit dan transparan (Zieminski, 2012); 2) inefisiensi pada perusahaan besar, *agency problem*, informasi asimetris, dan pasar modal internal yang tidak efisien (Harper, Lyer, & Nejadmalayeri, 2017); 3) tingginya ekspektasi pasar dan ketidakpastian profitabilitas perusahaan (Hund & Tices, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak diversifikasi bank terhadap nilai pasar bank. Pengukuran diversifikasi dalam penelitian ini menggunakan diversifikasi aset yang pernah digunakan oleh Leaven dan Levine (2007) pada persamaan. Diversifikasi aset mengukur keragaman aktivitas jasa keuangan di bank, dengan memisahkan antara jasa keuangan kredit dan non kredit.

Kredit netto merupakan aset bank yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan berupa bunga. Diperoleh dari penjumlahan antara jumlah kredit yang dikeluarkan bank, penempatan dana di Bank Indonesia selain Giro Wajib Minimum (GWM) dan penempatan dana di bank lain. Aset produktif lainnya merupakan aset bank yang bertujuan mendapatkan pendapatan selain bunga, diukur menggunakan jumlah surat berharga yang dimiliki bank. Sedangkan total aset produktif adalah merupakan penjumlahan dari aset kredit netto dan aset produktif lainnya. Dengan menggunakan persamaan, diperoleh ukuran diversifikasi bank dengan nilai antara 0 (nol) hingga 1 (satu).

Semakin tinggi nilainya, menunjukkan semakin besar diversifikasi, yaitu semakin beragam layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank. Sebaliknya semakin kecil nilainya menunjukkan sebagian besar layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank tersebut berbasis bunga. Nilai pasar diproksi dengan menggunakan logaritma harga rata-rata saham bank. Harga penutupan saham setiap harinya selama setahun dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai pasar tahunan. Satuan harga dalam rupiah sangat bervariasi dari puluhan hingga ribuan. Logaritma dari harga pasar dilakukan agar data terdistribusi normal.

Objek penelitian ini adalah bank di Indonesia, sehingga populasi penelitian ini adalah seluruh bank di Indonesia yang berjumlah 120 bank. Namun demikian, sampel yang diambil adalah bank yang termasuk kategori BUKU 3 dan BUKU 4 yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu penelitian. Total aset dari bank yang termasuk kategori BUKU 3 dan BUKU 4 lebih dari 70% dari total aset seluruh bank, sehingga meskipun jumlahnya hanya 24 bank, namun dianggap cukup mewakili seluruh populasi. Dari 24 bank tersebut, terdapat 11 bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan memenuhi kelengkapan data. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing-masing bank yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan harga saham

yang dipublikasikan oleh β Bursa Efek Indonesia. Jangka waktu penelitian ini adalah tahun 2004-2017.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$LPrice_{it} = \alpha_i + \beta_1 Divers_{it} + \beta_2 CV + e_{it}$$

Di mana, LPrice adalah logaritma harga saham rata-rata setahun. Divers adalah nilai diversifikasi aset bank. CV adalah variabel kontrol, yang terdiri dari 1) Earning Per Share (EPS), 2) Return on Assets (ROA), dan 3) Total Aset (TA). α merupakan intersep dan β adalah koefisien dari parameter. Selibhnya e merupakan random error, sertai i dan t merupakan unit bank dan waktu. Analisis data dilakukan dengan regresi panel, dengan 11 bank dalam kurun waktu 14 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diversifikasi Bank

Data dari 11 bank yang menjadi sampel penelitian dalam kurun waktu 14 tahun, menunjukkan diversifikasi yang cukup beragam. Semakin tinggi nilai diversifikasi, menunjukkan bahwa semakin banyak jasa keuangan yang berbasis non kredit yang ditawarkan oleh bank tersebut. Bank yang mempunyai nilai rata-rata diversifikasi tertinggi selama kurun waktu penelitian adalah PT. Bank Mega Tbk dan PT. Bank BCA Tbk. Sedangkan bank yang mempunyai diversifikasi terkecil adalah PT. Bank Permata Tbk dan Bank Maybank Indonesia Tbk.

Tabel 1. Descriptive Statistics Diversifikasi Bank

Bank	N	Min	Max	Mean	Std Dev
BBCA	14	0.11	0.45	0.2702	0.11313
BMRI	14	0.03	0.54	0.2426	0.16442
BBNI	14	0.07	0.54	0.2466	0.13931
BBRI	14	0.03	0.44	0.1836	0.11293
PNBN	14	0.10	0.38	0.2224	0.07565
BDMN	14	0.05	0.35	0.2124	0.11802
BNGA	14	0.02	0.35	0.1648	0.10489
NISP	14	0.01	0.42	0.2078	0.16449
BNII	14	0.06	0.32	0.1769	0.07494
BNLI	14	0.01	0.29	0.1316	0.10226
MEGA	14	0.02	0.63	0.3162	0.22405

Nilai Pasar Bank

Bank yang mempunyai nilai pasar rata-rata bank tertinggi adalah PT. Bank Danamon Tbk dengan kisaran harga antara Rp. 3.129,83 hingga Rp. 7.149,46. Sedangkan harga terendah adalah PT. Bank Maybank Indonesi (BNII) dengan kisaran harga antara Rp. 152.03 hingga Rp. 524, 76.

Tabel 2. Descriptive Statistics Harga Saham Bank

Bank	N	Min	Max	Mean	Std Dev
BBCA	14	1092.11	1092.11	1092.1100	.00000
BMRI	14	700.51	6407.58	3058.7057	1917.69561
BBNI	14	1112.82	7019.98	3273.1314	1996.23725
BBRI	14	181.57	2875.77	1230.8186	857.41621
PNBN	14	326.68	1051.22	744.7607	225.04227
BDMN	14	3129.83	7149.46	4766.8629	1025.27742
BNGA	14	383.41	1546.04	867.3814	338.18022
NISP	14	256.84	919.52	554.8071	173.85715
BNII	14	152.03	524.76	294.3007	111.04245
BNLI	14	540.94	1374.52	910.1021	318.19077
MEGA	14	345.00	2990.71	1592.9057	875.91006

Dampak Diversifikasi Bank Terhadap Nilai Pasar Bank

Analisa dilakukan dengan menggunakan variabel terikat Price dan LPrice yang merupakan proksi dari nilai pasar bank. Dari 6 model yang ditampilkan pada tabel, hasilnya konsisten menunjukkan bahwa diversifikasi aset mempunyai dampak positif

yang signifikan secara statistik terhadap nilai pasar bank. Semakin banyak aset yang dialokasikan untuk mendapatkan penerimaan berbasis non bunga, akan semakin meningkatkan nilai pasar bank tersebut.

Tabel 3. Dampak Diversifikasi terhadap Nilai Pasar Bank

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6
Var. Terikat: Price				Var. Terikat: LPrice		
	Var. Bebas:					
Divers	2510.596*	2387.409*	2526.266*	1.723081*	1.683900*	1.889610*
ROA	-48.46761	-29.18628		-0.049371	-0.043238	0.001295*
EPS	2.752547*	2.182164*	2.014955*	0.001724*	0.001542*	3.97E-10
TA		7.88E-07	8.87E-07		2.51E-10	

Temuan ini bertentangan dengan Leaven dan levine (2007) serta Schmid & Walter (2009) yang menyatakan bahwa terdapat diskon konglomerasi. Jika nilai pasar bank ditentukan oleh harga saham rata-rata, maka tidak terdapat diskon dari konglomerasi keuangan. Semakin banyak jasa keuangan yang berbasis non bunga akan meningkatkan nilai pasar bank.

Saat ini bank tidak hanya dianggap sebagai dianggap sebagai penerima tabungan dan penyedia jasa kredit saja, namun juga penyedia berbagai jasa keuangan secara luas. Ketergantungan masyarakat terhadap berbagai jasa keuangan ini didukung dengan semakin berkembangnya teknologi dan fasilitas yang diberikan bank. Propaganda *cashless economy* dan disertai dengan kemudahan akses perbankan melalui berbagai *channel* membuat masyarakat semakin sering menggunakan jasa perbankan untuk berbagai transaksi. Dari sudut pandang investor, diversifikasi aset juga akan berdampak pada diversifikasi risiko, sehingga semakin

besar diversifikasi, semakin stabil bank dari guncangan risiko. Kondisi ini yang menyebabkan penilaian pasar terhadap bank yang melakukan diversifikasi semakin tinggi.

Pada variabel kontrol, Earning Per Share (EPS) secara statistik berdampak positif dan signifikan terhadap nilai pasar bank. EPS yang mengukur besarnya dividen yang akan diperoleh investor per lembar saham yang dibagikan setelah dikurangi dengan dividen pemilik perusahaan menjadi daya tarik bagi investor untuk membeli saham bank. Semakin tinggi EPS, semakin besar permintaan akan saham bank, sehingga semakin tinggi nilai pasar bank. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya (Badruzaman, 2017; Khairani, 2016).

Dengan memperbandingkan nilai Akaike Info Criterion (AIC) dan Schwarz Criterion (SC), model dengan menggunakan variabel terikat LPrice lebih baik dibandingkan dengan variabel Price. Kemudian dari pengujian multikolinieritas, terdeteksi adanya multikolinieritas antara variabel kontrol ROA dan TA, sehingga pada model 1, 3, 4 dan 6, kedua variabel tersebut dipisahkan keberadaannya. Namun demikian, secara statistik keduanya tetap tidak mempunyai dampak yang positif dan signifikan.

Guna menganalisis lebih mendalam, digunakan Threshold Regression dengan pembagian berdasarkan jumlah Total Aset bank. Dengan memperhatikan model dan adanya multikolinieritas, maka variabel kontrol ROA

tidak digunakan lagi Hasil Software Matlab R2015a membagi data menjadi dua bagian seperti tertulis pada tabel 4 dengan memisahkan jumlah total aset, ditemukan bahwa dampak diversifikasi bank adalah positif dan signifikan hanya pada bank dengan total aset lebih dari Rp. 37.851.322 juta. Pada bank-bank dengan total aset di angka threshold tersebut, justru berdampak negatif. Hal ini menjelaskan bahwa diskon konglomerat terjadi pada bank beraset rendah.

Tabel 4. Threshold Regression

Variabel terikat: Lprice		
Variabel bebas	TA < 37851322	TA > 37851322
Divers	-1.8100*	0.7503*
EPS	-0.0017*	0.0006*
TA	0.0000	0.0000*

Pada penelitian ini, bank yang mempunyai aset kurang dari Rp. 37.851.322 juta adalah PT. Bank Pan Indonesia Tbk pada tahun 2004-2005, PT. Bank CIMB Niaga pada tahun 2005, PT. Bank OCBC NISP pada tahun 2004-2009, PT. Maybank Indonesia pada tahun 2004, PT. Bank Permata tahun 2004-2006, serta PT. Bank Mega pada tahun 2004-2008. Dengan mempertimbangkan *endowmen* yang dimiliki oleh masing-masing bank, hasil dari regresi panel dengan metode *Fixed Effect* menunjukkan bahwa dampak positif dari diversifikasi aset bank terutama terjadi pada PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank BNI Tbk, dan PT. Bank Danamon Tbk.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan diskon konglomerat pada bank-bank yang melakukan diversifikasi asetnya,

yaitu bank yang tidak hanya menawarkan jasa keuangan berbasis bunga seperti menerima dana pihak ketiga dan menyalurkan kredit serta beberapa aktivitas berbasis bunga lainnya, namun juga menawarkan jasa keuangan berbasis fee, dividen, komisi, dan lain sebagainya.

Dengan menggunakan 11 bank yang termasuk dalam kategori BUKU 3 dan BUKU 4 yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu tahun 2004 hingga 2017, ditemukan bahwa diversifikasi aset berdampak positif terhadap nilai pasar bank. Namun demikian, dampak ini hanya terjadi pada bank dengan aset besar. Pada bank beraset kecil, diversifikasi justru berdampak pada penurunan nilai pasar bank. Artinya, terdapat diskon konglomerat pada bank beraset kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Almarzoqi, R., Naceur, M. S. B., & Scopelliti, A. (2015). *How does Bank Competition Affect Solvency, Liquidity and Credit Risk? Evidence From The MENA Countries* (No. 15-210). International Monetary Fund.
- Badruzaman, J. (2017). Pengaruh Earning Per Share terhadap Harga Saham. *Jurnal Akuntansi*, 12(1): 101-110.
- Berger, A. N., Cummins, J. D., Weiss, M. A., & Zi, H. (2000). Conglomeration Versus Strategic Focus: Evidence from The Insurance Industry. *Journal of Financial Intermediation*, 9(4): 323-362.
- Berger, P. G., & Ofek, E. (1995). Diversification's

- Effect on Firm Value. *Journal of Financial Economics*, 37(1): 39-65.
- Boot, A. W. (1992). Why Hank into Losers? Divestitures and Takeovers. *Journal of Finance*, 47(4): 1401-1423.
- Davydenko, S. A. (2013). Insolvency, Illiquidity, and the Risk of Default. *Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto*.
- Denis, D. J., Denis, D. K., & Sarin, A. (1997). Agency Problems, Equity Ownership, and Corporate Diversification. *The Journal of Finance*, 52(1): 135-160.
- Freixas, X., Lóránth, G., & Morrison, A. D. (2007). Regulating Financial Conglomerates. *Journal of Financial Intermediation*, 16(4): 479-514.
- Gyan, A. K., Brahmana, R., & Bakri, A. K. (2017). Diversification Strategy, Efficiency, and Firm Performance: Insight from Emerging Market. *Research in International Business and Finance*, 42: 1103-1114.
- Harper, J. T., Iyer, S. R., & Nejadmalayeri, A. (2017). Diversification Discount and Investor Sentiment. *The North American Journal of Economics and Finance*, 42: 218-236.
- Herring, R., & Litan, R. E. (2003). *Financial Conglomerates: The Future of Finance?*. Washington D.C.: Brookings Institution.
- Hidayat, T. (2016). The Impact of Financial Conglomeration on Risk and Return Performance in Indonesia Banking Industry. *International Journal of Latest Trends in Finance and Economic Sciences*. 6(2): 1135-1145
- Hund, J., Monk, D., & Tice, S. (2010). Uncertainty About Average Profitability and The Diversification Discount. *Journal of Financial Economics*, 96(3): 463-484.
- Jacoby, N. H. (1970). The Conglomeration Corporation. *Financial Analysts Journal*. 26(3): 35-48.
- Khairani, I. (2016). Pengaruh Earning Per Share dan Deviden Per Share terhadap Harga Saham Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011 - 2013. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*. 5(1): 566-572.
- Lang, L. H., & Stulz, R. M. (1994). Tobin's Q, Corporate Diversification, and Firm Performance. *Journal of Political Economy*, 102(6): 1248-1280.
- Laeven, L., & Levine, R. (2007). Is There A Diversification Discount in Financial Conglomerates?. *Journal of Financial Economics*, 85(2): 331-367.
- Lin, J. R., Chung, H., Hsieh, M. H., & Wu, S. (2012). The Determinants of Interest Margins and Their Effect on Bank Diversification: Evidence from Asian Banks. *Journal of Financial Stability*, 8(2): 96-106.
- Lindblad, J. T. (2007). Conglomerates in Indonesia: The Road to Power and Beyond. In *Big Business and Economic Development*, 85-105, Routledge.
- Mälkönen, V. (2009). Financial Conglomeration

- and Monitoring Incentives. *Journal of Financial Stability*, 5(2): 105-123.
- Nicoló, G. D., Bartholomew, P., Zaman, J., & Zephirin, M. (2004). Bank Consolidation, Internationalization, and Conglomeration: Trends and Implications for Financial Risk. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 13(4): 173-217.
- Rudolph, C., & Schwetzler, B. (2013). Conglomerates on the Rise Again? A Cross-Regional Study on the Impact of the 2008–2009 Financial Crisis on the Diversification Discount. *Journal of Corporate Finance*, 22: 153-165.
- Sanya, S., & Wolfe, S. (2011). Can Banks in Emerging Economies Benefit from Revenue Diversification?. *Journal of Financial Services Research*, 40(1-2): 79-101.
- Schmid, M. M., & Walter, I. (2009). Do Financial Conglomerates Create or Destroy Economic Value?. *Journal of Financial Intermediation*, 18(2): 193-216.
- Taurusianingsih, D. N. (2016). The Indonesian Banking Industry Competition: Financial Conglomeration Approach. *Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 6(3): 449-461.
- Thakor, A. V. (1996). Financial Conglomeration: Issues and Questions. *North American Journal of Economics and Finance*. 7(2): 135-145.
- Ulst, I. (2005). *Linkages of Financial Groups in the European Union - Financial Conglomeration Development in the Old and New Member States*. Central European University Press.
- Van der Berghe, L., & Verweire, K. (1998). *Creating The Future With AI Finance and Financial Conglomerates*. Springer Science Business Media.
- Van Lelyveld, I., & Knot, K. (2009). Do Financial Conglomerates Create or Destroy Value? Evidence for The EU. *Journal of Banking & Finance*, 33(12): 2312-2321.
- Vander, R.V. (2002). Cost and Profit of Financial Conglomerates and Universal Banks in Europe. *Journal of Money, Credit and Banking*, 34: 254-282
- Wang, Y., Ning, L., & Chen, J. (2014). Product Diversification Through Licensing: Empirical Evidence from Chinese Firms. *European Management Journal*, 32(4): 577-586.
- Yang, Y., Cao, Y., & Yang, L. T. G. (2017). Product Diversification and Property Performance in the Urban Lodging Market: The Relationship and Its Moderators. *Tourism Management*, 59: 363-375.

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN KEDISIPLINAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BTN CABANG SYARIAH PEKANBARU

JELI NATA LIYAS

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau

Email : jaznatan@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the influence of Leadership Style, Motivation and Discipline on work performance on employee performance in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. Data analysis used is multiple linear regression analysis. The sample of this study are 35 respondents who are permanent employees in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. The variables used are Leadership Style, Motivation and Discipline of work achievement. The results showed that the three variables tested simultaneously have a significant effect on employee performance in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. Partially Leadership Style significantly influence, while Motivation and Discipline of work achievement does not significantly influence. Leadership, Motivation and Discipline Variables on work performance have an effect of 8.36% on employee performance while the remaining 16,4% is influenced by other variables not included in the research

Keyword: Discipline of Work Performance, Employee Performance, Motivation, Style of Leadership

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia Merupakan satu-satunya sumber yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa Sumber Daya Manusia sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya.

Kepemimpinan (*leadership*) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (*leader*) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur

seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal, dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Faktor kepemimpinan memegang peranan penting karena pemimpin yang akan menggerakkan dan mengarahkan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. Bawahan dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa

memberikan pengabdian dan partisipasinya kepada perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, bahwa sukses tidaknya usaha pencapaian tujuan perusahaan di tentukan oleh kualitas kepemimpinan maka untuk meningkatkan kinerja karyawan didalam suatu organisasi, tidak terlepas dari sikap memimpin.

Pada PT. BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru kepemimpinan selama beberapa tahun mengalami pergantian pemimpin. Beberapa hal yang ada dalam lingkungan Bank, tentu mengalami beberapa peraturan yang berbeda sesuai dengan siapa yang memimpin pada saat itu. Hal ini ditujukan pimpinan untuk karyawan Bank agar tetap menjaga kinerja karyawan demi tercapainya tujuan Bank, serta untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Pimpinan selalu mengutamakan keseragaman pada karyawan, bertujuan menjaga kualitas kerja karyawan agar tetap memberikan kinerja yang baik kepada Bank. Seperti peraturan penggunaan seragam digunakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan agar terlihat serasi dan tetap sesuai syariat Islam.

Manusia merupakan sumber daya yang sangat menentukan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan kinerja yang baik dari karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya yang telah

ditetapkan oleh organisasi agar apa yang di rencanakan oleh organisasi dapat di capai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kinerja sendiri merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang di bebaskan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Kinerja merupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Karyawan dapat bekerja dengan baik apabila memiliki kinerja yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kerja yang baik sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi, Kinerja merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk itu kinerja harus mendapat perhatian dari para pimpinan organisasi, sebab menurunnya kinerja dari karyawan dapat mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan.

Sistem perbankan yang sehat, efisien dan tangguh perlu diupayakan. Dunia perbankan pada saat ini di tuntutan untuk memberikan kontribusi yang kuat kepada aspek ekonomi dalam hal menjaga kestabilan ekonomi yang berdampak pada ekonomi kemasyarakatan, sehingga bank menjadi sarana penting bagi masyarakat dalam hal mengelola keuangan serta menjadi sentra penambahan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan modal yang lebih besar untuk menjalankan usahanya.

Bank BTN Syariah adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai syariat Islam. Dalam menjalankan fungsinya diharapkan senantiasa memperhatikan fungsi sosial dalam memberikan pelayanan pada nasabah. Keberhasilan bank dalam menjalankan fungsinya ditandai dengan adanya mutu pelayanan prima. Mutu pelayanan Bank sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor dominan adalah Sumber Daya Manusia.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru merupakan salah satu dari sekian banyak Bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, sehingga dalam hal pelaksanaan tugasnya haruslah memiliki sumber daya yang bermutu.

Kualitas kepemimpinan yang baik adalah hal yang penting untuk diperhatikan oleh organisasi, karena kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi sehingga secara keseluruhan dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pada umumnya tujuan ini supaya organisasi dapat bertahan dalam suatu persaingan global yang sering berubah atau tidak stabil. Target produk pembiayaan yang ditetapkan oleh PT. Bank

Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, serta pencapaian atau realisasi jumlah target produk pembiayaan juga mengalami kenaikan dan penurunan dalam jangka 5 tahun terakhir, penurunan target produk pembiayaan yang paling rendah bisa dilihat pada tahun 2014 yaitu 86,08% dikarenakan kurangnya penegasan dari pemimpin kepada karyawan, karena pencapaian kurang dari target yang telah ditetapkan, sedangkan kenaikan target tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan pencapaian 103,87 % melebihi target yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan

Gaya kepemimpinan membawa pengaruh yang signifikan terhadap kinerja tenaga pendidik kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi bawahan, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan. kepemimpinan merupakan salah satu dimensi kompetensi yang sangat menentukan terhadap kinerja atau keberhasilan organisasi. memberi inspirasi kepada semua karyawan agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Semakin kepemimpinan dalam

sebuah organisasi maka akan meningkatkan kinerja karyawan (Yukl, 2009:4).

H1: Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Motivasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. semakin kuat motivasi kerja, kinerja karyawan akan semakin tinggi. setiap peningkatan motivasi kerja karyawan akan memberikan peningkatan yang sangat berarti bagi peningkatan kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya (Robbins, 2008:213).

H2: Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin

karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan. Disiplin mencoba mengatasi kesalahan dan keteledoran yang disebabkan karena kurang perhatian, ketidakmampuan, dan keterlambatan. Disiplin berusaha mencegah permulaan kerja yang lambat atau terlalu awalnya mengakhiri kerja yang disebabkan karena keterlambatan atau kemalasan. Disiplin juga berusaha untuk mengatasi perbedaan pendapat antar karyawan dan mencegah ketidaktaatan yang disebabkan oleh salah pengertian dan salah penafsiran, Singodimedjo (2008).

H3: Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Adapun populasi pada penelitian ini adalah karyawan tetap PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 36 orang karyawan. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sampel jenuh (metode sensus). Dimana metode sensus merupakan metode pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang akan dijadikan sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 35 orang

karyawan tetap, diluar pimpinan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atas perubahan dari setiap peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat (Ghozali & Chariri, 2007). Untuk regresi yang variabel bebas terdiri atas dua atau lebih, regresinya disebut juga regresi berganda. Oleh karena variabel bebas diatas mempunyai variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi berganda.

Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali & Chariri, 2007). Kriteria yang digunakan:

- Taraf Sig. (α) = 5% atau 0,05
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali & Chariri, 2007). Dalam penelitian ini pengujian hipotesis

secara simultan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh gaya kepemimpinan transaksional dan kompensasi secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya variabel gaya kepemimpinan dan kompensasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
- $H_1: \beta_1 = \beta_2 \neq 0$, artinya variabel gaya kepemimpinan dan kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2007):

- Apabila $F_{tabel} > F_{hitung}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak pada $\alpha = 5\%$
- Apabila $F_{tabel} < F_{hitung}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima pada $\alpha = 5\%$

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan seberapa besar persentase variasi variabel bebas (independen) pada model regresi linear berganda dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen) (Priyatno, 2008). Dengan kata lain pengujian model menggunakan R^2 , dapat menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam model regresi linear berganda adalah variabel-variabel independen yang

mampu mewakili keseluruhan dari variabel-variabel independen lainnya dalam mempengaruhi variabel dependen, kemudian besarnya pengaruh ditunjukkan dalam bentuk persentase.

HASIL PENELITIAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kedisiplinan secara parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kedisiplinan terhadap variabel kinerja karyawan. Berikut akan dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara parsial. Hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} yang kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} .

Tabel 1. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0,524	1,748		-0,3	0,766
Gaya					
Kepemimpinan	0,387	0,236	0,293	1,642	0,111
Motivasi	0,013	0,181	0,012	0,07	0,945
Kedisiplinan	0,652	0,145	0,647	4,495	0,000

1) Variabel Gaya Kepemimpinan

Ho : Secara parsial Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ha : Secara parsial Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai t_{hitung} (1,642) < t_{tabel} (2,0367) sehingga hipotesis alternatif (Ha) ditolak dan hipotesis nol (Ho) diterima. Dengan ditolaknya Ha berarti secara parsial Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

2) Variabel Motivasi

Ho : Secara parsial Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ha : Secara parsial Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t_{hitung} (0,07) < t_{tabel} (2,0367) sehingga hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Dengan diterimanya Ho berarti secara parsial Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

3) Variabel Kedisiplinan

Ho : Secara parsial Kedisiplinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ha : Secara parsial Kedisiplinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai t_{hitung} (4,495) < t_{tabel} (2,04227) sehingga hipotesa alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. Dengan ditolaknya Ha berarti secara parsial Kedisiplinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kedisiplinan terhadap variabel kinerja karyawan.

Tabel 2. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	271,865	3	90,622	58,852	,000 ^a
Residual	47,735	31	1,54		
Total	319,6	34			

Ho : Secara bersama-sama variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kedisiplinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Ha : Secara bersama-sama variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kedisiplinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} (58,852) lebih besar > dari F_{tabel} (2,890) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti secara bersama-sama variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Kedisiplinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menerapkan variabel dependen, dimana jika nilai R square mendekati satu maka variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variasi variabel dependen.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,922 ^a	,851	,836

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa koefisien determinasi (Adjusted R square) yang diperoleh sebesar 0,836. Hal ini berarti 83,6% kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kedisiplinan, sedangkan sisanya 16,4 % kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kedisiplinan terhadap kinerja karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kedisiplinan terhadap kinerja karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, Pekanbaru. Dengan demikian pembahasan yang dilakukan adalah untuk melihat signifikansi kontribusi pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kedisiplinan terhadap kinerja karyawan.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan

Dari hasil analisis secara deskriptif,

menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan merupakan faktor yang dianggap baik oleh responden dalam kinerja karyawan. Hasil analisis regresi dan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel Gaya Kepemimpinan yang menunjukkan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan. Yang berarti secara parsial dapat dinyatakan variabel Gaya Kepemimpinan tidak memiliki pengaruh nyata terhadap Kinerja Karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, Pekanbaru yang mana kenaikan ataupun penurunan yang disebabkan oleh perubahan Gaya Kepemimpinan tersebut tidak bersifat signifikan.

Berdasarkan analisis deskripsi variabel Gaya Kepemimpinan indikator arahan yang saya terima telah sesuai dengan yang diharapkan memiliki skor yang paling tinggi. Pemimpin harus memberikan arahan agar semangat kerja karyawan makin meningkat sehingga kenaikan kinerja tercapai dan tujuan perusahaan juga tercapai. Sedangkan indikator struktur posisi yang diberikan perusahaan sesuai dengan posisi karyawan memiliki skor paling kecil. Perusahaan harus menyesuaikan pemberian posisi kerja sesuai kemampuan dengan posisi atau jabatan karyawan agar karyawan bisa bekerja maksimal sehingga berdampak pada kinerjanya yang bisa menguntungkan perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Pramudiya Hardista Kristanto (2015) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan Gaya Kepemimpinan yang diberikan terhadap kinerja karyawan. Dimana kedua penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan berarti dapat dinyatakan jika terjadi peningkatan atau pun penurunan pada variabel Gaya Kepemimpinan maka akan berdampak juga pada peningkatan atau pun penurunan terhadap Kinerja Karyawan secara signifikan.

Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan

Dari hasil analisis secara deskriptif, menunjukkan bahwa Motivasi merupakan faktor yang dianggap baik oleh responden dalam Kinerja Karyawan. Hal ini sejalan dengan hasil analisis regresi dan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel Motivasi yang menunjukkan bahwa variabel Motivasi tidak signifikan. Yang berarti secara parsial dapat dinyatakan jika terjadi peningkatan atau pun penurunan pada variabel Motivasi maka akan mempengaruhi peningkatan atau pun penurunan terhadap Kinerja Karyawan tetapi tidak signifikan.

Berdasarkan analisis deskripsi variabel Motivasi indikator dorongan mencapai tujuan di tempat bekerja tidak mengganggu suasana kerja anda memiliki skor paling tinggi. Dengan demikian tidak mengganggu karyawan dalam bekerja dan karyawan merasa nyaman sehingga

karyawan dapat bekerja dengan maksimal. Sedangkan indikator inisiatif dan kreatifitas tercipta dengan baik memiliki skor paling kecil. Kepedulian terhadap hasil kerja optimal tidak cukup baik. Dimana karyawan menjadi tidak membantu dan tidak berkembang dalam perbaikan kerja sehingga tidak bisa menunjukkan kinerjanya dengan maksimal. Perlu adanya upaya perusahaan untuk selalu menjaga keasrian dan meningkatkan integritas, kreatifitas, inisiatif agar karyawan merasa terdorong, peduli dan bisa bekerja secara maksimal.

Hasil penelitian ini dapat didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Windy Dyah Indryani dan Anindita Budiarti (2016), dari hasil analisis menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif tetapi tidak signifikan dari Motivasi.

Pengaruh Kedisiplinan terhadap Kinerja Karyawan

Dari hasil analisis secara deskriptif, menunjukkan bahwa Kedisiplinan merupakan faktor yang dianggap cukup baik oleh responden dalam Kinerja Karyawan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil analisis regresi dan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel Kedisiplinan yang menunjukkan bahwa variabel Kedisiplinan signifikan. Yang berarti secara parsial dapat dinyatakan jika terjadi peningkatan atau pun penurunan pada variabel Kedisiplinan maka akan mempengaruhi peningkatan atau

pun penurunan terhadap Kinerja Karyawan.

Berdasarkan analisis deskripsi variabel Prestasi Kerja indikator kedisiplinan dan penerapan sesuai SOP yang berkualitas akan meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang inovatif memiliki skor yang paling tinggi. Dengan demikian perusahaan tetap harus menjaga dan bahkan meningkatkan pengawasan kerja dan penerapan sesuai SOP yang berkualitas, sehingga karyawan akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja karena sudah sesuai dengan jalurnya dan juga perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang inovatif juga bisa meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga terjadi peningkatan kinerja karyawan. Sedangkan indikator kehadiran yang diberikan perusahaan menambah kesempatan karyawan untuk kemajuan karirnya memiliki skor paling kecil. Disini kehadiran terhadap karyawan merupakan salah satu faktor penting dan sebagai penilai karyawan. Sehingga jika kehadiran dengan aturan diberikan terhadap karyawan maka karyawan akan berusaha untuk melakukan pekerjaannya dengan baik serta mengurangi tingkat kepedulian dan kesalahan dalam bekerja sehingga terjadi kenaikan kinerja karyawan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Marimin (2011) yang menyatakan bahwa disiplin memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Dimana kedua penelitian ini dapat dinyatakan jika terjadi peningkatan atau pun penurunan pada variabel Kedisiplinan maka akan berdampak juga pada peningkatan atau pun penurunan terhadap Kinerja Karyawan yang hasilnya adalah signifikan.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kedisiplinan terhadap Kinerja Karyawan

Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang digunakan dengan memasukkan semua unsur variabel Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kedisiplinan yang hasilnya menunjukkan adanya pengaruh terhadap Kinerja Karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. Nilai Probabilitas yang diperoleh adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,836 yang memberikan arti bahwa besarnya kontribusi dari variabel-variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 83,6% dan sisanya sebesar 16,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Hal ini cukup memberikan keyakinan bahwa variabel-variabel independen tersebut memberikan pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

Hasil uji ANOVA diperoleh F_{hitung} sebesar

58,852 dengan tingkat signifikan $F = 0,000$. Karena probabilitas yang ditunjukkan lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kinerja Karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, Pekanbaru. Dari hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Kedisiplinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

Hasil penelitian ini dapat didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Arlan Adinata (2011), dari hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari Gaya Kepemimpinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gaya Kepemimpinan sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Oleh sebab itu pemimpin harus memberikan arahan yang baik agar dapat membangkitkan semangat kerja karyawan sehingga kinerja karyawan semakin meningkat. Berdasarkan pengujian secara parsial, hasil penelitian membuktikan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

2. Motivasi juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Perusahaan harus menciptakan inisiatif dan kreatifitas sehingga suasana kerja yang baik, aman dan nyaman agar karyawan dapat bekerja maksimal sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan pengujian secara parsial, hasil penelitian membuktikan bahwa variabel Motivasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel kinerja karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.
3. Kedisiplinan juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Pemberian pujian yang diberikan perusahaan terhadap karyawan bisa meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga akan terjadi peningkatan kinerja karyawan. Berdasarkan pengujian secara parsial, hasil penelitian membuktikan bahwa variabel Kedisiplinan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.
4. Tercapainya tujuan perusahaan tidak terlepas dari sumber daya manusia. Karena itu perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, agar karyawan dapat bekerja secara maksimal. Berdasarkan pengujian secara simultan, hasil penelitian membuktikan bahwa ketiga variabel Gaya

Kepemimpinan, Motivasi dan Kedisiplinan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, M. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Andespa, R. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menabung di Bank Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(1): 43-57.
- Darmanto, D., & Harahap, R.H. (2015). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 5(1): 1-19.
- Ghozali, I., & Chariri, A. I. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Indryan, W. D., & Budiarti, A. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen*, 5(9).
- Liyas, J. N., & Primadi, R. (2017). Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(1): 17-26.

- Mangkunegara, A.A.P. (2008). *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Marimin, A. (2011). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1): 23-37.
- Susila, N. (2008). Pengaruh Kepemimpinan, Disiplin, Motivasi, Pengawasan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai BPPD Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Excellent*, 1(2).
- Priyatno, D. (2008). *Mandiri Belajar SPSS untuk Analisis Data dan Uji Statistik*. Yogyakarta: Mediakom.
- Siagian, S. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sulastri, T. (2007). Hubungan Motivasi Berprestasi dan Disiplin dengan Kinerja Dosen. *Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(1): 13-21.
- Yukl, G. (2010). *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: PT Indeks.

PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI

NOVA SYAFRINA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau

Email: nova.syafrina80@gmail.com

SUDARMIN MANIK

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau

Email: aminmanik82@gmail.com

Abstract

This research was conducted at PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Flamboyan Subdistrict Tapung. The purpose of this study was to determine how much influence the work environment on employee performance at PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Flamboyan Subdistrict Tapung. The population and sample in this study are all employees of PT. Bank Syariah Mandiri Flamboyan Sub-Branch Office, Tapung Subdistrict, totaling 32 people. While the data analysis in this study uses the test of validity, reliability, simple linear regression, test coefficient of determination and t test. The results of this research hypothesis indicate that the work environment has a positive and significant effect on employee performance at PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Flamboyan Subdistrict Tapung. While the influence of the work environment on employee performance at PT. Bank Syariah Mandiri Flamboyan Sub-Branch Office Tapung District is 56.3% and the rest is influenced by other variables not examined in this study

Keywords: Employee Performance, Islamic Banks, Work Environment

PENDAHULUAN

Berkembangnya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan sekitar di masyarakat, membuat perusahaan menginginkan kinerja terbaik dari karyawannya dalam melayani para nasabahnya. Melihat pentingnya karyawan dalam pencapaian tujuan perusahaan maka diperlukan adanya penanganan sendiri terhadap karyawan agar mereka dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan.

Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan

oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya adalah dengan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman untuk para karyawan. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kinerja karyawan. Semakin baik lingkungan kerja yang diberikan oleh perusahaan maka kinerja yang dihasilkan oleh karyawan dapat lebih meningkat. Lingkungan kerja juga merupakan salah satu bentuk motivasi yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Berikut ini adalah

data sarana dan prasarana yang dimiliki PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Tahun 2017:

Tabel 1. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Tahun 2017

No.	Keterangan	Besarnya	Kondisi
1	Jumlah Lantai	2 Lantai	Baik
2	Bentuk Tanah	Persegi	Baik
3	Listrik kapasitas	250 KVA	Baik
4	Telepon	4 lines	2 Rusak
5	Air Conditioning	8 Unit	3 Rusak
6	Genset Kapasitas	90 KVA	Baik
7	Komputer	15 Unit	4 Rusak
8	Air Purifier	1 Unit	Baik
9	Mesin ATM	2 Unit	Baik
10	APAR	1 Buah	Baik
11	Kapasitas Parkir Roda Dua	25 Motor	Baik
12	Kapasitas Parkir Roda Empat	10 Mobil	Baik
13	Meja	18 Buah	5 Rusak
14	Kursi	30 Buah	7 Rusak

Dari tabel 1 dapat dilihat sarana dan prasarana yang disediakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa bagian yang masih perlu direnovasi. Hal ini diharapkan tidak mengganggu pekerjaan yang akan dilakukan oleh para karyawan. Lingkungan kerja karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung masih kurang begitu nyaman karena keterbatasan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan menjadi tidak maksimal. Sebaiknya perusahaan harus lebih arif dalam memperhatikan fasilitas kerja yang dibutuhkan oleh karyawan agar pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dapat sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini juga akan memberikan dampak terhadap kenyamanan nasabah dalam melakukan kegiatan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung.

Dari tabel dibawah ini, dapat dilihat bagaimana gambaran tentang kinerja karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan yang dapat dilihat dari target *marketing funding* dan *lending* dari tahun 2013-2017:

Tabel 2. Data Target dan Realisasi Funding PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2013	8.500.000.000	6.750.000.000	79,41%
2014	10.000.000.000	8.500.000.000	85%
2015	11.500.000.000	10.900.000.000	94,78%
2016	13.000.000.000	9.350.000.000	71,92%
2017	14.500.000.000	12.950.000.000	89,31%

Tabel 3. Data Target dan Realisasi Lending PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2013	20.000.000.000	21.000.000.000	105%
2014	27.000.000.000	24.500.000.000	90,74%
2015	35.000.000.000	30.500.000.000	87,14%
2016	40.000.000.000	34.800.000.000	87%
2017	45.000.000.000	38.675.000.000	85,94%

Dari tabel 2 dan 3 dapat dilihat hasil pencapaian target *funding* dan *lending* setiap tahunnya belum maksimal. Hal ini dapat diindikasikan oleh kurangnya fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan sehingga menghambat pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan. Ini harus menjadi perhatian penting bagi

perusahaan agar kinerja yang dihasilkan dapat lebih maksimal. Adanya kesenjangan antara pendapatan *funding* serta penyaluran *lending* yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung dikarenakan target *lending* yang diberikan oleh perusahaan jauh lebih besar dari target *funding* yang diharapkan oleh perusahaan. Ini disebabkan dengan adanya peningkatan realisasi *lending* diharapkan dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Dana untuk memenuhi target *lending* juga bukan hanya didapat dari realisasi *funding* saja melainkan dari sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan dan uang administrasi yang dikenakan oleh perusahaan terhadap nasabahnya serta kucuran dan yang didapat oleh perusahaan

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat Hasibuan dalam Syafrina (2017). Manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi direalisasi secara daya guna dan adanya kegairahan kerja darisemua tenaga kerja Manullang dalam Manik & Syafrina

(2018).

Sinambela dalam Manik & Syafrina (2018) Manajemen SDM dapat didefinisikan sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Dessler dalam Manik & Syafrina (2018) manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan suatu kebijakan dan praktik yang diperlukan seseorang yang menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seseorang manajemen, mulai dari perekrutan sampai dengan penilaian.

Lingkungan Kerja

Menurut Robbins dalam Manik & Syafrina (2018) lingkungan kerja adalah lembaga-lembaga atau kekuatan diluar yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, lingkungan dirumuskan menjadi dua yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah segala sesuatu diluar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi yang berupa lingkungan sosial dan teknologi. Menurut Rivai (2006:165) Lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di sekitar pegawai yang sedang melakukan pekerjaan itu sendiri. Lingkungan kerja ini akan meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan dan ketenangan. Menurut Nitiseminto (2009:67) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada disekitar para pekerja dan yang dapat

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan kepada karyawan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Menurut Nitiseminto dalam Kusuma (2013:21-23) faktor-faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan, diantaranya:

1. Warna

Merupakan faktor yang paling penting untuk memperbesar efisiensi kerja para pegawai. Khususnya warna akan mempengaruhi keadaan jiwa mereka. Dengan memakai warna yang tepat pada dinding ruangan dan alat-alat lainnya, kegembiraan dan ketenangan bekerja para pegawai akan terpelihara.

2. Kebersihan Lingkungan Kerja

Secara tidak langsung dapat mempengaruhi seseorang dalam bekerja karena apabila lingkungan kerja bersih, maka karyawan akan merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Kebersihan lingkungan bukan hanya berarti kebersihan tempat mereka bekerja, tetapi jauh lebih luas dari pada itu.

3. Penerangan

Dalam hal ini bukan terbatas pada penerangan listrik saja tetapi juga penerangan sinar matahari. Dalam melaksanakan tugas, karyawan membutuhkan penerangan yang cukup, apabila pekerjaan yang dilakukan tersebut menuntut ketelitian.

4. Pertukaran Udara

Pertukaran udara yang cukup akan memberi kesegaran fisik para karyawan, karena apabila ventilasinya cukup maka kesehatan para karyawan akan terjamin.

5. Jaminan Terhadap Keamanan

Jaminan terhadap keamanan menimbulkan ketenangan. Keamanan akan keselamatan diri sendiri sering ditafsirkan terbatas pada keselamatan kerja, padahal lebih luas dari itu termasuk disini keamanan milik pribadi karyawan dan juga konstruksi gedung tempat mereka bekerja. Sehingga akan menimbulkan ketenangan yang akan mendorong karyawan dalam bekerja.

2. Kebisingan

Merupakan suatu gangguan terhadap seseorang karena adanya kebisingan, maka konsentrasi dalam bekerja akan terganggu. Dengan terganggunya konsentrasi ini maka pekerjaan yang dilakukan akan menimbulkan kesalahan atau kerusakan.

3. Tata Ruang

Merupakan penataan yang ada di dalam ruang kerja yang bisa mempengaruhi kenyamanan karyawan dalam bekerja.

Indikator Lingkungan Kerja

Menurut Wirawan (2008:128) indikator lingkungan kerja adalah sebagai berikut:

1. Tempat

Dalam suatu perusahaan hendaknya karyawan yang bekerja mendapat tempat yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas. Seorang tidak mungkin dapat bekerja dengan tenang jika tempat yang tersedia tidak dapat memberikan kenyamanan. Padatnya tempat sama ruang gerak yang sempit dapat mengurangi semangat kerja karyawan dalam melakukan aktivitasnya.

2. Peralatan

Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunakan untuk mendukung kelancaran kerja lengkap/mutakhir. Tersedianya fasilitas kerja yang lengkap, walaupun tidak baru merupakan salah satu penunjang proses dalam bekerja.

3. Proses Kerja

Proses kerja adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab.

Kinerja

Kinerja dapat diartikan sebagai apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh seorang karyawan (pegawai) dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya (Nawawi, 2006:66) Menurut Wibowo (2007:7) kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah

tentang melakukan pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya Gilbert dalam Notoatmodjo (2009:124).

Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2011:67)

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya (Sunyoto, 2012:18). Kinerja diartikan sebagai prestasi, menunjukkan suatu kegiatan atau perbuatan dan melaksanakan tugas yang dibebankan. Pengertian kinerja sering diidentikkan dengan prestasi kerja (Supardi, 2013:45).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Tika (2010:122) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja seseorang atau kelompok terdiri dari dua faktor :

1. Faktor *internal* terdiri dari :
 - a. Kecerdasan
 - b. Keterampilan
 - c. Kestabilan emosi

- d. Motivasi
 - e. Persepsi peran
 - f. Kondisi keluarga
 - g. Kondisi fisik
2. Faktor *ekstern* terdiri dari :
- a. Peraturan ketenagakerjaan
 - b. Keinginan pelanggan
 - c. Pesaing
 - d. Nilai-nilai sosial
 - e. Serikat buruh
 - f. Kondisi ekonomi

Indikator Kinerja Karyawan

Untuk memudahkan pengkajian kinerja karyawan, Mangkunegara (2011) mengemukakan indikator-indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas Kerja

Kualitas kerja terdiri dari ketepatan, ketelitian, keterampilan dan kebersihan karyawan dalam melakukan pekerjaan

2. Kuantitas

Kuantitas kerja terdiri dari *output* serta seberapa cepat bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan.

3. Dapat Tidaknya Diandalkan

Terdiri dari seberapa besar karyawan bisa mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati dan kerajinan karyawan dalam bekerja.

4. Sikap

Sikap terhadap perusahaan serta karyawan lainnya dalam melakukan pekerjaan serta

kerjasama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.

Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja

Menurut Nitisemito (2009:66) lingkungan kerja dapat berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap kinerja yang dilakukan oleh para karyawan dan perusahaan. Menurut McClelland dalam Mangkunegara (2011:68) menyatakan bahwa pegawai (karyawan) akan mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi yang perlu dimiliki oleh pegawai (karyawan) harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri selain dari lingkungan kerja. Hal ini karena motif berprestasi yang ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut menunjang maka kinerja akan lebih mudah. Oleh karena itu, kembangkanlah motif berprestasi dalam diri dan manfaatkan serta ciptakan situasi yang ada pada lingkungan kerja guna mencapai kinerja maksimal.

Menurut Halim (2012:34-35) lingkungan kerja yang mendukung akan dapat mempermudah karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kondisi lingkungan kerja yang aman, nyaman serta tersedianya fasilitas yang memadai bagi para karyawan akan mampu mempengaruhi bagi para karyawan untuk dapat lebih baik dalam bekerja dan hal tersebut akan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sedangkan

menurut Sofyan (2013:69) lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja yang diberikan oleh karyawan. Sehingga setiap perusahaan haruslah mengusahakan lingkungan kerja yang sedemikian rupa agar memberikan pengaruh positif terhadap pekerjaan yang dilakukan karyawan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung yang beralamat di Jalan Raya Tapung - Petapahan No. 54 Tanjung Sawit, Tapung, Gading Sari Kabupaten Kampar. Adapun jenis data yang penulis kumpulkan dalam penulisan adalah: 1) Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari objek penelitian melalui kuisisioner dan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung. 2) Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari sumber data yang ada kaitannya dengan penelitian ini berupa data yang sudah tersedia seperti data jumlah karyawan, struktur organisasi dan aktifitas perusahaan serta data lainnya yang mendukung analisa dalam penelitian ini.

Cara pengumpulan data sebagai berikut (Sugiyono, 2010:106): a) Kuisisioner, adalah daftar pertanyaan yang disebarakan kepada seluruh karyawan pada PT. Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan digunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomenal sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Jawaban setiap item yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dan sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2010:107). 2) Wawancara, adalah mengadakan wawancara langsung pada pimpinan dan karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung tentang berbagai informasi/data, untuk bahan analisa yang diperlukan dalam penulisan.

Populasi dalam penelitian ini dilakukan kepada seluruh karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung yang berjumlah 32 orang. Teknik pengambilan sampel ditentukan secara sensus yaitu mengambil seluruh populasi yang digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi < 100. Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung yang berjumlah 32 orang.

Analisis data adalah analisis regresi linear sederhana yaitu untuk mengukur besarnya pengaruh

antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi dalam regresi linear sederhana yang digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model dan mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R² sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R² sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen (Priyatno, 2008:79).

Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen

(X) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Menurut Priyatno (2008:85) langkah-langkah pengujian koefisien regresi sebagai berikut :

1. Merumuskan Hipotesis

Ho : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan.

Ha : Secara parsial ada pengaruh

2. Menentukan tingkat signifikansi menggunakan

$\alpha = 5\%$

3. Menentukan t hitung dan menentukan t tabel.

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 2.5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$.

4. Kriteria pengujian dan membandingkan t

$t_{hitung} > t_{tabel}$

Ho diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$

Ho ditolak bila $t_{hitung} > t_{tabel}$

HASIL

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung, maka digunakan koefisien determinasi (R²). Setelah dilakukan pengolahan data dapat dilihat hasilnya pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil R-Square (Koefisien Determinan)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.751 ^a	0.563	0.549	3.65838

Dari tabel 4 dapat diperoleh nilai *R-square* (koefisien determinasi) sebesar 0,563. Hal ini berarti lingkungan kerja memberikan kontribusi sumbangan pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung sebesar 56,3% sedangkan sisanya sebesar $(100\% - 56,3\%) = 39,7\%$ dipengaruhi oleh variabel lain seperti: kompensasi, kompetensi, kepuasan kerja, dan lain sebagainya.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independen* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *dependen*. Untuk melihat hasil uji t dapat dilihat hasilnya dari tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.029	5.912		2.204	.035
Lingkungan Kerja	.974	.157	.751	6.222	.000

Dari tabel 5 dapat terlihat bahwa nilai t_{hitung} lingkungan kerja sebesar 6,222. Tingkat signifikan penelitian ini adalah 5% atau 0,025 (Uji 2 sisi). Untuk melakukan uji t maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tingkat signifikan penelitian ini adalah 5% atau 0,025 (Uji 2 sisi). Berarti di dapat t_{tabel} sebesar 2,042.
2. Dapat dibuktikan bahwa: lingkungan kerja (X) = dengan t_{hitung} 6,222 lebih besar dari

t_{tabel} 2,042 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung, maka berikut ini penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Variabel lingkungan kerja (X) dengan t_{hitung} 6,222 lebih besar dari t_{tabel} 2,042 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Flamboyan Kecamatan Tapung.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Maka penelitian ini dapat menguatkan penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andespa, R. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menabung di Bank Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(1): 43-57.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dharma, S. (2012). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, I. (2005). *Analisis Multivarience dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Handoko, T.H. (2011). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, M.S. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mangkunegara, A. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manik, S. & Syafrina, N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan pada Bank Danamon Simpan Pinjam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(1): 49-60.
- Manik, S. & Syafrina, N. (2018). Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 15(1): 1-6.
- Manik, S. & Syafrina, N. (2018). Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Guru pada Sekolah Dasar Negeri 009 Kuala Terusan. *Eko dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 9(3): 158-167.
- Manik, S., & Syafrina, N. (2018). Pengaruh Insentif dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Grand Zuri Duri. *Daya Saing*, 4(1): 10-16.
- Nawawi, H. (2006). *Evaluasi Dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nitisemito, A.S & Burhan, U. (2009). *Wawasan Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notoatmodjo, S. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Priyatno, D. (2008). *Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution)*. Yogyakarta: MediaKom.
- Rivai, V. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2012). *Teori Kuesioner dan Analisa Data Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS.
- Supardi. (2013). *Kinerja Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafrina, N. (2017). Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Suka Fajar Pekanbaru. *Eko dan Bisnis: Riau*

- Economic and Business Review*, 8(4): 1-12.
- Tika, M.P. (2010). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. (2007). *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wilson, B. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Wirawan. (2008). *Budaya dan Iklim Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

PENGARUH *PEOPLE, PROCESS, DAN PHYSICAL EVIDENCE* TERHADAP KEPUASAN ATAS PELAYANAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA PADANG

SIGIT SANJAYA

Universitas Putra Indonesia "YPTK"

E-mail: sigitsanjaya@upiypk.ac.id

NILA PRATIWI

Universitas Putra Indonesia "YPTK"

E-mail: nilapратиwi8@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze: 1) the effect of people on the satisfaction of services in Islamic banking in Padang city 2) the effect of process on satisfaction of services in Islamic banking in Padang city 3) the effect of physical evidence on satisfaction of services in Islamic banking in Padang city. This study classified as descriptive causative research. The population in this study are custome in Islamic banking in Padang city. Determination of the number of samples using the Hair's method. The distribution of questionnaires used accidental sampling techniques. Data were collected through questionnaires using a Likert scale and data analysis using PLS SEM. The results of this study indicate that: 1) there is a significant positive effect between people on satisfaction of service to Islamic banking in the city of Padang. 2) there is no significant effect between the process on satisfaction of serviceso in Islamic banking in Padang city 3) there is no significant effect between physical evidence on satisfaction of services in Islamic banking in Padang city.

Keywords: People, Physical Evidence, Process, Satisfaction, Service

PENDAHULUAN

Nasabah sudah semakin kritis terhadap pelayanan diperbankan, hal ini makin terbukti dengan makin banyaknya protes berupa tulisan surat pembaca di media masa dan komplain langsung kepada petugas perbankan atas pelayanan yang dirasakan kurang memuaskan. Pelayanan yang tidak memuaskan tersebut bisa berasal dari teller bank, *customer services* atau prosedur bank syariah yang berbelit-belit, dan bisa juga berasal dari infrastruktur bank syariah yang tidak memadai. Kondisi inilah yang menyebabkan perlunya pelayanan yang memuaskan kepada nasabah dan mutlak

dilakukan oleh bank syariah agar nasabah makin terkesan. Ndubisi & Chan (2005:543) menyatakan "*it costs five times more to acquire a customer than to retain a customer*" artinya bahwa biaya untuk memperoleh pelanggan atau nasabah baru lima kali lebih besar daripada mempertahankan nasabah. Adalah pertimbangan utama bank syariah dalam mempertahankan nasabahnya, yakni karena semakin mahal biaya perolehan nasabah baru dalam situasi kompetisi yang semakin ketat.

Menurut Fornell 1992 dalam Tjiptono (2008:37) *customer satisfaction* merupakan faktor yang menimbulkan loyalitas pelanggan (*loyalty*).

Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) diartikan sebagai tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan apa yang dia terima (produk) dan harapannya (Umar, 2005:50). Selain kepuasan, loyalitas juga dibentuk oleh bauran pemasaran Zeithaml dalam Lien-Li (2012:2-3). Bauran pemasaran merupakan *tools* untuk menciptakan kepuasan individual maupun organisasi (Kotler & Keller, 2012: 27).

TINJAUAN PUSTAKA

Kepuasan atas Pelayanan

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya (Umar, 2005:65). Sedangkan menurut Yamit (2005:78) kepuasan konsumen merupakan evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Dalam konsep kepuasan konsumen, ada 2 elemen yang mempengaruhi yaitu harapan dan kinerja. Harapan adalah pikiran konsumen tentang apa yang akan di terimanya apabila ia mengkonsumsi produk. Kinerja adalah peepsi konsumen terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk.

Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam pearingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli

kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali dikemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan poin terbesar dari volume penjualan perusahaan.

Menurut Kotler (2012:27): "*Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational goals...Markete apply the marketing mix – the set of marketing tools used to puue marketing objectives in the target market*".

Teori Kotler menyatakan bahwa kepuasan dibentuk dengan *tools marketing* yaitu *marketing mix* (bauran pemasaran) yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian Sarker, Aimin, & Begum (2012), Rakhsa (2011) memperkuat teori yang menyatakan bahwa *marketing mix* (bauran pemasaran) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah.

Indikator kepuasan atas pelayanan menurut Aritonang (2005:23-31): profesionalisme pelayanan, ketanggapan pelayanan, keberadaan pelayanan, dan ketepatan waktu pelayanan profesionalisme pelayanan mencakup keterbukaan dalam memberikan informasi, kecukupan karyawan dalam melayani nasabah, keahlian karyawan dalam melayani nasabah, keberadaan teknologi

yang memadai. Ketanggapan pelayanan mencakup ketepatan pengambilan keputusan oleh karyawan, ketelitian dalam melakukan pelayanan, kemudahan urusan nasabah, keutamaan kepentingan nasabah. Keberadaan pelayanan mencakup ketersediaan fasilitas transaksi setiap waktu dan kelengkapan jasa yang ditawarkan. Ketepatan waktu pelayanan mencakup ketepatan jam kerja operasional.

People

Menurut Zeithaml 2000 dalam Tjiptono (2008:341) orang (*people*) adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-elemen dari '*people*' adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa (*service encounter*)."

People merupakan aset utama dalam industri jasa, terlebih lagi *people* yang merupakan karyawan dengan *performance* tinggi. Kebutuhan konsumen terhadap karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. Kemampuan *knowledge* (pengetahuan) yang baik, akan menjadi kompetensi dasar dalam internal perusahaan dan pencitraan yang baik di luar. Faktor penting lainnya dalam *people* adalah *attitude* dan *motivation* dari karyawan dalam industri jasa. *Moment of truth* akan

terjadi pada saat terjadi kontak antara karyawan dan konsumen. *Attitude* sangat penting, dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, seperti penampilan karyawan, suara dalam bicara, *body language*, ekspresi wajah, dan tutur kata. Sedangkan motivasi karyawan diperlukan untuk mewujudkan penyampaian pesan dan jasa yang ditawarkan pada level yang diekspetasikan. Indikator *people* menurut Gasperz (2012:87) ialah: keramahan karyawan, kecepatan karyawan, kesungguhan karyawan dan kemampuan komunikatif karyawan.

Proses

Menurut Zeithaml (2007:252) proses adalah "*The actual procedures, mechanism and flow of activities by which the service is delivered the service delivery and operating system*". Zeithaml menyatakan bahwa proses ialah semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Untuk perusahaan jasa, kerja sama antara pemasaran dan operasional sangat penting dalam elemen proses ini, terutama dalam melayani segala kebutuhan dan keinginan konsumen. Jika dilihat dari sudut pandang konsumen, maka kualitas jasa diantaranya dilihat dari bagaimana jasa menghasilkan

funksinya.

Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan sering memasarkan sistem penyerahan jasa sebagai bagian dari jasa itu sendiri. Selain itu, keputusan dalam manajemen operasi adalah sangat penting untuk suksesnya pemasaran jasa. Seluruh aktifitas kerja adalah proses, proses melibatkan prosedur-prosedur, tugas-tugas, jadwal-jadwal, mekanisme-mekanisme, aktivitas-aktivitas dan rutinitas-rutinitas dengan produk jasa di salurkan pada pelanggan. Identifikasi manajemen proses sebagai aktifitas terpisah adalah prasyarat bagi perbaikan jasa. Pentingnya elemen proses ini khususnya dalam bisnis jasa disebabkan oleh peediaan jasa yang tidak dapat disimpan.

Menurut Gasperz (2012:87), indikator proses ialah: prosedur perolehan jasa, prosedur resolusi masalah. Prosedur perolehan jasa meliputi: kemudahan mendaftar menjadi nasabah baru, kemudahan proses pendaftaran dan kecepatan nasabah dalam mendapat pertolongan. Prosedur resolusi masalah meliputi: kemudahan bank syariah dalam memberikan solusi, dan kemudahan bank syariah dalam penanganan masalah.

Bukti fisik (*Physical Evidence*)

Menurut Zeithaml 2000 dalam Tjiptono (2008:78) menyatakan bahwa sarana fisik merupakan suatu hal yang secara nyata

turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk didalam sarana fisik antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan *service* yang diberikan seperti tiket, sampul, label dan lain sebagainya.

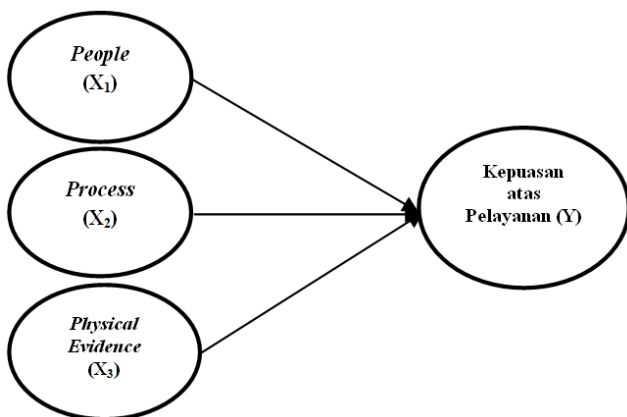
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tata letak yang mencakup: desain dalam ruangan bank syariah, desain luar ruangan bank syariah. Kelengkapan sarana pendukung antara lain: kelengkapan alat bank, ketersediaan ruang yang nyaman untuk nasabah, ketersediaan ruang tunggu pengunjung, ketersediaan toilet yang bersih untuk pengunjung dan ketersediaan parkir yang memadai.

Kerangka Konseptual

Karyawan yang ramah, cepat dan yang memiliki kemampuan komunikatif yang baik akan mampu menyediakan jasa dan layanan yang berkualitas kepada nasabah sehingga akan tercipta kepuasan. Interaksi yang baik dan teknik pada titik kontak dengan nasabah akan membuat nasabah terkesan. Proses merupakan seluruh aktivitas kerja yang akan menyampaikan jasa kepada nasabah. Melalui kecepatan proses yang diberikan dalam menangani masalah atau keluhan nasabah, akan memberikan kepuasan kepada nasabah,

karena nasabah merasa diperhatikan dan akan tercipta kepuasan atas pelayanan yang diberikan.

Bukti fisik diperlukan untuk memperkuat keberadaan jasa itu, karena jasa yang diberikan kepada nasabah memerlukan fasilitas pendukung agar terciptanya penyampaian jasa yang baik. Jika nasabah merasa puas atas ketersediaan bukti fisik yang memadai yang diberikan bank syariah, maka akan tercipta kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Adapun beberapa variabel dapat digambarkan dalam kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ditetapkan maka penelitian ini tergolong penelitian dekriptif kausatif dimana hasil penelitian ini memaparkan fakta di lapangan dan menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini akan digunakan telaah statistika yang tepat untuk tujuan hubungan sebab akibat

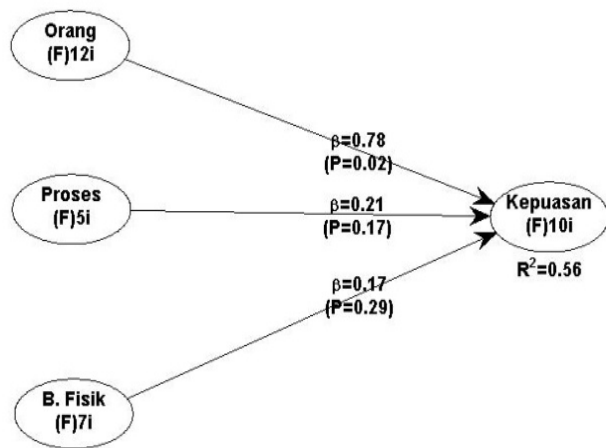
dengan menggunakan regresi, yaitu dengan menggunakan alat analisis PLS (*Partial Least Square*).

Dalam penelitian ini populasi adalah nasabah perbankan syariah di kota Padang. Jumlah sampel ditentukan dengan metode Hair dimana jumlah indikator dikalikan lima, sehingga jumlah sampel 105. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Untuk mengumpulkan data primer, maka pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Kuesioner diberikan kepada nasabah secara tertutup agar dapat diisi secara objektif. Kuesioner yang akan diisi tersebut telah dilengkapi dengan alternatif jawaban dan responden dapat memilih jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman dan keadaan yang ditemui di lapangan.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif umum untuk menghitung distribusi frekuensi dan tingkat capaian responden (TCR). Kemudian dilakukan analisis SEM-PLS untuk mengukur pengaruh *People, Process* dan *Physical Evidences* terhadap Kepuasan atas Pelayanan pada Perbankan Syariah di kota Padang.

HASIL

Analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) dilakukan dengan menggunakan Warp-PLS 3.0. dan hasilnya adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Output Warp PLS

Tabel 1. Model Fit Indices

Model Fit Indices and P Values
APC = 0.387, P < 0.001
A = 0.563, P < 0.001
AVIF = 3.126, Good If < 5

Bagian model Fit Indices and P menampilkan hasil tiga indikator fit yaitu *average path coefficient* (APC), *average R-squared* (A) dan *average variance inflation factor* (AVIF). Nilai P untuk APC dan A harus lebih kecil dari 0,05 atau berarti signifikan. Selain itu, AVIF sebagai indikator multikolinearitas harus lebih kecil dari 5. Hasil output menunjukkan bahwa kriteria *goodnes of fit* model telah terpenuhi yaitu dengan nilai APC 0,350 dan A 0,283 serta signifikan. Nilai AVIF sebesar 3,157 juga telah memenuhi kriteria.

Pengaruh antara *People* terhadap Kepuasan atas Pelayanan

Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi $p = 0,02$ dan koefisien $\beta = 0,78$. Hipotesis yang diajukan diterima pada $\alpha = 0,05$. Dengan demikian variabel *people*

berpengaruh terhadap kepuasan atas pelayanan.
Pengaruh antara Proses terhadap Kepuasan atas Pelayanan

Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh signifikansi $p = 0,17$ dan koefisien $\beta = 0,21$. Hipotesis yang diajukan ditolak pada $\alpha = 0,05$. Dengan demikian variabel proses tidak berpengaruh terhadap kepuasan atas pelayanan.

Pengaruh antara Bukti Fisik terhadap Kepuasan atas Pelayanan

Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh signifikansi $p = 0,29$ dan koefisien $\beta = 0,17$. Hipotesis yang diajukan ditolak pada $\alpha = 0,05$. Dengan demikian variabel bukti fisik tidak berpengaruh terhadap kepuasan atas pelayanan.

PEMBAHASAN

Pengaruh *People* terhadap Kepuasan atas Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai sig $p = 0,02$ dan koefisien β atau pengaruh langsung sebesar 0,78. Hipotesis yang telah diajukan diterima pada $\alpha = 0,05$. Dengan demikian variabel orang berpengaruh terhadap kepuasan atas pelayanan. Berdasarkan deskripsi variabel orang yang mencakup keramahan karyawan, kecepatan karyawan, kesungguhan karyawan dan kemampuan komunikatif karyawan dengan dengan kategori baik. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu mempertahankan

strategi *people*, jika perlu lebih ditingkatkan lagi agar meningkat juga kepuasan atas pelayanan pada perbankan syariah di kota Padang. Hasil penelitian ini sejalan belakang dengan penelitian Haryoso (2009), Thamrin (2012), Mucai, Mbaeh & Noor (2013), dan Sarker, Aimin, & Begum (2012) menunjukkan bahwa *people* berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan.

Pengaruh Proses terhadap Kepuasan atas Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai sig p = 0,173 dan koefisien β atau pengaruh langsung sebesar 0,21. Hipotesis yang telah diajukan ditolak pada $\alpha = 0,05$. Dengan demikian proses tidak berpengaruh terhadap Kepuasan atas pelayanan pada perbankan syariah di kota Padang

Berdasarkan deskripsi variabel Proses yang mencakup prosedur perolehan jasa dan pemberian solusi dari masalah yang ada, tingkat capaian responden walaupun berkategori baik belum mampu menciptakan kepuasan pengunjung. Hasil penelitian ini bertolak belakang dari penelitian Haryoso (2009), Thamrin (2012), Mucai, Mbaeh, & Noor (2013), dan Sarker, Aimin, & Begum (2012) menunjukkan bahwa proses berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan.

Pengaruh Bukti Fisik terhadap Kepuasan atas Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan

diperoleh nilai sig p < 0,29 dan koefisien β atau pengaruh langsung sebesar 0,17. Hipotesis yang telah diajukan diterima pada $\alpha = 0,05$. Dengan demikian Bukti Fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan atas Pelayanan pada perbankan syariah di kota Padang.

Berdasarkan deskripsi variabel yang mencakup tata letak dan kelengkapan sarana pendukung, diketahui bahwa bukti fisik perbankan syariah di kota Padang sudah termasuk baik namun belum mampu menciptakan kepuasan atas pelayanan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Johannes (2009), Haryoso (2009), Thamrin (2012), Mucai, Mbaeh, & Noor (2013), dan Sarker, Aimin, & Begum (2012) yang menemukan bahwa bukti fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan analisis SEM (*Structural Equation Modeling*) dari pengaruh *people*, *process* dan *physical evidences* pada perbankan syariah di kota Padang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *People* atau pelaku penyedia jasa berpengaruh signifikan terhadap kepuasan atas pelayanan pada perbankan syariah di kota Padang.
2. *Process* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan atas pelayanan pada perbankan

syariah di kota Padang.

3. *Physical Evidence* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan atas pelayanan pada perbankan syariah di kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andespa, R. (2016). Strategi Industri Perbankan di Sumatera Barat: Pemilihan Segmentasi Pasar Untuk Menciptakan Pelayanan yang Memuaskan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1): 47-62.
- Aritonang, L. R., & Lerbin, R. (2005). *Kepuasan Pelanggan: Pengukuran dan Penganalisisan dengan SPSS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gasperz, V. (2012). *All in One Management Toolbook*. Bogor: Tri-Al Bros Publishing.
- Haryoso & Suhartono. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bauran Pemasaran terhadap Loyalitas Anggota dengan Kepuasan Anggota sebagai Variabel Intervening. *Wacana*, 12(2): 1-20.
- Johannes, J., Raf, M., & Lukman, M. (2012). Analisis Kepuasan Nasabah Prioritas Berdasarkan Bauran Pemasaran (Kasus Pada PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Jambi). *Jurnal Manajemen Pemasaran Modern*, 10(3): 35-45.
- Kotler, P & Kevin L. K. (2012). *Marketing Management*. London: Pretince Hall.
- Lovelock, C., & Lauren, K. W. (2007). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Indeks.
- Muca, G. P., Mbaeh, E. K., & Noor, A. I. (2013). Extended Marketing Mix and Customer's Satisfaction in Classified Non-Star Hotels in Meru Municipality Kenya. *International Review of Management and Business Research*, 2(3): 691-696.
- Ndubisi, N. O., & Chan, K. W. (2005). Factorial and Discriminant Analyses of the Underpinnings of Relationship Marketing and Customer Satisfaction. *The International Journal of Bank Marketing*, 23(7): 542-557.
- Rakhsa, R & Majidazar, M. (2011). Evaluation of Effectiveness Marketing Mix on Consumer Satisfaction and Loyalty: (Case Study: The East Azarbaijan Pegah Diary Company in Tabriz, Iran). *Middle-East Journal of Scientific Research*, 10(5): 755-763.
- Sarker, M. A. H., Aimin, W., & Begum, S. (2012). Investigating the Impact of Marketing Mix Elements on Tourists 'Satisfaction: An Empirical Study on East Lake. *European Journal of Business and Management*, 4(7): 273-282.
- Thamrin, H. M. (2012). The Role of Service Marketing Mix and Ship Service Quality towards Perceived Value and its Impact to Ship Passanger's Satisfaction in Indonesia. *Global Journal of Management and Business Research*. 12(3): 97-101.
- Tjiptono, F. (2008). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.

Zeithaml, A, Parasuraman. (2007). Reassessment of Expectations as Comparison Standard in Measuring Service Quality: Implication for Future Research. *Journal of Marketing*. 5(22): 251-260.

PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DAN MAQASYID SYARIAH INDEKS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING

YUSUF FAISAL

Universitas Batam

E-mail: yusuffaisal.faisal@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to see the effect of bank health, Sharia Maqasyid Index on the profit growth of Islamic banks in Indonesia in 2011 - 2017 with Good Corporate Governance as a moderating variable. By using secondary data from Islamic bank financial statements and good corporate governance reports from 2011-2018. Analysis tools use Moderated Regression Analysis (MRA). Based on the results of the study that the NPF variable has an insignificant effect on earnings growth. The results showed that the FDR variable had an insignificant effect on earnings growth. Thus this study rejects the second hypothesis which states that FDR has a significant effect on earnings growth. This is evidenced by the results of hypothesis testing with a probability value greater than 5% significance value ($0.578 > 0.05$). ROA variable has a significant effect on profit growth. Thus this study accepts the third hypothesis which states that ROA has a significant effect on profit growth. This is evidenced by the results of hypothesis testing with a probability value smaller than the 5% significance value ($0.000 < 0.05$). It is known that the NIM variable has a significance of 0.874 greater than 0.05 in other words that the NIM variable partially has no effect on profit growth. CAR variable has no effect on profit growth obtained a significance value > 0.05 , which is 0.360. Regression coefficients for Shariah Maqasyid Index (MSI) are 6,422 and positive sign, which means if the MSI variable experiences a 1% increase, then profit growth will increase by 6,422. Coefficient is positive means that there is a positive relationship between MSI and profit growth, the higher the MSI ratio conducted by the company, the higher the company's profit growth.

Keywords: Coporate Governance, Maqasyid Sharia Index, Profit Growth

PENDAHULUAN

Industri perbankan dan keuangan Islam atau *Islamic banking and finance* (IBF) telah membuat kemajuan luar biasa selama beberapa dekade terakhir. *Islamic banking and finance* (IBF) didirikan berdasarkan etika yang mencakup larangan atas bunga dan kegiatan berbasis eksploitatif dan spekulatif. serta promosi berbagi risiko, inovasi, kewirausahaan. *Islamic banking and finance* (IBF) memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dan investor mereka dalam mengelola bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sementara pada saat yang sama memberikan laba berdasarkan tingkat pengembalian laba rugi yang wajar. Industri berbasis Islam ini dipercayakan oleh pemegang saham untuk memaksimalkan nilai investasi mereka, dengan cara yang sesuai syariat (Archer,

Karim, dan Al-Deehani, 1998). Produk dan juga jasa keuangan syariah, bank syariah wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional, yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa tersebut oleh lembaga-lembaga syariah di Indonesia.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat perkembangan industri keuangan syariah di dunia. Untuk dapat terus tumbuh dan berkembang, tentunya bank syariah harus diberikan perhatian khusus dan sungguh-sungguh dengan senantiasa menjaga kondisi kesehatannya. Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, tidak hanya bagi manusia tetapi juga penting untuk keberlangsungan kehidupan lembaga keuangan. Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya. Adapun penilaian tingkat kinerja perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 13 Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan baru yakni berdasarkan pendekatan (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individual ataupun konsolidasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kesehatan Bank Syariah

Kesehatan bank diartikan kemampuan

suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 29, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 26/5/BPPP Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 23/21/BPPP. Metode atau cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut kemudian dikenal dengan metode CAMEL. Dilanjutkan dengan perhitungan tingkat kepatuhan bank pada beberapa ketentuan khusus, metode tersebut akhirnya lebih dikenal dengan sebutan CAMEL *Plus* (Lukman, 2003). Analisa metode CAMELS memiliki beberapa indikator yaitu dari aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan sensitifitas.

Seiring dengan perkembangan produk perbankan yang semakin kompleks, penilaian kesehatan bank mulai mengalami penyempurnaan. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan

baru tentang penilaian tingkat kesehatan bank untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya yang menggunakan metode CAMELS. Peraturan BI Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yaitu hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank menggunakan *Risk Based Banks Rating* (RBBR) atau pada penelitian ini disebut juga RGEC.

Tingkat kesehatan bank diukur melalui peringkat komposit yang diatur dalam PBI 13/1/PBI/2011 Tentang Kesehatan Bank. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat tiap faktor yang disebutkan sebelumnya. Menurut Peraturan BI Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian kesehatan bank dapat menggunakan beberapa faktor. Berdasarkan PBI Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Pasal 7 yang berisi tentang penilaian terhadap profil risiko terhadap delapan jenis risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Maqasyid Syariah Indeks

Maqashid Syariah Indeks adalah model pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik

perbankan syariah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep tujuan syariah berdasarkan (Zahrah, 1997:17). Sebagaimana beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan tujuan syariah yang ditetapkan oleh Zahrah (1997:18) dalam penelitiannya, maka secara spesifik perbankan syariah memiliki tujuan utama yang harus dicapai sebagai berikut:

1. *Tahdhib al-Fardh* (Pendidikan Individu)

Tujuan pertama mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya perbankan syariah menyebarkan pengetahuan dan kemampuan serta menanamkan nilai-nilai yang menunjang pembangunan ruhaniyah.

2. *Iqamah al-'Adl* (Perwujudan Keadilan)

Tujuan kedua yaitu perbankan syariah harus meyakinkan bahwa setiap transaksi dalam aktivitas bisnis dilakukan secara adil termasuk produk, harga, ketentuan dan kondisi kontrak. Selain itu perbankan syariah juga harus meyakinkan bahwa setiap bisnis perbankan bebas dari elemen-elemen negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan seperti riba.

3. *Jalk Al maslahah* (Kepentingan Masyarakat)

Tujuan ketiga yaitu perbankan syariah harus membuat prioritas mengenai aktivitas bisnisnya mana yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tujuan ini termasuk aktivitas yang mencakup kebutuhan

dasar masyarakat seperti investasi disektor-sektor vital, pembiayaan rumah, dan sebagainya.

Good Corporate Governance

Pengertian *good corporate governance* menurut Bank Dunia (*World Bank*) adalah sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2009). *Good Corporate Governance* (GCG) adalah mekanisme penting yang diharapkan dapat mendorong praktik bisnis yang sehat. Penilaian faktor *good corporate governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (Mulazid, 2016).

Penilaian pada faktor GCG berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menggunakan penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit internal, penerapan fungsi audit ekstern, fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar,

transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, dan rencana strategis bank.

Pertumbuhan Laba

Fokus utama laporan keuangan adalah laba. Laba merupakan hasil operasi suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Informasi laba ini sangat berguna bagi pemilik, investor. Laba yang mengalami peningkatan merupakan kabar baik (*good news*) bagi investor, sedangkan laba yang mengalami penurunan merupakan kabar buruk (*bad news*) bagi investor. Bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis, laba mengacu pada penerimaan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Pengeluaran ini meliputi upah untuk menyewa tenaga tenaga kerja, bunga untuk modal, sewa tanah dan gedung serta pengeluaran untuk bahan mentah (Salvatore, 2011). Belkaoui (2007) mengemukakan bahwa laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian adalah penelitian kuantitatif. Selain itu penelitian yang menggunakan untuk penelitian ini adalah studi pustaka. Objek dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah. Dalam pengukuran kesehatan bank menggunakan RGEC, faktor profil risiko yang digunakan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Karena dari semua jenis risiko yang ada, risiko kredit dan risiko likuiditas yang menggunakan pengukuran kuantitatif, sedangkan risiko lain menggunakan metode penilaian risiko yang berbeda. Selain itu bank tidak memberikan data pada laporan keuangan yang mencukupi untuk kebutuhan penelitian ini. Dalam penilaian pada faktor GCG peneliti gunakan sebagai variabel moderating peneliti menggunakan data yang telah tersedia pada laporan tahunan masing-masing bank. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:218).

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel antara lain:

1. Memiliki laporan keuangan mulai 31 Desember 2011 – Desember 2017.
2. Bank dapat memberikan data laporan keuangan kepada peneliti baik secara langsung maupun melalui website perusahaan.

3. Periode laporan keuangan berakhir tanggal 31 Desember.
4. Perbankan Syariah tersebut telah menerapkan *Good Governance* Bank Syariah (GGBS) oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

Sesuai kriteria diatas, maka jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 8 perbankan Syariah. Tahun amatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 tahun berturut-turut dari 2011-2017 sehingga jumlah sampel observasi dalam penelitian ini adalah 56 unit analisis (7 x 8).

HASIL

Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square. Berikut hasil analisis uji koefisien determinasi:

Tabel 1. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.590 ^a	0.348	0.268	125.02397

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0.268. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dapat

menjelaskan variabel dependen sebesar 26,8% dan sisanya 73,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Uji F

Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
Regression	425803.804	70967.301	4.641	.001 ^b
Residual	749269.119	15291.207		
Total	1175072.923			

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat signifikansi uji tersebut sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari derajat kesalahan yaitu 5% atau dapat ditulis ($\alpha = 0,001$) < 0,05. Dari hasil uji F ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka variabel independen (NIM, NPF, FDR, ROA, CAR, MSI) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (pertumbuhan laba).

Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara variabel independen (NPF, FDR, ROA, NIM, CAR, MSI) terhadap variabel dependen (pertumbuhan laba). Berikut hasil uji regresi linier berganda berupa tabel coefficients.

Tabel 4. Uji t

Model	t	Sig.
(Constant)	-0.136	0.893
NPF	-1.441	0.156
FDR	-0.561	0.578
ROA	3.837	0.000
NIM	-0.160	0.874
CAR	-0.925	0.360
MSI	0.981	0.331

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan:

1. Terlihat nilai sig. untuk NPF adalah 0,156. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,105 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_1 mempunyai t_{hitung} yakni -1.441 dengan $t_{tabel} = 1,672$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa X_1 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.
2. Terlihat nilai sig. untuk FDR adalah 0,578. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,578 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_2 mempunyai t_{hitung} yakni -0,561 dengan $t_{tabel} = 1,672$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa X_2 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

3. Terlihat variabel ROA terdapat nilai sig. 0,000 Nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,000 < 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Variabel X_3 mempunyai t_{hitung} yakni 3.837 dengan $t_{tabel} = 1,672$. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.
4. Terlihat nilai sig. untuk NIM adalah 0,874. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,875 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_4 mempunyai t_{hitung} yakni -0,160 dengan $t_{tabel} = 1,672$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_4 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa X_4 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.
5. Terlihat nilai sig. untuk CAR adalah 0,360. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,360 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_5 mempunyai t_{hitung} yakni -0,925 dengan $t_{tabel} = 1,672$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_5 tidak memiliki kontribusi

terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa X_5 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

6. Terlihat nilai sig. untuk MSI adalah 0,331. Nilai sig. lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,331 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel X_6 mempunyai t_{hitung} yakni 0,981 dengan $t_{tabel} = 1,672$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel X_6 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X_6 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan MSI tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Moderate Regression Analysis (MRA)

Pengujian variabel moderator dalam penelitian ini menggunakan metode uji residual:

GCG tidak Memoderasi NPF terhadap Pertumbuhan Laba

Tabel 5. Hasil Uji Variabel Moderating GCG, NPF dan Pertumbuhan Laba

Model	t	Sig.
(Constant)	-0.662	0.511
NPF	0.927	0.358
GCG	0.889	0.378
Moderating1	-1.198	0.236

Nilai sig. untuk Moderasi 1 adalah 0,236. Nilai sig. lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,236 > 0,05$, maka H_1 ditolak

dan H_0 diterima. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa GCG bukan moderator, ini disebabkan karena dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi Z^*X pada output kedua, tidak ada satupun yang signifikan.

GCG Memoderasi FDR terhadap Pertumbuhan Laba

Tabel 6. Hasil Uji Variabel Moderating GCG, FDR, Pertumbuhan Laba

Model	t	Sig.
(Constant)	1.996	0.051
FDR	-1.921	0.060
GCG	-2.013	0.049
Moderating2	1.912	0.041

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai sig. untuk Moderasi 2 adalah 0,041. Nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,041 < 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa GCG merupakan Pure Muderator, hal ini disebabkan karena dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi Z^*X pada output kedua, salah satunya signifikan.

GCG tidak Memoderasi ROA terhadap Pertumbuhan Laba

Tabel 7. Hasil Uji Variabel Moderating GCG, ROA, Pertumbuhan Laba

Model	t	Sig.
(Constant)	-0.583	0.562
GCG	0.424	0.674
ROA	0.298	0.767
Moderating3	0.068	0.946

Nilai sig. untuk Moderasi 3 adalah 0,946. Nilai sig. lebih besar dari nilai probabilitas

0,05, atau nilai $0,946 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa GCG merupakan bukan moderator, hal ini disebabkan karena dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi Z^*X pada output keduanya tidak ada yang signifikan.

GCG tidak Memoderasi NIM terhadap Pertumbuhan Laba

Tabel 8. Hasil Uji Variabel Moderating GCG, NIM, Pertumbuhan Laba

Model	t	Sig.
(Constant)	0.554	0.582
GCG	-0.582	0.563
NIM	-0.362	0.719
Moderating4	0.367	0.715

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai sig. untuk Moderasi 4 adalah 0,715. Nilai sig. lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,715 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa GCG merupakan bukan moderator, hal ini disebabkan karena dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi Z^*X pada output keduanya tidak ada yang signifikan.

GCG Memoderasi CAR terhadap Pertumbuhan Laba

Tabel 9. Hasil Uji Variabel Moderating GCG, CAR, Pertumbuhan Laba

Model	t	Sig.
(Constant)	2.491	0.016
GCG	-2.644	0.011
CAR	-2.530	0.014
Moderating5	2.646	0.011

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai sig. untuk Moderasi 5 adalah 0,011. Nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,011 < 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa GCG merupakan Pure Muderator, hal ini disebabkan karena dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi Z^*X pada output kedua, salah satunya signifikan.

GCG tidak Memoderasi NIM terhadap Pertumbuhan Laba

Tabel 10. Hasil Uji Variabel Moderating GCG, NIM, Pertumbuhan Laba

Model	t	Sig.
(Constant)	-0.326	0.746
GCG	0.276	0.783
MSI	0.431	0.668
Moderating6	-0.387	0.700

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai sig. untuk Moderasi 4 adalah 0,700. Nilai sig. lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,700 > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa GCG merupakan bukan moderator, hal ini disebabkan karena dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi Z^*X pada output keduanya tidak ada yang signifikan.

PEMBAHASAN

NPF merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan. Besarnya NPF mencerminkan

tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank Adnan (2005). Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank untuk melakukan penyaluran dana terhadap depositan karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar baik bagi depositan baru, maupun calon depositan sehingga akan muncul pinjaman tidak tertagih (*bad debt*) yang dapat mengurangi kinerja penyaluran dana bank. Akibat dari hal tersebut aktiva menjadi tidak produktif, perputaran aktiva menjadi terhambat, menyebabkan pencapaian pertumbuhan laba cenderung rendah.

Hasil ini menguatkan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa variabel NPF memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Adanya perbedaan sampel, rentang waktu, metode, dan karakteristik data penelitian menyebabkan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisah, Fathoni, yang menyatakan bahwa rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Semakin tinggi rasio NPF maka semakin menurun kinerja perbankan menghilangkan kesempatan memperoleh laba. *Non Performing Finance* (NPF) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba menandakan bahwa perubahan yang ditunjukkan oleh NPF akan diikuti pertumbuhan laba namun tidak

signifikan. Artinya, Bank Syariah tidak perlu khawatir terhadap peningkatan rasio NPF selama masih pada level aman dibawah 7% sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena jika terlalu tinggi maka bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba sehingga bank sangat perlu untuk mengelola resiko kredit atau pembiayaan secara efektif. Tanda negatif pada koefisien regresi menunjukkan hubungan dimana peningkatan *Non Performing Finance* akan berakibat pada penurunan laba.

FDR menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukan nasabah (deposan) dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Rasio ini juga memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Semakin tinggi rasio ini memberikan indikasi semakin tinggi kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dengan demikian

penelitian ini menolak hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai *probability* yang lebih besar dari nilai signifikansi 5% ($0.578 > 0.05$). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathoni, dkk (2012), Emilda (2016), Setiawan dan Hanryono (2016) yang menyatakan hasil penelitian bahwa rasio FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Adanya perbedaan sampel, rentang waktu, dan karakteristik data penelitian menyebabkan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2014), Hadiwidjaja (2016), dan Lubis (2013) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Finance to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada FDR diikuti oleh pertumbuhan laba namun tidak signifikan, walaupun memiliki pengaruh yang tidak signifikan bukan berarti lembaga perbankan tidak memberikan perhatian terhadap perubahan yang terjadi pada FDR. Akan tetapi lembaga perbankan tetap harus mengikuti ketentuan tentang pemenuhan minimum rasio FDR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan laba. Dengan demikian penelitian ini menerima hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai *probability* yang lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ($0.000 < 0.05$). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathoni, dkk. (2012) yang menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, karena ROA merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Adanya perbedaan sampel, rentang waktu, dan karakteristik data penelitian menyebabkan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputra, dkk. (2014) yang menyatakan bahwa rasio ROA memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut. dalam Fathoni (2012). *Return On Asseet* (ROA) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba menandakan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada rasio ROA diikuti dengan pertumbuhan laba secara signifikan. Sehingga bank perlu memperhatikan perubahan yang

terjadi pada ROA, karena semakin besar rasio ROA yang diperoleh maka akan semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh bank sehingga menyebabkan pertumbuhan laba bank akan terus meningkat.

Untuk mendapatkan rasio *Net interest margin* (NIM) yang meningkat, perlu menekan biaya dana. Biaya dana adalah biaya bagi hasil yang dibayarkan oleh bank kepada masing – masing sumber dan bank yang bersangkutan. Secara keseluruhan, biaya yang harus dikeluarkan oleh bank akan menentukan berapa persen bank harus menetapkan tingkat bagi hasil yang diberikannya kepada nasabahnya untuk memperoleh pendapatan netto bank. *Net interest margin* (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah pendapatan bersih yang diperoleh dalam menggunakan aktiva produktif (Kusuno, 2003). Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit (Sarifudin, 2005). Semakin meningkat rasio ini maka semakin meningkat pendapatan bagi hasil atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Herdiningtyas, 2005).

Dapat diketahui bahwa variabel NIM memiliki signifikansi sebesar 0,874 lebih besar dari 0,05 maka H_{a4} ditolak dan H_{04} diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel NIM

secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Semakin besar nilai NIM tidak diikuti dengan semakin besar pertumbuhan laba karena NIM menunjukkan hasil negatif tidak signifikan. Hal ini mungkin terjadi karena NIM merupakan komponen pendapatan bersih yang diperoleh bank dari selisih bagi hasil antara bagi hasil dana yang dibayar dengan bagi hasil kredit yang diperoleh. Dalam kondisi penuh persaingan sekarang bank cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan pemberian kredit, selain itu untuk memperbesar laba, perbankan di Indonesia banyak mengandalkan sektor jasa di luar kredit seperti pembayaran telepon, listrik, biaya transfer, kliring, serta biaya administrasi lainnya. Sehingga NIM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Didalam perhitungan CAR terdapat aspek Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah asset yang dimiliki perusahaan perbankan yang mengandung risiko. Karena didalamnya mengandung risiko maka diberikan pembobotan sesuai dengan kelompoknya. Dalam perhitungan CAR Bank Indonesia menyebutnya dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (KPMM). Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (KPMM) adalah perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel kualitas CAR adalah sebesar -48.181 atau bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. Berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linear ganda untuk variabel CAR diperoleh nilai signifikansi $> 0,05$, yaitu 0,360. CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hal ini berarti bahwa jumlah modal tidak mempengaruhi pertumbuhan laba. Hal ini disebabkan karena bank-bank yang beroperasi pada tahun tersebut tidak mengoptimalkan modal yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan laba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bila tidak digunakan secara optimal. Dengan ditambahkan variabel *Good Corporate Governance* diperoleh nilai sig. sebesar 0,011. Nilai sig. lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,011 < 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa GCG merupakan Pure Moderator, hal ini disebabkan karena dari Z terhadap Y pada output pertama dan pengaruh interaksi $Z \times X$ pada output kedua, salah satunya signifikan. sehingga diharapkan dengan jumlah CAR yang besar diharapkan penerapan *Good Corporate Governance* semakin baik agar tercapai pertumbuhan laba yang diharapkan.

Koefisien regresi untuk *Maqasyid Syariah*

Indeks (MSI) sebesar 6.422 dan bertanda positif, yang artinya jika variabel MSI mengalami kenaikan 1%, maka pertumbuhan laba akan mengalami kenaikan sebesar 6.422. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara MSI dengan pertumbuhan laba, semakin tinggi rasio MSI yang dilakukan perusahaan maka akan semakin tinggi pertumbuhan laba perusahaan. Untuk itu perbankan syariah diharapkan harus terus menjaga nilai *maqasyid syariah indeks*, karena hanya variabel ini yang dapat membedakan dengan bank konvensional.

KESIMPULAN

1. Variabel independen (NIM, NPF, FDR, ROA, CAR, MSI) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (pertumbuhan laba).
2. Secara parsial: NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dan, MSI tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

DAFTAR PUSTAKA

Angkoso, N (2006). *Akuntansi Lanjutan*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*.

Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Hamidu, N. P. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba pada Perbankan di BEI. *EMBA*, 1(3).
- Handayani, S. (2010). Analisis Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2007. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 10(1).
- Indriantoro, N. & Supomo, B. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta
- Riyanto, W.F. (2010). Peningkatan Kebutuhan dalam Maqasid Asy-Syari'ah. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1): 15.
- Rivai, V. (2007). *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi. Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods for Bussiness*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, (2009). *Metodologi Riset Bisnis*.

- Jakarta: PT. Indeks.
- Susilo. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Selaemba Empat.
- Taswan. (2006). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Totok, S (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warsidi, B, & Pramuka, A. (2000). Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba di Masa yang Akan Datang: Suatu Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEJ. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 2(1).
- Wibowo, H. A., & Pujiati, D. (2011). Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Perusahaan Real Estate dan Property di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Singapura (SGX). *The Indonesian Accounting Review*, 1(2): 155-178.